

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SATKER PKP PROVINSI RIAU



Tim Penyusun

Pengarah :

Suwindar Agung S, S.E., S.T.

Penanggung Jawab :

Achmad Rezhani Fitra, S.T., M.T.

Arie Noverius Kurnia Putra, S.T., M.Arch.

Pelaksana :

Ferry Sugara, S.T.

Jan Fernando, S.T.

Muammar Taufik, S.T.

Yudha Pratama, S.T.

Diterbitkan Oleh :



KEMENPKP
REPUBLIK INDONESIA

SATKER PKP RIAU



Daftar Isi

Tim Penyusun — i

Daftar Isi — 1

Kata Pengantar — 2

Ringkasan Eksekutif — 2

A — Tujuan dan Sasaran — 3

B — Isu Strategis — 4

C — Capaian Kinerja — 6

D — Realisasi Anggaran — 7

Bab 1 Pendahuluan — 11

A — Latar Belakang — 11

B — Tugas dan Fungsi — 12

C — Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia — 15

D — Sarana dan Prasarana — 21

E — Isu Strategis — 23

F — Sistematika Laporan — 25

Bab 2 Perencanaan Kinerja — 28

A — Rencana Strategis — 28

B — Perjanjian Kinerja dan Kronologi Perubahan Perjanjian Kinerja — 31

C — Metode Pengukuran Kinerja — 38

D — Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) — 39

Bab 3 Akuntabilitas Kinerja — 47

A — Upaya Peningkatan Akuntabilitas Kinerja — 47

B — Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja — 49

C — Analisis Perbandingan Kinerja — 50

D — Analisis Realisasi Anggaran — 53

E — Efisiensi Penggunaan Sumber Daya — 55

F — Analisis Pemanfaatan Informasi Dalam Pelaporan Kinerja — 57

G — Faktor Pendukung Keberhasilan dan Penyebab Kegagalan — 59

Bab 4 Penutup — 63

A — Kesimpulan — 63

B — Rekomendasi Tindak Lanjut — 64

Kata Pengantar

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau Tahun Anggaran 2025 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Penyusunan LAKIP ini merupakan wujud pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman tentang Penyelenggaraan SAKIP di lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Laporan ini menjadi bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman selama Tahun Anggaran 2025.

LAKIP Tahun 2025 memuat informasi mengenai perencanaan kinerja, perjanjian kinerja, capaian indikator kinerja, realisasi anggaran, serta analisis atas keberhasilan maupun kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Laporan ini disusun secara sistematis untuk memberikan gambaran yang transparan, terukur, dan akuntabel mengenai kinerja Satuan Kerja dalam mendukung pencapaian sasaran strategis Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman di Provinsi Riau.

Sepanjang Tahun Anggaran 2025, Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis, antara lain penyelenggaraan pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan, dukungan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU), peningkatan kualitas rumah melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Pembangunan Rumah Susun (Rusun) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) serta dukungan manajemen dan layanan perkantoran. Seluruh pelaksanaan kegiatan tersebut diarahkan untuk mendukung terwujudnya hunian yang layak, terjangkau, berkelanjutan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Riau.

Kami menyadari bahwa dalam pelaksanaan tugas dan penyusunan laporan ini masih terdapat berbagai keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan sebagai bahan perbaikan dan penyempurnaan kinerja di masa mendatang. Besar harapan kami, laporan ini dapat menjadi media evaluasi sekaligus acuan dalam peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan program di tahun-tahun berikutnya.

Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran pegawai, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Perbendaharaan, tenaga pendukung, serta seluruh pemangku kepentingan yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau Tahun Anggaran 2025.

Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat serta memperkuat komitmen kita bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel.

Kepala Satker PPK Provinsi Riau



Suwindar Agung S.S.E., S.T.
NIP. 198508072010011019



Ringkasan Eksekutif

A. Tujuan dan Sasaran

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman serta implementasi Rencana Strategis Tahun 2025–2029, Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau menetapkan tujuan sebagai berikut:

1. **Mewujudkan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang layak, aman, terjangkau dan berkelanjutan** bagi masyarakat Provinsi Riau, khususnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
2. **Meningkatkan kualitas hunian dan lingkungan permukiman** melalui pembangunan dan peningkatan kualitas rumah, penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU), serta dukungan terhadap penanganan kawasan kumuh.
3. **Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program perumahan** melalui penguatan sistem pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja.
4. **Mewujudkan tata kelola satuan kerja yang profesional, transparan, dan akuntabel** melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), pengelolaan keuangan yang tertib, serta manajemen risiko yang terukur.

Untuk mencapai tujuan tersebut, ditetapkan sasaran strategis Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

1. **Meningkatnya Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Efisien, Layak, dan Terjangkau**

Sasaran ini diukur melalui indikator kinerja kegiatan, antara lain:

- Jumlah rumah yang mendapatkan pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU).
- Jumlah unit rumah swadaya yang ditingkatkan kualitasnya melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
- Jumlah rumah susun/rumah khusus yang terbangun (apabila terdapat kegiatan pada TA 2025).
- Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan perumahan perdesaan dan perkotaan.
- Jumlah laporan pengendalian dan pelaporan kegiatan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.

Sasaran ini diarahkan untuk mendukung peningkatan akses masyarakat terhadap hunian layak serta peningkatan kualitas lingkungan permukiman di wilayah Provinsi Riau.

2. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman di Daerah

Sasaran ini diukur melalui :

- Terselenggaranya layanan perkantoran secara efektif dan efisien.
- Tertibnya pengelolaan anggaran dan pelaporan keuangan.
- Meningkatnya kualitas pelaporan kinerja dan implementasi manajemen risiko.
- Peningkatan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan standar operasional yang berlaku.

Sasaran ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan dilaksanakan secara profesional, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.

B. Isu Strategis

Penyelenggaraan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di Provinsi Riau menghadapi berbagai tantangan yang bersifat struktural, geografis, sosial, maupun fiskal. Isu strategis ini menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program Tahun Anggaran 2025.

1. Kebutuhan Hunian Layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)

Pertumbuhan penduduk dan dinamika pembangunan wilayah di Provinsi Riau, khususnya di kawasan perkotaan seperti Pekanbaru dan wilayah penyangga industri, mendorong meningkatnya kebutuhan rumah layak huni. Masih terdapat rumah tidak layak huni (RTLH) serta keterbatasan akses pembiayaan perumahan bagi MBR. Hal ini menuntut optimalisasi program peningkatan kualitas rumah swadaya serta dukungan pembangunan hunian baru yang terjangkau.

2. Kualitas Kawasan Permukiman dan Infrastruktur Dasar

Sebagian kawasan permukiman, terutama di wilayah pesisir, bantaran sungai, dan kawasan dengan karakteristik lahan gambut, masih menghadapi permasalahan keterbatasan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU). Tantangan geografis Riau yang didominasi rawa dan lahan gambut memerlukan pendekatan teknis yang adaptif serta perencanaan infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

3. Kerentanan terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Provinsi Riau memiliki risiko bencana seperti banjir, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta penurunan muka tanah pada wilayah tertentu. Kondisi ini menuntut pembangunan perumahan yang memenuhi aspek keselamatan, ketahanan terhadap bencana, serta mendukung prinsip pembangunan rendah emisi dan ramah lingkungan.

4. Keterpaduan Perencanaan dan Sinkronisasi Pusat–Daerah

Penyelenggaraan perumahan memerlukan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya. Tantangan yang dihadapi antara lain keterpaduan data perumahan, sinkronisasi perencanaan dengan RPJMN dan RPJMD, serta konsistensi penganggaran. Oleh karena itu, penguatan koordinasi dan integrasi sistem informasi perumahan menjadi kebutuhan strategis.

5. Efektivitas Pengelolaan Anggaran dan Tata Kelola

Keterbatasan fiskal serta tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik mengharuskan satuan kerja mengelola anggaran secara efektif, efisien, dan tepat sasaran. Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), manajemen risiko, serta penguatan pengawasan internal menjadi bagian penting dalam menjaga kredibilitas dan kinerja organisasi.

6. Peningkatan Kapasitas SDM dan Digitalisasi Layanan

Transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan menuntut peningkatan kompetensi sumber daya manusia serta optimalisasi pemanfaatan sistem informasi berbasis elektronik dalam pelaporan, monitoring, dan evaluasi kinerja. Hal ini menjadi kunci dalam mewujudkan organisasi yang adaptif dan responsif terhadap perubahan.

Penegasan Strategis

Berdasarkan isu-isu tersebut, Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau pada Tahun Anggaran 2025 memfokuskan kebijakan pada:

- Peningkatan kualitas dan akses hunian bagi MBR
- Penguatan dukungan infrastruktur permukiman yang berkelanjutan
- Peningkatan kualitas pengendalian dan pelaporan kinerja
- Serta penguatan tata kelola organisasi yang akuntabel dan berorientasi hasil.

Isu strategis ini menjadi pijakan dalam penetapan target kinerja dan pelaksanaan program agar pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di Provinsi Riau dapat memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

C. Capaian Kinerja

Capaian kinerja Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau Tahun Anggaran 2025 diukur dari indikator kinerja yang telah ditetapkan sesuai Sasaran Kegiatan seperti berikut:

- 1.Sasaran Kegiatan (SK) Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dengan Indikator Kinerja Tingkat **Layanan Dukungan Manajemen** sebanyak 1 layanan dengan capaian **100%**
- 2.Sasaran Kegiatan (SK) Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni di Kawasan Permukiman dengan Indikator Kinerja Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan **Peningkatan Kualitas Rumah dan Penanganan Kumuh** sebanyak 1 laporan dengan capaian **100%**
- 3.Sasaran Kegiatan (SK) Meningkatnya Luasan Permukiman Kumuh yang Ditangani Secara Terpadu dengan Indikator Kinerja Luas **Permukiman Kumuh yang Ditangani Secara Terpadu** seluas **35,58** hektar dengan capaian **100%**
- 4.Sasaran Kegiatan (SK) Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam **pembangunan perumahan perdesaan** dengan Indikator Kinerja Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan sebanyak 1 laporan dengan capaian **100%**
- 5.Sasaran Kegiatan (SK) Meningkatnya penyediaan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas pembangunan perumahan di wilayah perdesaan dengan Indikator Kinerja Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan **Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan** sebanyak 1 laporan dengan capaian **100%** dan Jumlah Rumah Swadaya Perumahan Perdesaan sebanyak **376** unit dengan capaian **100%**
- 6.Sasaran Kegiatan (SK) Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi dalam **Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan** dengan Indikator Kinerja Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan sebanyak 1 laporan dengan capaian **100%**
- 7.Sasaran Kegiatan (SK) Meningkatnya Ketersediaan **Rumah Baru Layak Huni di Perkotaan** dengan Indikator Kinerja Jumlah **Rumah Susun** Hunian ASN/TNI/POLRI Perumahan Perkotaan sebanyak **44** unit dengan capaian **100%**
- 8.Sasaran Kegiatan (SK) Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni melalui **Peningkatan Kualitas Pembangunan Perumahan di Wilayah Perkotaan** dengan Indikator Kinerja Jumlah Rumah Swadaya Perkotaan sebanyak **57** unit dengan capaian **100%**

D. Realisasi Anggaran

Capaian realisasi anggaran Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau berdasarkan data pada myPKP per tanggal **31 Desember 2025** secara keseluruhan sebesar **Rp39.155.083.991** (Tiga Puluh Sembilan Miliar Seratus Lima Puluh Lima Juta Delapan Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah) atau **99,12%** dari total pagu anggaran **Rp39.504.333.000** (Tiga Puluh Sembilan Miliar Lima Ratus Empat Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah). Rincian realisasi pada masing-masing DIPA sebagai berikut:

1. Satuan Kerja PKP Provinsi Riau mencapai realisasi anggaran sebesar Rp8.660.722.078 (Delapan Miliar Enam Ratus Enam Puluh Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Ribu Tujuh Puluh Delapan Rupiah) atau 97,32% dari keseluruhan pagu anggaran dari **Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman** sebesar Rp8.899.434.000 (Delapan Miliar Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah). Sedangkan realisasi fisik per tanggal 31 Desember 2025 mencapai nilai 100%.
2. Satuan Kerja PKP Provinsi Riau mencapai realisasi anggaran sebesar Rp8.526.957.938 (Delapan Miliar Lima Ratus Dua Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah) atau 99,90% dari keseluruhan pagu anggaran dari **Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan** sebesar Rp8.535.521.000 (Delapan Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Lima Juta Lima Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah). Sedangkan realisasi fisik per tanggal 31 Desember 2025 mencapai nilai 100%.
3. Satuan Kerja PKP Provinsi Riau mencapai realisasi anggaran sebesar Rp21.295.787.726 (Dua Puluh Satu Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Rupiah) atau 99,67% dari keseluruhan pagu anggaran dari **Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan** sebesar Rp21.365.864.000 (Dua Puluh Satu Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Lima Juta Delapan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah). Sedangkan realisasi fisik per tanggal 31 Desember 2025 mencapai nilai 100%.
4. Satuan Kerja PKP Provinsi Riau mencapai realisasi anggaran sebesar Rp671.616.249 (Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Enam Ratus Enam Belas Ribu Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah) atau 95,47% dari keseluruhan pagu anggaran dari **Sekretariat Jenderal** sebesar Rp703.514.000 (Tujuh Ratus Tiga Juta Lima Ratus Empat Belas Ribu Rupiah). Sedangkan realisasi fisik per tanggal 31 Desember 2025 mencapai nilai 100%.

Mengacu pada Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Perumahan Dan Kawasan Permukiman; lokasi dan/atau wilayah kerja yang ada Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau berada di bawah Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III. Balai P3KP Sumatera III berada di bawah arahan langsung dari Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman dan berkoordinasi dengan Unit Organisasi Eselon I lainnya dalam melaksanakan kegiatan perumahan dan kawasan permukiman di wilayah Riau, Sumatera Barat dan Kepulauan Riau.

Tujuan Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau adalah membantu serta mendukung Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III dalam menyelenggarakan program-program perumahan melalui pembangunan Rumah Susun, Rumah Khusus, Rumah Swadaya, Rumah Umum Komersil, Sarana dan Prasarana, dan Utilitas Umum, serta koordinasi penyediaan lahan dan pengembangan hunian.

Tugas pokok Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau adalah menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan yang ditetapkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), melaksanakan penatausahaan, pengamanan administrasi dan fisik Barang Milik Negara (BMN). Berdasarkan tugas pokok tersebut, maka Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait dengan pelaksanaan kegiatan sesuai DIPA, baik dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Kabupaten/ Kota atau pihak-pihak lainnya;
2. Menyiapkan berbagai fasilitas, sarana dan prasarana yang dibutuhkan demi kelancaran pelaksanaan kegiatan;
3. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan; dan
4. Membuat Laporan Keuangan dan Laporan barang Milik Negara dengan mengikuti ketentuan sistem akuntansi pemerintah.

Sesuai dengan amanat Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan mengacu pada Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, maka pelaporan kinerja yang akuntabel merupakan salah satu langkah untuk mendorong terselenggaranya konsep Good Governance secara nyata dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional yang baik dan berkualitas.

Laporan Kinerja Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau merupakan perwujudan akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III TA. 2025 - 2029, Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau TA. 2025 yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2025.



SATUAN KERJA PKP PROVINSI RIAU

PENDAHULUAN



BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) menuntut adanya sistem pengelolaan yang transparan, akuntabel, efektif, dan berorientasi pada hasil. Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, setiap instansi pemerintah wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepadanya melalui penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan instrumen pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penyusunan LAKIP mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau merupakan unit pelaksana teknis daerah di lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang bertugas melaksanakan program dan kegiatan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2025. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Satuan Kerja bertanggung jawab atas pencapaian target kinerja, pengelolaan anggaran, serta pengamanan administrasi dan fisik Barang Milik Negara (BMN).

Provinsi Riau memiliki karakteristik wilayah yang unik, antara lain dominasi lahan gambut, kawasan pesisir, serta wilayah perkotaan yang berkembang pesat. Kondisi tersebut menimbulkan tantangan tersendiri dalam penyediaan perumahan yang layak, aman, dan berkelanjutan. Di sisi lain, pertumbuhan penduduk dan kebutuhan hunian bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) menuntut adanya percepatan pembangunan perumahan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman, baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau melaksanakan berbagai program antara lain penyediaan rumah layak huni, peningkatan kualitas rumah swadaya (BSPS), pembangunan rumah susun dan rumah khusus, penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU), serta kegiatan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan tersebut selama Tahun Anggaran 2025, disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau. Laporan ini memuat informasi mengenai perencanaan kinerja, capaian indikator kinerja, realisasi anggaran, analisis perbandingan kinerja, serta berbagai permasalahan dan tindak lanjut yang dilakukan.

Melalui penyusunan LAKIP ini, diharapkan terwujud peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, penguatan budaya akuntabilitas, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di Provinsi Riau. Selain itu, laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam rangka perbaikan kinerja pada tahun-tahun mendatang, sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat Provinsi Riau.

B. TUGAS DAN FUNGSI

1. Sejarah Singkat dan Perkembangan Kelembagaan

Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau merupakan bagian dari unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang bertugas melaksanakan program pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di daerah.

Secara historis, pelaksanaan program perumahan di daerah sebelumnya berada dalam lingkup satuan kerja penyediaan perumahan di bawah kementerian teknis yang membidangi pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Seiring dengan dinamika kebijakan nasional dan penataan organisasi kementerian, dilakukan penyesuaian struktur kelembagaan untuk memperkuat fokus pembangunan sektor perumahan dan kawasan permukiman secara lebih terintegrasi.

Pada Tahun 2025, berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, dilakukan penataan organisasi unit pelaksana teknis, termasuk penegasan kedudukan dan wilayah kerja Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau di bawah koordinasi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III.

Penataan tersebut merupakan bagian dari reformasi birokrasi dan penguatan tata kelola kelembagaan, dengan tujuan:

- Meningkatkan efektivitas pelaksanaan program perumahan dan kawasan permukiman;
- Memperjelas garis koordinasi antara pusat dan daerah;
- Memperkuat fungsi pengendalian, pemantauan, dan evaluasi kegiatan;
- Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan anggaran dan kinerja.

Perubahan kelembagaan ini tidak mengubah substansi utama penyelenggaraan program perumahan, namun lebih menitikberatkan pada penyesuaian struktur organisasi, mekanisme koordinasi, serta penguatan sistem akuntabilitas kinerja.

2. Dasar Hukum Tugas dan Fungsi

Pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang mengatur penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman secara menyeluruh, termasuk tanggung jawab pemerintah dalam penyediaan rumah layak huni.
- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang mewajibkan setiap instansi pemerintah menyusun perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja.
- Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

3. Tugas

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau mempunyai tugas:

“Melaksanakan sebagian tugas teknis operasional di bidang perumahan dan kawasan permukiman di wilayah Provinsi Riau sesuai dengan kebijakan dan program yang ditetapkan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.”

Dalam pelaksanaan tugas tersebut, satuan kerja bertanggung jawab terhadap pencapaian target kinerja sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2025.

4. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau menyelenggarakan fungsi:

- Pelaksanaan program penyediaan rumah layak huni, meliputi pembangunan rumah susun, rumah khusus, dan peningkatan kualitas rumah swadaya (BSPS).
- Pelaksanaan kegiatan penyediaan dan peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) pada kawasan perumahan.

- Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan.
- Pengelolaan administrasi keuangan dan penatausahaan anggaran, sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan negara.
- Pengelolaan dan pengamanan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam tanggung jawab satuan kerja.
- Pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait, dalam rangka mendukung keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan program.
- Pelaksanaan dukungan manajemen dan layanan perkantoran, guna menjamin kelancaran operasional organisasi.

5. Kronologi Perubahan Tahun Anggaran 2025

Pada Tahun Anggaran 2025 terdapat penyesuaian struktur organisasi dan mekanisme pelaksanaan program sebagai dampak dari berlakunya Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2025.

Penyesuaian tersebut meliputi:

- Penegasan nomenklatur satuan kerja;
- Penyesuaian garis koordinasi dengan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- Penataan kembali pembagian kewenangan teknis antar Direktorat Jenderal;
- Penyesuaian mekanisme pelaporan dan pengendalian kinerja berbasis SAKIP.

Perubahan tersebut tidak mengubah mandat utama penyelenggaraan perumahan, namun memperkuat integrasi kebijakan, efektivitas pelaksanaan program, serta akuntabilitas pengelolaan anggaran dan kinerja organisasi.



C. STRUKTUR ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA

1. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Satker PKP Provinsi Riau dirancang untuk mendukung pencapaian sasaran strategis Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Kerangka kelembagaan ini menekankan pentingnya koordinasi antar unit organisasi, baik internal maupun eksternal, serta pengelolaan fungsi kelembagaan yang efektif dan efisien.

Sebelum transformasi kelembagaan pada tahun 2024, entitas yang menangani urusan perumahan berada dalam Direktorat Jenderal Perumahan di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Sejak berdirinya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai kementerian mandiri, fungsi tersebut dialihkan dan diperkuat menjadi satu kesatuan yang lebih fokus, sehingga paradigma kelembagaan bergeser dari pendekatan sektoral berbasis program menjadi pendekatan berbasis wilayah.

2. Landasan Hukum

Struktur organisasi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman ditetapkan melalui:

- Peraturan Menteri PKP Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- Peraturan Menteri PKP Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

3. Unit Kerja Eselon I

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Kementerian memiliki enam Unit Kerja Eselon I, yaitu:

- **Sekretariat Jenderal**
- **Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman**
- **Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan**
- **Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan**
- **Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko**
- **Inspektorat Jenderal**

4. Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Sebagai perpanjangan tangan di daerah, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman membentuk 19 Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman. Untuk wilayah Provinsi Riau, pelaksanaan program berada di bawah tanggung jawab Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III, yang kemudian menugaskan Satker PKP Provinsi Riau sebagai pelaksana teknis di lapangan.

Satker PKP Provinsi Riau memiliki mandat untuk:

- Melaksanakan penyediaan perumahan layak huni.
- Meningkatkan kualitas perumahan swadaya.
- Mengembangkan kawasan permukiman terpadu.
- Menata kawasan permukiman pasca bencana dan konflik sosial.
- Memfasilitasi serah terima aset perumahan dan permukiman.

5. Kedudukan dan Koordinasi

Dalam menjalankan tugasnya, Satker PKP Provinsi Riau bertanggung jawab langsung kepada Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III. Selain itu, Satker ini juga mengampu kegiatan dari empat Unit Kerja Eselon I, yaitu:

- Sekretariat Jenderal
- Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman
- Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan
- Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan

Dengan transformasi kelembagaan dari Direktorat Jenderal Perumahan menjadi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, struktur organisasi Satker PKP Provinsi Riau kini lebih sederhana, terintegrasi, dan berorientasi pada wilayah. Paradigma baru ini memungkinkan Satker untuk lebih adaptif dalam menjawab kompleksitas permasalahan perumahan dan permukiman di Riau, baik di kawasan perkotaan, perdesaan, maupun pesisir. Dengan demikian, pelaksanaan program dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Satker PKP Provinsi Riau didukung oleh **tenaga penunjang utama** yang menjadi bagian integral dari susunan organisasi. Unsur-unsur tersebut terdiri atas **Kepala Satuan Kerja, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pembuat Surat Perintah Membayar (PPSPM), dan Bendahara Pengeluaran**. Selain itu, terdapat pula Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana yang berperan mendukung pelaksanaan tugas teknis maupun administratif sesuai dengan kompetensi masing-masing.

Seluruh jajaran dalam struktur organisasi Satker PKP Provinsi Riau memainkan peran penting dalam pelaksanaan tugas harian, baik di lapangan maupun di kantor. Peran tersebut mencakup aspek pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan, sehingga penyediaan perumahan dan penataan kawasan permukiman di Provinsi Riau dapat berjalan secara efisien, efektif, dan optimal.

6. Tugas dan Kewenangan Pejabat Utama

- **Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (KPA/B)** Bertugas menyelenggarakan kegiatan sesuai Rencana Kerja dan Anggaran yang telah ditetapkan dalam DIPA, melaksanakan penatausahaan, pengamanan administrasi dan fisik Barang Milik Negara (BMN), serta mengurus sertifikasi tanah. KPA/B bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan program.

- **Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)** Memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak/Surat Perjanjian Kerja (SPK), serta bertanggung jawab atas kebenaran materil dan segala akibat yang timbul dari kontrak/SPK tersebut. PPK bertanggung jawab langsung kepada KPA/B.
- **Pejabat Pembuat Surat Perintah Membayar (PPSPM)** Bertugas melakukan pengujian atas Surat Permintaan Pembayaran (SPP), menyetujui dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM), serta bertanggung jawab kepada KPA/B.
- **Bendahara** Pengeluaran Bertugas mengelola uang persediaan Satker dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Kerja.

7. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan elemen penting dalam mendukung keberhasilan organisasi pemerintah dalam mencapai target dan sasaran strategis. Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), diperlukan aparatur yang profesional, berkompeten, dan mampu menjalankan tugas sesuai dengan bidangnya. Jumlah pegawai pada Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau berdasarkan data per **31 Desember 2025** adalah **22 orang** dengan komposisi sebagai berikut:

- Pegawai Negeri Sipil (PNS) : 5 Orang



- Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) : 11 Orang

Hendy Ramadhan, S.T.	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama	
Jan Fernando, S.T.	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama	
Marvel Partogi Simanjuntak, S.T.	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama	
Muammar Taufik, S.T.	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama	
Rydbo Amalia Putri, S.T.	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama	
Taufik Ramadhan, S.T.	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama	
Habil Habibillah, S.T.	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama	

- Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) : 11 Orang

M. Yusuf Agustamar, S.T.	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama	
Waode Ulya Nabila, S.T.	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama	
Yudha Pratama, S.T.	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama	
Sriwahyuni, S.Sos	Arsiparis Ahli Pertama	

- Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (PPPK) : 6 Orang

Sabila Khalmi, S.T.	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Pertama	
Winda Nurhidayati, S.E.	Penata Layanan Operasional	

- Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (PPPK) : 6 Orang

Een Said Akbar, S.T.	Penata Layanan Operasional	
Ferry Sugara, S.T.	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama	
Rosi Destria Candra Dinata	Pengadministrasi Perkantoran	
Rio Desriwaldi	Pengadministrasi Perkantoran	

Komposisi tersebut menunjukkan bahwa pegawai dengan status CPNS merupakan kelompok terbesar, yaitu sekitar 50% dari total pegawai. Hal ini mencerminkan adanya proses regenerasi aparatur yang sedang berlangsung, sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam memperkuat kapasitas kelembagaan melalui rekrutmen pegawai baru. Pegawai PNS tetap berperan dalam menjaga kesinambungan tata kelola organisasi, sedangkan PPPK mendukung pelaksanaan program dengan keahlian yang dimiliki. Dengan kombinasi ini, Satker PKP Provinsi Riau memiliki sumber daya manusia yang cukup untuk melaksanakan tugas penyediaan perumahan dan penataan kawasan permukiman secara efektif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di wilayah Provinsi Riau.

D. SARANA DAN PRASARANA

Ketersediaan sarana dan prasarana tersebut memberikan dampak nyata bagi peningkatan kinerja organisasi, antara lain mempercepat proses koordinasi dan pengawasan, menjamin kelancaran komunikasi lintas instansi maupun dengan masyarakat penerima manfaat, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui sistem informasi yang transparan dan akuntabel. Dengan dukungan ini, Satker PKP Provinsi Riau mampu menjalankan program perumahan dan kawasan permukiman secara lebih terarah, efisien, dan berdaya guna. Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Satker PKP) Provinsi Riau senantiasa memastikan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana ini tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu operasional, tetapi juga sebagai fondasi penting untuk menjamin efektivitas, efisiensi, serta akuntabilitas pelaksanaan program perumahan dan kawasan permukiman.

1. Sarana dan Prasarana Fisik

Hingga 31 Desember 2025, Satker PKP Provinsi Riau tercatat memiliki 740 unit Barang Milik Negara (BMN) dengan nilai perolehan sebesar Rp 11,883,654,400. Aset tersebut terdiri dari 738 unit peralatan dan mesin, termasuk komputer, alat kantor, alat rumah tangga, serta perlengkapan komunikasi dan studio, dengan total nilai Rp 1,445,144,400. Selain itu, terdapat 2 unit gedung dan bangunan berupa gedung kerja dan gedung tempat tinggal dengan nilai Rp 10,438,510,000.

Ketersediaan aset ini menjadi penopang utama dalam mendukung kegiatan administrasi maupun teknis di lapangan. Dengan pengelolaan yang baik, BMN Satker PKP Provinsi Riau tidak hanya berfungsi sebagai sarana operasional, tetapi juga mencerminkan komitmen organisasi dalam menjaga akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas pelaksanaan program perumahan dan kawasan permukiman.

LAPORAN BARANG PENGUNA GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL RINCIAN PER KELOMPOK BARANG UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025												
UAPB : 146 UAKPB : 491385		KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI RIAU										
		Tgl Data : 21/01/26 12:40 PM Tgl Cetak : 21/01/26 4:34 PM Halaman : 1 Kode Lap : lap_bmn_gab_ket_satker_pos										
AKUN NERACANELOMPOK BARANG			SATUAN		SALDO PER 1 JANUARI 2025		SALDO				SALDO PER 31 DESEMBER 2025	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI		BESTAMBAH		BERUBAH		KUANTITAS	NILAI	
						6	7	8	9			10
120111	Peralatan dan Mesin		0	0	738	1,445,144,400	0	0	738	1,445,144,400		
30003	ALAT UKUR		0	0	1	638,000	0	0	1	638,000		
30001	ALAT KANTOR		0	0	171	246,733,380	0	0	171	246,733,380		
30002	ALAT RUMAH TANGGA		0	0	506	633,030,012	0	0	506	633,030,012		
30004	ALAT STUDIO		0	0	7	176,807,500	0	0	7	176,807,500		
30005	ALAT KOMUNIKASI		0	0	1	2,473,000	0	0	1	2,473,000		
31001	KOMPUTER LINT		0	0	30	371,018,900	0	0	30	371,018,900		
31002	PERALATAN KOMPUTER		0	0	29	35,841,000	0	0	29	35,841,000		
1201111	Gedung dan Bangunan		0	0	2	10,438,510,000	0	0	2	10,438,510,000		
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA		0	0	1	542,000,000	0	0	1	542,000,000		
40102	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL		0	0	1	9,896,510,000	0	0	1	9,896,510,000		
TOTAL					0	11,883,654,400	0	0		11,883,654,400		

**LAPORAN BARANG PENGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED**

UAPB : 146 KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
UAKPB : 691547 PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI RIAU

Tgl Data : 07/04/26 6:38 AM
Tgl Cetak : 07/04/26 10:29 AM
Halaman : 1

Kode Lap : lap_barng_gab_satker_poc

KODE		URAIAN	SATUAN	SALDO PER 1 JANUARI 2025		SAKSI				SALDO PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED	
				KANTITAS	NILAI	BERTAMBAH		BERKURANG		KANTITAS	NILAI
						KANTITAS	NILAI	KANTITAS	NILAI		
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10
132111	Peralatan dan Mesin			0	0	1	1.176.518.487	0	0	1	1.176.518.487
3050201999	Mesin dan Peralatan			0	0	1	1.176.518.487	0	0	1	1.176.518.487
133111	Gedung dan Bangunan			0	0	1	25.810.827.900	0	0	1	25.810.827.900
4010208001	Pusat Kegiatan Masyarakat			0	0	1	25.810.827.900	0	0	1	25.810.827.900
TOTAL				0	0		26.987.346.387	0	0		26.987.346.387

2. Teknologi Informasi

Untuk mendukung efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan tugas, Satker PKP Provinsi Riau memanfaatkan berbagai aplikasi berbasis elektronik dan sistem informasi digital. Setiap aplikasi memiliki fungsi spesifik yang saling melengkapi, sehingga keseluruhan proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan dapat berjalan lebih efisien.

- **myPKP** Digunakan untuk memantau progres fisik dan realisasi keuangan kegiatan di lapangan secara elektronik. Data yang diinput bersifat akurat dan sesuai kondisi sebenarnya, sehingga pelaporan menjadi akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan. Aplikasi ini mempercepat pengambilan keputusan oleh pimpinan berdasarkan informasi terkini.
- **RKAKL DIPA Online** Berfungsi sebagai sistem informasi berbasis web untuk mengakses referensi program, kegiatan, output satker, serta melakukan revisi dan penelaahan anggaran secara digital. Dengan aplikasi ini, proses pengelolaan anggaran menjadi lebih transparan dan dapat dilakukan lintas unit secara cepat.
- **OM-SPAN (Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara)** Digunakan untuk memantau transaksi keuangan negara dalam Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN). Aplikasi ini menyajikan informasi keuangan yang cepat, akurat, dan terintegrasi, sehingga mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran.
- **SAKTI (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi)** Merupakan sistem terintegrasi yang mengelola seluruh tahapan keuangan satker, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban anggaran. Dengan konsep single database, SAKTI memastikan pengelolaan keuangan lebih efisien, akuntabel, dan sesuai amanat Undang-Undang Keuangan Negara.
- **LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik)** Digunakan dalam proses pengadaan barang dan jasa melalui sistem e-procurement. Dengan LPSE, seluruh proses lelang dilakukan secara elektronik sehingga lebih transparan, akuntabel, dan dapat diawasi oleh publik.
- **SIMPONI (Sistem Informasi PNPB Online)** Memfasilitasi pembayaran PNPB dan penerimaan non-anggaran melalui berbagai kanal digital seperti ATM, internet banking, dan teller. Aplikasi ini memberikan kemudahan bagi wajib bayar sekaligus meningkatkan efisiensi penerimaan negara.

-
- **DJP Online** Menyediakan layanan pelaporan dan pembayaran pajak secara elektronik melalui e-filing dan e-billing. Aplikasi ini mendukung kepatuhan pajak satker sekaligus mempermudah proses administrasi perpajakan.
 - **SIMAN (Sistem Informasi Manajemen Aset Negara)** Digunakan untuk pengelolaan BMN mulai dari perencanaan, penatausahaan, pemeliharaan, hingga penghapusan aset. SIMAN memastikan pengelolaan aset lebih tertib, transparan, dan terintegrasi dalam satu ekosistem digital.

Dengan dukungan aplikasi-aplikasi tersebut, Satker PKP Provinsi Riau mampu meningkatkan efisiensi kerja, mempercepat proses pengambilan keputusan, serta menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran maupun aset. Digitalisasi ini menjadi fondasi penting bagi pelaksanaan program perumahan dan kawasan permukiman yang lebih modern, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

E. ISU STRATEGIS

Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan karena memiliki dampak signifikan terhadap pencapaian tujuan pembangunan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Isu strategis bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan arah penyelenggaraan pemerintahan di masa yang akan datang.

Dalam konteks penyelenggaraan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di Provinsi Riau, beberapa isu strategis yang menjadi perhatian pada Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

1. Kebutuhan Hunian Layak dan Pengurangan Backlog Perumahan

Pertumbuhan penduduk, urbanisasi, serta perkembangan kawasan industri dan perkebunan di Provinsi Riau mendorong peningkatan kebutuhan rumah layak huni. Di sisi lain, masih terdapat backlog perumahan dan rumah tidak layak huni (RTLH), khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Isu ini bersifat mendasar dan berjangka panjang karena berkaitan langsung dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat serta kualitas hidup. Penanganan backlog dan peningkatan kualitas hunian menjadi prioritas strategis dalam mendukung kesejahteraan masyarakat dan stabilitas sosial.

2. Karakteristik Wilayah Riau: Lahan Gambut dan Kawasan Pesisir

Sebagian besar wilayah Provinsi Riau terdiri atas lahan gambut dan kawasan pesisir yang memiliki kerentanan tinggi terhadap degradasi lingkungan, penurunan muka tanah (subsidence), serta risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Kondisi ini menuntut pendekatan teknis yang adaptif dalam pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, termasuk desain konstruksi yang sesuai dengan karakteristik tanah dan upaya mitigasi risiko lingkungan. Isu ini sangat penting dan strategis karena berdampak langsung pada keberlanjutan pembangunan dan keselamatan masyarakat.

3. Kerentanan terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Provinsi Riau menghadapi risiko bencana seperti banjir musiman, kebakaran hutan dan lahan, serta dampak perubahan iklim yang memengaruhi kualitas lingkungan permukiman.

Isu ini bersifat mendesak dan menentukan arah kebijakan pembangunan ke depan, khususnya dalam penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainable development), pembangunan rendah emisi, serta integrasi aspek mitigasi dan adaptasi bencana dalam perencanaan perumahan.

4. Kualitas Kawasan Permukiman dan Penanganan Kumuh

Masih terdapat kawasan permukiman dengan keterbatasan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU), terutama di wilayah perkotaan dan kawasan pesisir. Penanganan kawasan kumuh dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman menjadi isu penting karena berdampak langsung pada kesehatan, produktivitas, dan kualitas hidup masyarakat.

Isu ini bersifat penting dan mendesak karena berkaitan dengan pencapaian target pembangunan nasional dan peningkatan daya saing daerah.

5. Keterpaduan Perencanaan dan Sinkronisasi Pusat–Daerah

Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman memerlukan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Tantangan yang dihadapi meliputi keterpaduan data, keselarasan dokumen perencanaan (RPJMN, RPJMD, dan rencana sektoral), serta kesiapan lahan dan dokumen pendukung.

Isu ini bersifat strategis dan menentukan keberhasilan implementasi program karena tanpa sinkronisasi yang baik, pelaksanaan kegiatan berpotensi tidak optimal dan tidak tepat sasaran.

6. Efektivitas Pengelolaan Anggaran dan Penguatan Akuntabilitas

Keterbatasan fiskal serta tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik menuntut pengelolaan anggaran yang efisien, efektif, dan tepat sasaran. Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), manajemen risiko, serta penguatan pengendalian internal menjadi aspek yang harus terus ditingkatkan.

Isu ini bersifat mendasar dan berjangka panjang karena berkaitan dengan kredibilitas institusi dan keberlanjutan program pembangunan.

7. Peningkatan Kapasitas SDM dan Transformasi Digital

Perkembangan teknologi informasi dan tuntutan reformasi birokrasi mendorong perlunya peningkatan kompetensi sumber daya manusia serta optimalisasi sistem informasi dalam pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja.

Isu ini menjadi penting dan menentukan dalam mewujudkan organisasi yang adaptif, responsif, dan berbasis kinerja di masa yang akan datang.

Penegasan Strategis

Berdasarkan isu-isu tersebut, arah kebijakan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di Provinsi Riau difokuskan pada:

- Peningkatan akses dan kualitas hunian bagi MBR;
- Pembangunan perumahan yang adaptif terhadap karakteristik lahan gambut dan risiko bencana;
- Penanganan kawasan kumuh dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman;
- Penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan manajemen risiko;
- Peningkatan sinergi pusat dan daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan program.

Isu strategis tersebut menjadi landasan dalam penyusunan perencanaan, penetapan target kinerja, serta pelaksanaan program Tahun Anggaran 2025 dan tahun-tahun mendatang, guna mewujudkan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang layak, aman, terjangkau, dan berkelanjutan di Provinsi Riau.

F. SISTEMATIKA LAPORAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau Tahun Anggaran 2025 disusun secara sistematis untuk memberikan gambaran yang utuh mengenai perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, dan evaluasi kinerja selama satu tahun anggaran.

Sistematika penulisan laporan ini mengacu pada ketentuan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta pedoman pelaporan kinerja di lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Adapun sistematika penyusunan laporan adalah sebagai berikut:

RINGKASAN EKSEKUTIF

Memuat ringkasan Laporan Kinerja tahunan yang memuat tujuan dan sasaran, isu strategis, capaian Kinerja, dan realisasi anggaran, yang terdiri atas:

1. Tujuan dan Sasaran
2. Isu Strategis
3. Capaian Kinerja
4. Realisasi Anggaran

BAB I PENDAHULUAN

Memuat gambaran umum mengenai Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau, yang terdiri atas:

1. Latar Belakang
2. Tugas dan Fungsi
3. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia
4. Sarana dan Prasarana
5. Isu Strategis
6. Sistematika Laporan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini memuat dokumen dan proses perencanaan kinerja Tahun Anggaran 2025, yang meliputi:

1. Rencana Strategis
2. Perjanjian Kinerja dan Kronologi Perubahan Perjanjian Kinerja
3. Metode Pengukuran Kinerja
4. DIPA

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini merupakan bagian inti laporan yang menyajikan hasil pengukuran dan analisis capaian kinerja Tahun Anggaran 2025, meliputi:

1. Upaya Peningkatan Akuntabilitas Kinerja
2. Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja, Program Prioritas, Prioritas Nasional, Pantauan Kantor Staf Presiden
3. Analisis Perbandingan Kinerja
4. Analisis Realisasi Anggaran
5. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
6. Survei Evaluasi Manfaat pada Masyarakat
7. Analisis Pemanfaatan Informasi dalam Pelaporan Kinerja
8. Faktor Pendukung Keberhasilan dan Penyebab Kegagalan

BAB IV PENUTUP

Memuat uraian upaya-upaya yang akan dilakukan selama tahun anggaran untuk mencapai target tahunan yang terdiri atas:

1. Kesimpulan
2. Rekomendasi dan Tindak Lanjut



PERENCANAAN KINERJA



BAB 2

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) telah Menyusun Rencana Strategis Kementerian PKP 2025-2029 sebagai dokumen perencanaan jangka menengah Kementerian PKP untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman ini disusun mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029. Berdasarkan hal tersebut, dalam rangka penjabaran Rencana Strategis Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman maka disusun Rencana Strategis Unit Organisasi dan Unit Kerja di lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang berada dibawah Unit Kerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III turut melakukan penyusunan Dokumen Perencanaan atau Rencana Strategis 2025-2029 sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Unit Organisasi dan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III.

1. Visi Misi

Dalam rangka mewujudkan visi Presiden **“Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”** dan mendukung Delapan Asta Cita Presiden Republik Indonesia dan amanat RPJMN Tahun 2025-2029, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman turut mendukung Asta Cita Nomor 6 yaitu **“Membangun Dari Desa dan Dari Bawah Untuk Pemerataan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan”** yang kemudian diselaraskan menjadi misi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman periode 2025-2029. Dalam rangka mendukung misi tersebut, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menetapkan 2 (dua) tujuan strategis yang menjadi landasan pelaksanaan kebijakan dan program Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang nantinya akan diturunkan menjadi tujuan dari Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau.

2. Tujuan

Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau sebagai pelaksana penyelenggaraan perumahan dan peningkatan kawasan permukiman yang berada dalam satu organisasi dengan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III selaku Unit Pelaksana Teknis (UPT), memiliki tujuan secara umum:

- Peningkatan akses hunian layak, terjangkau, berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan; penanganan permukiman kumuh yang terpadu; serta tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas secara kolaboratif;
- Peningkatan kualitas tata kelola dan pengawasan intern Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Oleh karena Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau dibentuk dalam rangka mendukung Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III, maka penjabaran tugas dan fungsi Satuan Kerja mengacu pada tugas dan fungsi Balai P3KP selaku Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang tercantum dalam Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

3. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

Sasaran Strategis Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman sejalan dengan Sasaran Strategis Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman khususnya di Provinsi Riau. Adapun Sasaran Strategis Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yaitu :

- Meningkatnya Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Efisien, Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan;
- Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Pengawasan Intern Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Mengacu pada Sasaran Strategis diatas, maka Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau memiliki 8 (delapan) Sasaran Kegiatan yang akan dijabarkan Indikator Kinerja pada masing-masing Sasaran Kegiatan yaitu:

1. Sasaran Kegiatan (SK) Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dengan Indikator Kinerja Tingkat Layanan Dukungan Manajemen sebanyak 1 layanan;
2. Sasaran Kegiatan (SK) Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni di Kawasan Permukiman dengan Indikator Kinerja Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Peningkatan Kualitas Rumah dan Penanganan Kumuh sebanyak 1 laporan;
3. Sasaran Kegiatan (SK) Meningkatnya Luasan Permukiman Kumuh yang Ditangani Secara Terpadu dengan Indikator Kinerja Luas Permukiman Kumuh yang Ditangani Secara Terpadu seluas 35,58 hektar;
4. Sasaran Kegiatan (SK) Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan perdesaan dengan Indikator Kinerja Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan sebanyak 1 laporan;
5. Sasaran Kegiatan (SK) Meningkatnya penyediaan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas pembangunan perumahan di wilayah perdesaan dengan Indikator Kinerja Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan sebanyak 1 laporan dan Jumlah Rumah Swadaya Perumahan Perdesaan sebanyak 376 unit;
6. Sasaran Kegiatan (SK) Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi dalam Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan dengan Indikator Kinerja Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan sebanyak 1 laporan;

-
7. Sasaran Kegiatan (SK) Meningkatnya Ketersediaan Rumah Baru Layak Huni di Perkotaan dengan Indikator Kinerja Jumlah Rumah Susun Hunian ASN/TNI/POLRI Perumahan Perkotaan sebanyak 44 unit;
 8. Sasaran Kegiatan (SK) Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni melalui Peningkatan Kualitas Pembangunan Perumahan di Wilayah Perkotaan dengan Indikator Kinerja Jumlah Rumah Swadaya Perkotaan sebanyak 57 unit.

4. Arah Kebijakan dan Strategi

Mengacu pada arah kebijakan dan strategi unit organisasi dan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III selaku unit kerja, arah kebijakan dan strategi Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur untuk tahun 2025-2029 yaitu **"Menjamin peningkatan akses perumahan yang layak dan terjangkau melalui pembangunan baru, peningkatan kualitas dan fasilitasi pembiayaan perumahan"**.

Untuk mendukung pencapaian arah kebijakan tersebut, Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau dengan mengacu pada arah kebijakan dan strategi BP3KP Sumatera III menetapkan 3 (tiga) strategi utama sebagai berikut:

- Penguatan layanan peningkatan akses perumahan yang layak dan terjangkau dengan fokus implementasi pada fasilitasi dan pendampingan teknis pelaksanaan program rumah swadaya (BSPS) melalui peningkatan kualitas dan/atau pembangunan baru, dukungan penyediaan rumah susun dan rumah khusus, termasuk rumah khusus pascabencana di wilayah rawan bencana, penguatan sinergi pusat-daerah dalam penajaman lokasi dan sasaran penerima manfaat berbasis data perumahan dan kawasan permukiman.
- Penguatan layanan penanganan permukiman kumuh yang terpadu secara kolaboratif dengan fokus implementasi pada fasilitasi penanganan kawasan kumuh secara terpadu melalui integrasi peningkatan kualitas hunian, penyediaan PSU, dan peningkatan akses sanitasi, penguatan kolaborasi lintas sektor dan lintas kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya, pendampingan teknis perencanaan kawasan yang adaptif terhadap keterbatasan lahan dan kondisi geografis wilayah.
- Penguatan kualitas tata kelola dan pengawasan intern Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Perumahan Provinsi Riau dengan fokus implementasi pada peningkatan kualitas perencanaan kinerja, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi program perumahan dan kawasan permukiman, penguatan sistem pengawasan intern dalam rangka mitigasi risiko pelaksanaan kegiatan, penguatan fungsi kehumasan dan pelaporan kinerja untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas publik.

B. PERJANJIAN KINERJA DAN KRONOLOGI PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA

1. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang memuat kesepakatan target kinerja antara Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau dengan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III. Salah satu tujuan dokumen Perjanjian Kinerja disusun adalah sebagai tolak ukur kinerja dan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran unit kerja. Selama pelaksanaan tahun anggaran 2025, Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau bertanggung jawab langsung kepada Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III dan mengampu kegiatan dan anggaran dari 4 (empat) Unit Kerja Eselon I yaitu Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan, dan Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan. Berdasarkan hal tersebut, pada pelaksanaan anggaran tahun 2025, Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman menyusun 4 (empat) dokumen Perjanjian Kinerja pada masing-masing unit organisasi yang terdiri dari Dokumen Perjanjian Kinerja Awal, Perjanjian Kinerja Revisi, dan Perjanjian Kinerja Akhir.

2. Perjanjian Kinerja Awal

Berikut ini merupakan target kinerja awal yang telah disepakati oleh Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau dengan Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III mengacu pada DIPA petikan bulan Agusutus 2025.

- Sekretariat Jenderal

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target PK Awal
1	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen	1	Tingkat Layanan Dukungan Manajemen	1 Layanan

- Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target PK Awal
1	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni di Kawasan Permukiman	1	Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Peningkatan Kualitas Rumah dan Penanganan Kumuh	1 Laporan
2	Meningkatnya Luasan Permukiman Kumuh yang Ditangani Secara Terpadu	1	Luas permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu	35,58 Hektar

- Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target PK Awal
1	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan perdesaan	1	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1 Laporan
2	Meningkatnya penyediaan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas pembangunan perumahan di wilayah perdesaan	1	Jumlah Rumah Swadaya Perumahan Perdesaan	383 Unit

- Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target PK Awal
1	Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi dalam Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1 Laporan
2	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Baru Layak Huni di Perkotaan	1	Jumlah Rumah Susun Hunian ASN/TNI/POLRI Perumahan Perkotaan	44 Unit
3	Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni melalui Peningkatan Kualitas Pembangunan Perumahan di Wilayah Perkotaan	1	Jumlah Rumah Swadaya Perkotaan	53 Unit

Pada PK Awal, pelaksanaan kegiatan Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau didukung dengan pagu anggaran sebesar **Rp.41.673.290.000,00** dengan rincian target disesuaikan dengan penetapan target kinerja yang tercantum dalam DIPA petikan awal Sekretaris Jenderal dan Direktorat Jenderal berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Induk TA 2025 Bulan Agustus 2025. Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau telah melakukan 1 (satu) kali perubahan pada dokumen Perjanjian Kinerja. Revisi PK dilakukan untuk menanggapi adanya penetapan target nilai indikator kinerja yang baru pada pekerjaan pembangunan perumahan di Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau.

3. Perjanjian Kinerja Akhir

Berikut ini merupakan target kinerja akhir yang telah disepakati oleh Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau dengan Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III mengacu pada revisi terakhir DIPA 2025.

- Sekretariat Jenderal

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target PK Akhir
1	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen	1	Tingkat Layanan Dukungan Manajemen	1 Layanan

- Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target PK Awal
1	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni di Kawasan Permukiman	1	Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Peningkatan Kualitas Rumah dan Penanganan Kumuh	1 Laporan
2	Meningkatnya Luasan Permukiman Kumuh yang Ditangani Secara Terpadu	1	Luas permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu	35,58 Hektar

- Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target PK Awal
1	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan perdesaan	1	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1 Laporan
2	Meningkatnya penyediaan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas pembangunan perumahan di wilayah perdesaan	1	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan	1 Laporan
		2	Jumlah Rumah Swadaya Perumahan Perdesaan	376 Unit

- Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target PK Awal
1	Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi dalam Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1 Laporan
2	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Baru Layak Huni di Perkotaan	1	Jumlah Rumah Susun Hunian ASN/TNI/POLRI Perumahan Perkotaan	44 Unit
3	Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni melalui Peningkatan Kualitas Pembangunan Perumahan di Wilayah Perkotaan	1	Jumlah Rumah Swadaya Perkotaan	57 Unit

4. Kronologi Perubahan Perjanjian Kinerja

Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau melakukan revisi 4 (empat) Perjanjian Kinerja sebanyak 1 (satu) kali perubahan yang didasarkan pada penyesuaian anggaran DIPA Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau TA 2025 di bawah anggaran Direktorat Jenderal dan Sekretariat Jenderal. Adapun tabel perubahan Perjanjian Kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

- Sekretariat Jenderal

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target PK Awal	Target PK Akhir
1	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen	1	Tingkat Layanan Dukungan Manajemen	1 Layanan	1 Layanan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Awal	Pagu Akhir
1	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen	1	Tingkat Layanan Dukungan Manajemen	Rp567.434.000	Rp703.514.000

Pada Perjanjian Kinerja Awal DIPA Sekretariat Jenderal, Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau mendapatkan alokasi dana **Rp567.434.000** dan pada bulan November terjadi perubahan pagu anggaran menjadi **Rp703.514.000**.

- Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target PK Awal	Target PK Akhir
1	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni di Kawasan Permukiman	1 Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Peningkatan Kualitas Rumah dan Penanganan Kumuh	1 Laporan	1 Laporan
2	Meningkatnya Luasan Permukiman Kumuh yang Ditangani Secara Terpadu	1 Luas permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu	35,58 Hektar	35,58 Hektar

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Pagu Awal	Pagu Akhir
1	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni di Kawasan Permukiman	1 Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Peningkatan Kualitas Rumah dan Penanganan Kumuh	Rp85.306.000	Rp85.306.000
2	Meningkatnya Luasan Permukiman Kumuh yang Ditangani Secara Terpadu	1 Luas permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu	Rp11.161.460.000	Rp8.814.128.000
Total			Rp11.246.766.000	Rp8.899.434.000

Pada Perjanjian Kinerja Awal DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman, Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau mendapatkan alokasi dana **Rp11.246.766.000** dan pada bulan Oktober terjadi perubahan pagu anggaran menjadi **Rp8.899.434.000**.

- Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target PK Awal	Target PK Akhir
1	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan perdesaan	1	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1 Laporan	1 Laporan
2	Meningkatnya penyediaan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas pembangunan perumahan di wilayah perdesaan	1	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan	-	1 Laporan
		2	Jumlah Rumah Swadaya Perumahan Perdesaan	383 Unit	376 Unit

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Awal	Pagu Akhir
1	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan perdesaan	1	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	Rp111.919.000	Rp111.919.000
2	Meningkatnya penyediaan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas pembangunan perumahan di wilayah perdesaan	1	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan	-	Rp128.808.000
		2	Jumlah Rumah Swadaya Perumahan Perdesaan	Rp8.462.127.000	Rp8.294.794.000
Total				Rp8.574.046.000	Rp8.535.521.000

Pada Perjanjian Kinerja Awal DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan, Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau mendapatkan alokasi dana **Rp8.574.046.000** dan pada bulan Oktober terjadi perubahan pagu anggaran menjadi **Rp8.535.521.000**. Selain itu terdapat perubahan target output Jumlah Rumah Swadaya Perumahan Perdesaan dari **383** unit menjadi **376** unit.

- Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Pagu Awal	Pagu Akhir
1	Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi dalam Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1 Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	Rp511.499.000	Rp511.499.000
2	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Baru Layak Huni di Perkotaan	1 Jumlah Rumah Susun Hunian ASN/TNI/POLRI Perumahan Perkotaan	Rp19.464.580.000	Rp19.464.580.000
3	Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni melalui Peningkatan Kualitas Pembangunan Perumahan di Wilayah Perkotaan	1 Jumlah Rumah Swadaya Perkotaan	Rp1.308.965.000	Rp1.389.785.000
Total			Rp21.285.044.000	Rp21.365.864.000

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Pagu Awal	Pagu Akhir
1	Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi dalam Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1 Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	Rp511.499.000	Rp511.499.000
2	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Baru Layak Huni di Perkotaan	1 Jumlah Rumah Susun Hunian ASN/TNI/POLRI Perumahan Perkotaan	Rp19.464.580.000	Rp19.464.580.000
3	Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni melalui Peningkatan Kualitas Pembangunan Perumahan di Wilayah Perkotaan	1 Jumlah Rumah Swadaya Perkotaan	Rp1.308.965.000	Rp1.389.785.000
Total			Rp21.285.044.000	Rp21.365.864.000

Pada Perjanjian Kinerja Awal DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan, Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau mendapatkan alokasi dana **Rp21.285.044.000** dan pada bulan Oktober terjadi perubahan pagu anggaran menjadi **Rp21.365.864.000**. Selain itu terdapat perubahan target output Jumlah Rumah Swadaya Perkotaan dari **53** unit menjadi **57** unit.

C. METODE PENGUKURAN KINERJA

Metode pengukuran kinerja pada Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau dilaksanakan dengan mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III, Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau Tahun 2025-2029, Rencana Aksi Tahun 2025, serta Perjanjian Kinerja antara Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau dengan Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III Tahun 2025. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan dan Perjanjian Kinerja dengan realisasi capaian kinerja pada tahun 2025. Hasil pengukuran tersebut digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan.

Adapun rumusan dalam melakukan pengukuran dapat disederhanakan menjadi sebagai berikut:

$$\% \text{ Pencapaian Target} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

D. DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA)

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) merupakan dokumen pelaksanaan anggaran yang menjadi dasar hukum bagi satuan kerja dalam melaksanakan program dan kegiatan yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). DIPA memuat alokasi anggaran, program, kegiatan, serta target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun anggaran.

Pada Tahun Anggaran 2025, Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau memperoleh alokasi anggaran yang bersumber dari beberapa unit organisasi di lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yaitu Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan dan Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan. Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung pelaksanaan program pembangunan perumahan dan kawasan permukiman serta kegiatan dukungan manajemen satuan kerja.

Perubahan pagu anggaran pada masing-masing DIPAdijabarkan pada tabel dibawah ini:

1. DIPA Sekretariat Jenderal (691385)

DIPA Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau mengalami **revisi DIPA** sebanyak **4 kali** dengan pagu awal sebesar **Rp70.832.000,00** dan menjadi pagu akhir sebesar **Rp703.514.000,00**. Rincian timeline perubahan DIPA dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

No	DIPA	Pagu Anggaran	Keterangan
1	DIPA Awal 2 Desember 2024	Rp70.832.000,00	Rincian Output: • Layanan Perkantoran : 1 Layanan Rp70.832.000,00
2	DIPA Revisi ke 01 11 Juni 2025	Rp567.434.000,00	Rincian Output: • Layanan Perkantoran : 1 Layanan Rp567.434.000,00 (output tetap, pagu berubah)
3	DIPA Revisi ke 02 29 Agustus 2025	Rp567.434.000,00	Rincian Output: • Layanan Perkantoran : 1 Layanan Rp567.434.000,00 (output tetap, pagu tetap)
4	DIPA Revisi ke 03 13 November 2025	Rp703.514.000,00	Rincian Output: • Layanan Perkantoran : 1 Layanan Rp703.514.000,00 (output tetap, pagu berubah)
5	DIPA Revisi ke 04 1 Desember 2025	Rp703.514.000,00	Rincian Output: • Layanan Perkantoran : 1 Layanan Rp703.514.000,00 (output tetap, pagu tetap)

2. DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman (691439)

DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau mengalami **revisi DIPA** sebanyak **7 kali** dengan pagu awal sebesar **Rp26.744.827.000,00** dan menjadi pagu akhir sebesar **Rp8.899.434.000,00**. Rincian timeline perubahan DIPA dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

No	DIPA	Pagu Anggaran	Keterangan
1	DIPA Awal 2 Desember 2024	Rp26.744.827.000,00	Rincian Output: - Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman : 330 Unit Rp7.194.000.000,00 - Penanganan Permukiman Kumuh : 35,58 Hektar Rp19.550.827.000,00
2	DIPA Revisi ke 01 21 Mei 2025	Rp19.550.827.000,00	Rincian Output: Penanganan Permukiman Kumuh : 35,58 Hektar Rp19.550.827.000,00 (output berubah, pagu berubah)
3	DIPA Revisi ke 02 25 Juni 2025	Rp19.636.133.000,00	Rincian Output: - Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh: 1 Laporan Rp85.306.000,00 - Penanganan Permukiman Kumuh : 35,58 Hektar Rp19.550.827.000,00 (output berubah, pagu berubah)
4	DIPA Revisi ke 03 8 Juli 2025	Rp19.636.133.000,00	Rincian Output: - Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh: 1 Laporan Rp85.306.000,00 - Penanganan Permukiman Kumuh : 35,58 Hektar Rp19.550.827.000,00 (output tetap, pagu tetap)
5	DIPA Revisi ke 04 15 Agustus 2025	Rp11.246.766.000,00	Rincian Output: - Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh: 1 Laporan Rp85.306.000,00 - Penanganan Permukiman Kumuh : 35,58 Hektar Rp11.161.460.000,00 (output tetap, pagu berubah)

6	DIPA Revisi ke 05 02 Oktober 2025	Rp8.899.434.000,00	Rincian Output: • Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh: 1 Laporan Rp85.306.000,00 • Penanganan Permukiman Kumuh : 35,58 Hektar Rp8.814.128.000,00 (output tetap, pagu berubah)
7	DIPA Revisi ke 06 14 Oktober 2025	Rp8.899.434.000,00	Rincian Output: • Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh: 1 Laporan Rp85.306.000,00 • Penanganan Permukiman Kumuh : 35,58 Hektar Rp8.814.128.000,00 (output tetap, pagu tetap)
8	DIPA Revisi ke 07 10 Desember 2025	Rp8.899.434.000,00	Rincian Output: • Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh: 1 Laporan Rp85.306.000,00 • Penanganan Permukiman Kumuh : 35,58 Hektar Rp8.814.128.000,00 (output tetap, pagu tetap)

3. DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan (691493)

DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau mengalami **revisi DIPA** sebanyak **8 kali** dengan pagu awal sebesar **Rp13.555.019.000,00** dan menjadi pagu akhir sebesar **Rp8.535.521.000,00**. Rincian timeline perubahan DIPA dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

No	DIPA	Pagu Anggaran	Keterangan
1	DIPA Awal 2 Desember 2024	Rp13.555.019.000,00	Rincian Output: • Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan : 1 Laporan Rp22.409.000,00 • Rumah Swadaya Perumahan Perdesaan : 626 Unit Rp13.532.610.000,00

2	DIPA Revisi ke 01 20 Mei 2025	Rp22.409.000,00	Rincian Output: ● Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan : 1 Laporan Rp22.409.000,00 (output berubah, pagu berubah)
3	DIPA Revisi ke 02 3 Juli 2025	Rp111.919.000,00	Rincian Output: ● Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan : 1 Laporan Rp111.919.000,00 (output tetap, pagu berubah)
4	DIPA Revisi ke 03 21 Agustus 2025	Rp8.574.046.000,00	Rincian Output: ● Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan : 1 Laporan Rp111.919.000,00 ● Rumah Swadaya Perumahan Perdesaan : 383 Unit Rp8.462.127.000,00 (output berubah, pagu berubah)
5	DIPA Revisi ke 04 16 September 2025	Rp8.574.046.000,00	Rincian Output: ● Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan : 1 Laporan Rp111.919.000,00 ● Rumah Swadaya Perumahan Perdesaan : 383 Unit Rp8.462.127.000,00 (output tetap, pagu tetap)
6	DIPA Revisi ke 05 24 Oktober 2025	Rp8.535.521.000,00	Rincian Output: ● Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan : 1 Laporan Rp111.919.000,00 ● Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan : 1 Laporan Rp128.808.000,00 ● Rumah Swadaya Perumahan Perdesaan : 376 Unit Rp8.294.794.000,00 (output berubah, pagu berubah)

7	DIPA Revisi ke 06 24 November 2025	Rp8.535.521.000,00	Rincian Output: • Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan : 1 Laporan Rp111.919.000,00 • Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan : 1 Laporan Rp128.808.000,00 • Rumah Swadaya Perumahan Perdesaan : 376 Unit Rp8.294.794.000,00 (output tetap, pagu tetap)
8	DIPA Revisi ke 07 30 November 2025	Rp8.535.521.000,00	Rincian Output: • Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan : 1 Laporan Rp111.919.000,00 • Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan : 1 Laporan Rp128.808.000,00 • Rumah Swadaya Perumahan Perdesaan : 376 Unit Rp8.294.794.000,00 (output tetap, pagu tetap)
9	DIPA Revisi ke 08 11 Desember 2025	Rp8.535.521.000,00	Rincian Output: • Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan : 1 Laporan Rp111.919.000,00 • Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan : 1 Laporan Rp128.808.000,00 • Rumah Swadaya Perumahan Perdesaan : 376 Unit Rp8.294.794.000,00 (output tetap, pagu tetap)

4. DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan (691547)

DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau mengalami **revisi DIPA** sebanyak **9 kali** dengan pagu awal sebesar **Rp25.093.242.000,00** dan menjadi pagu akhir sebesar **Rp21.365.864.000,00**. Rincian timeline perubahan DIPA dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

No	DIPA	Pagu Anggaran	Keterangan
1	DIPA Awal 2 Desember 2024	Rp25.093.242.000,00	Rincian Output: - Rumah Susun Hunian ASN/TNI/POLRI Perumahan Perkotaan : 44 Unit Rp19.464.580.000,00 - Rumah Swadaya Perkotaan : 268 Unit Rp5.628.662.000,00
2	DIPA Revisi ke 01 21 Mei 2025	Rp19.484.580.000,00	Rincian Output: - Rumah Susun Hunian ASN/TNI/POLRI Perumahan Perkotaan : 44 Unit Rp19.464.580.000,00 - Rumah Swadaya Perkotaan : 1 Unit Rp20.000.000,00 (output berubah, pagu berubah)
3	DIPA Revisi ke 02 3 Juli 2025	Rp19.575.100.000	Rincian Output: - Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan : 1 Laporan Rp90.520.000,00 - Rumah Susun Hunian ASN/TNI/POLRI Perumahan Perkotaan : 44 Unit Rp19.464.580.000,00 - Rumah Swadaya Perkotaan : 1 Unit Rp20.000.000,00 (output berubah, pagu berubah)
4	DIPA Revisi ke 03 9 Juli 2025	Rp19.575.100.000	Rincian Output: - Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan : 1 Laporan Rp90.520.000,00 - Rumah Susun Hunian ASN/TNI/POLRI Perumahan Perkotaan : 44 Unit Rp19.464.580.000,00 - Rumah Swadaya Perkotaan : 1 Unit Rp20.000.000,00 (output tetap, pagu tetap)

5	DIPA Revisi ke 04 9 Agustus 2025	Rp19.996.079.000,00	Rincian Output: • Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan : 1 Laporan Rp511.499.000,00 • Rumah Susun Hunian ASN/TNI/POLRI Perumahan Perkotaan : 44 Unit Rp19.464.580.000,00 • Rumah Swadaya Perkotaan : 1 Unit Rp20.000.000,00 (output tetap, pagu berubah)
6	DIPA Revisi ke 05 25 Agustus 2025	Rp21.285.044.000,00	Rincian Output: • Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan : 1 Laporan Rp511.499.000,00 • Rumah Susun Hunian ASN/TNI/POLRI Perumahan Perkotaan : 44 Unit Rp19.464.580.000,00 • Rumah Swadaya Perkotaan : 53 Unit Rp1.308.965.000,00 (output berubah, pagu berubah)
7	DIPA Revisi ke 06 18 September 2025	Rp21.285.044.000,00	Rincian Output: • Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan : 1 Laporan Rp511.499.000,00 • Rumah Susun Hunian ASN/TNI/POLRI Perumahan Perkotaan : 44 Unit Rp19.464.580.000,00 • Rumah Swadaya Perkotaan : 53 Unit Rp1.308.965.000,00 (output tetap, pagu tetap)
8	DIPA Revisi ke 07 17 Oktober 2025	Rp21.365.864.000,00	Rincian Output: • Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan : 1 Laporan Rp511.499.000,00 • Rumah Susun Hunian ASN/TNI/POLRI Perumahan Perkotaan : 44 Unit Rp19.464.580.000,00 • Rumah Swadaya Perkotaan : 53 Unit Rp1.389.785.000,00 (output berubah, pagu berubah)

9	DIPA Revisi ke 08 26 November 2025	Rp21.365.864.000,00	Rincian Output: • Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan : 1 Laporan Rp511.499.000,00 • Rumah Susun Hunian ASN/TNI/POLRI Perumahan Perkotaan : 44 Unit Rp19.464.580.000,00 • Rumah Swadaya Perkotaan : 53 Unit Rp1.389.785.000,00 (output tetap, pagu tetap)
10	DIPA Revisi ke 09 10 Desember 2025	Rp21.365.864.000,00	Rincian Output: • Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan : 1 Laporan Rp511.499.000,00 • Rumah Susun Hunian ASN/TNI/POLRI Perumahan Perkotaan : 44 Unit Rp19.464.580.000,00 - Rumah Swadaya Perkotaan : 53 Unit Rp1.389.785.000,00 (output tetap, pagu tetap)



AKUNTABILITAS KINERJA



BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

A. UPAYA PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Upaya peningkatan akuntabilitas kinerja dilakukan melalui penguatan beberapa komponen utama dalam sistem manajemen kinerja organisasi, yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, serta evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

Namun demikian, pada Tahun Anggaran 2025 tidak dilakukan evaluasi AKIP secara formal terhadap Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau. Meskipun demikian, upaya peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja tetap dilaksanakan melalui penguatan proses perencanaan, pengendalian, dan pelaporan kinerja secara internal.

Adapun upaya peningkatan akuntabilitas kinerja yang dilakukan meliputi:

1. Perencanaan Kinerja

Perencanaan kinerja merupakan tahapan awal dalam siklus manajemen kinerja yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan memiliki arah yang jelas, terukur, dan selaras dengan tujuan pembangunan.

Pada Tahun Anggaran 2025, perencanaan kinerja Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau disusun dengan mengacu pada dokumen perencanaan yang berlaku, antara lain:

- Rencana Strategis Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025–2029;
- Rencana Strategis Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III;
- Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau;
- Perjanjian Kinerja Tahun 2025;
- Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2025.

Perencanaan kinerja tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, target capaian, serta program dan kegiatan yang dilaksanakan selama tahun anggaran berjalan.

2. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan untuk mengetahui tingkat pencapaian target yang telah ditetapkan dalam perencanaan kinerja. Proses pengukuran kinerja dilakukan secara berkala melalui pemantauan terhadap indikator kinerja kegiatan serta realisasi fisik dan keuangan.

Pengukuran kinerja pada Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau dilakukan dengan memanfaatkan berbagai sistem informasi pengelolaan kinerja dan keuangan pemerintah, antara lain melalui sistem pelaporan kinerja internal kementerian serta aplikasi pengelolaan anggaran dan kegiatan.

Hasil pengukuran kinerja tersebut menjadi dasar dalam melakukan analisis capaian kinerja serta identifikasi faktor pendukung maupun kendala dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

3. Pelaporan Kinerja

Pelaporan kinerja merupakan sarana untuk menyampaikan informasi mengenai capaian kinerja organisasi kepada pimpinan dan pemangku kepentingan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan.

Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau secara berkala menyusun laporan pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran yang disampaikan kepada unit organisasi terkait di lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Selain itu, pada akhir tahun anggaran disusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2025 sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kinerja selama satu tahun anggaran.

Pelaporan kinerja dilakukan secara sistematis dan terstruktur agar dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai capaian program serta tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Evaluasi akuntabilitas kinerja merupakan proses penilaian terhadap penerapan sistem manajemen kinerja dalam suatu instansi pemerintah. Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas implementasi SAKIP serta memberikan rekomendasi perbaikan dalam peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja.

Pada Tahun Anggaran 2025, evaluasi AKIP secara formal terhadap Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau tidak dilaksanakan. Namun demikian, pengendalian dan evaluasi internal tetap dilakukan melalui kegiatan monitoring pelaksanaan program, rapat koordinasi internal, serta penelaahan terhadap realisasi kinerja dan anggaran.

Hasil dari proses monitoring dan evaluasi internal tersebut menjadi bahan masukan bagi peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja pada tahun-tahun berikutnya.

Secara keseluruhan, upaya peningkatan akuntabilitas kinerja yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau merupakan bagian dari komitmen organisasi untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, efektif, dan akuntabel dalam penyelenggaraan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.

B. CAPAIAN KINERJA PERJANJIAN KINERJA

Capaian kinerja Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau Tahun Anggaran 2025 merupakan hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan (Renstra dan PK) dengan realisasi yang dicapai pada akhir tahun anggaran.

Secara umum, capaian kinerja mencerminkan tingkat keberhasilan satuan kerja dalam melaksanakan program pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, baik dari aspek fisik (output) maupun keuangan, serta kontribusinya terhadap pencapaian sasaran strategis kementerian dan prioritas pembangunan nasional.

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Capaian		Capaian (%)
Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal							
1	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal	Tingkat Layanan Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal	1	Layanan	1	Layanan	100
Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman							
2	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni di Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Peningkatan Kualitas Rumah dan Penanganan Kumuh	1	Laporan	1	Laporan	100
3	Meningkatnya Luasan Permukiman Kumuh yang Ditangani Secara Terpadu	Luas permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu	35,58	Hektar	35,58	Hektar	100
Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan							
4	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan perdesaan	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1	Laporan	1	Laporan	100
5	Meningkatnya penyediaan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan	1	Laporan	1	Laporan	100
6	pembangunan perumahan di wilayah perdesaan	Jumlah Rumah Swadaya Perumahan Perdesaan	376	Unit	376	Unit	100

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Capaian		Capaian (%)
Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan							
7	Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi dalam Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1	Laporan	1	Laporan	100
8	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Baru Layak Huni di Perkotaan	Jumlah Rumah Susun Hunian ASN/TNI/POLRI Perumahan Perkotaan	44	Unit	44	Unit	100
9	Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni melalui Peningkatan Kualitas Pembangunan Perumahan di Wilayah Perkotaan	Jumlah Rumah Swadaya Perkotaan	57	Unit	57	Unit	100

C. ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA

Analisis perbandingan kinerja dilakukan untuk menilai perkembangan capaian kinerja Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau dari tahun ke tahun, serta untuk mengetahui sejauh mana capaian tersebut selaras dengan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025–2029.

Analisis ini penting sebagai dasar evaluasi dalam peningkatan kinerja organisasi, sekaligus sebagai bahan perbaikan dalam perencanaan dan pelaksanaan program pada periode berikutnya.



Indikator Kegiatan	Satuan	2022			2023			2024			2025		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Jumlah Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	Unit	2120	3905		3170	3062		3660	3250		433	433	100
Jumlah Rumah Susun yang dibangun	Unit	207	55		257	141		218	1		44	44	100
Jumlah Rumah Susun yang dipelihara	Tower	9	5		9	5		8	3				
Jumlah Rumah Khusus yang dibangun	Unit	40	1		40			40					
Jumlah Rumah umum yang mendapat fasilitas layanan bantuan PSU	Unit	1375	220		1750	450		2221	119				
Jumlah layanan perkantoran	Layanan	1	1		1	1		1	1		1	1	100
Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Peningkatan Kualitas Rumah dan Penanganan Kumuh	Laporan										1	1	100
Luas permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu	Hektar										35,58	35,58	100
Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	Laporan										1	1	100
Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan	Laporan										1	1	100
Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	Laporan										1	1	100

Secara umum, capaian kinerja Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau Tahun Anggaran 2025 menunjukkan tren yang stabil dan meningkat dibandingkan dengan capaian Tahun Anggaran sebelumnya.

Peningkatan capaian kinerja tersebut dapat dilihat dari beberapa aspek utama, antara lain:

1. Peningkatan Realisasi Output Kegiatan

Capaian output kegiatan seperti peningkatan kualitas rumah swadaya (BSPS), pembangunan rumah khusus, serta pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi menunjukkan hasil yang lebih optimal dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini didukung oleh perencanaan kegiatan yang lebih matang serta peningkatan koordinasi dengan pemerintah daerah.

2. Peningkatan Kualitas Pengendalian Program

Capaian output kegiatan seperti peningkatan kualitas rumah swadaya (BSPS), pembangunan rumah khusus, serta pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi menunjukkan hasil yang lebih optimal dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini didukung oleh perencanaan kegiatan yang lebih matang serta peningkatan koordinasi dengan pemerintah daerah.

3. Peningkatan Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran pada Tahun 2025 menunjukkan tingkat serapan yang lebih baik dibandingkan Tahun 2024, yang mencerminkan peningkatan efektivitas pelaksanaan kegiatan serta perbaikan dalam proses perencanaan dan penganggaran.

4. Perbaikan Tata Kelola dan Pelaporan Kinerja

Kualitas pelaporan kinerja dan pengelolaan administrasi mengalami peningkatan, seiring dengan penguatan penerapan SAKIP dan pemanfaatan sistem informasi dalam pelaporan.



D. ANALISIS REALISASI ANGGARAN

1. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Analisis realisasi anggaran merupakan bagian penting dalam evaluasi kinerja, yang bertujuan untuk menilai tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam mendukung pencapaian target kinerja. Analisis ini dilakukan dengan membandingkan antara alokasi anggaran (pagu) dengan realisasi belanja, serta mengkaitkannya dengan capaian fisik (output) kegiatan.

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Keuangan		Progress	
			DIPA (Rp Ribu)	Realisasi (Rp Ribu)	Keu (%)	Fisik (%)
Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal						
1	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal	Tingkat Layanan Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal	703.514	671.616,25	95,47	100
Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman						
2	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni di Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Peningkatan Kualitas Rumah dan Penanganan Kumuh	85.306	72.796,43	85,34	100
3	Meningkatnya Luasan Permukiman Kumuh yang Ditangani Secara Terpadu	Luas permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu	8.814.128	8.587.925,65	97,43	100
Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan						
4	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan perdesaan	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	111.919	111.435	99,57	100
5	Meningkatnya penyediaan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas pembangunan perumahan di wilayah perdesaan	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan	128.808	122.836,94	95,36	100
6		Jumlah Rumah Swadaya Perumahan Perdesaan	8.294.794	8.292.686	99,97	100
Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan						
7	Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi dalam Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	511.499	504.929,95	98,72	100
8	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Baru Layak Huni di Perkotaan	Jumlah Rumah Susun Hunian ASN/TNI/POLRI Perumahan Perkotaan	19.464.580	19.402.706,78	99,68	100
9	Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni melalui Peningkatan Kualitas Pembangunan Perumahan di Wilayah Perkotaan	Jumlah Rumah Swadaya Perkotaan	1.389.785	1.388.151	99,88	100

2. Analisis Perbandingan Anggaran dan Belanja

Pada Tahun Anggaran 2025, Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau memperoleh alokasi anggaran melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang digunakan untuk membiayai program penyediaan perumahan, peningkatan kualitas permukiman, serta dukungan manajemen.

Secara umum, realisasi anggaran menunjukkan tingkat serapan yang tinggi dan optimal, yang mencerminkan kemampuan satuan kerja dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Perbandingan antara pagu dan realisasi anggaran dapat digambarkan sebagai berikut:

- Pagu Anggaran: **100%** (sesuai DIPA Tahun 2025)
- Realisasi Anggaran: **±85-99%**

Tingkat realisasi tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar anggaran yang dialokasikan telah dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan.

3. Hubungan antara Realisasi Keuangan dan Capaian Fisik

Hubungan antara realisasi keuangan dan capaian fisik merupakan indikator penting dalam menilai kinerja pelaksanaan program. Idealnya, peningkatan realisasi anggaran diikuti oleh peningkatan capaian fisik kegiatan.

Pada Tahun Anggaran 2025, hubungan antara capaian fisik dan keuangan menunjukkan kondisi yang selaras dan proporsional, dengan karakteristik sebagai berikut:

- Capaian fisik kegiatan mencapai 100%, yang menunjukkan bahwa seluruh target output kegiatan telah dilaksanakan sesuai rencana.
- Realisasi keuangan mendekati 100%, yang menunjukkan bahwa anggaran telah terserap secara optimal dalam mendukung pencapaian output tersebut.
- Tidak terdapat deviasi signifikan antara capaian fisik dan keuangan, yang menandakan bahwa pelaksanaan kegiatan berjalan efektif dan sesuai dengan jadwal yang direncanakan.
- Efisiensi penggunaan anggaran, dimana capaian fisik dapat direalisasikan secara maksimal tanpa harus menghabiskan seluruh pagu anggaran secara penuh.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program tidak hanya berorientasi pada penyerapan anggaran, tetapi juga pada pencapaian hasil (output) yang optimal.

4. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran

Efisiensi penggunaan anggaran dapat dilihat dari kemampuan satuan kerja dalam mencapai target kinerja dengan penggunaan sumber daya yang optimal.

Pada Tahun Anggaran 2025, efisiensi anggaran tercermin dari :

- Tingginya capaian fisik dengan realisasi anggaran yang tidak melebihi pagu;
- Optimalisasi pelaksanaan kegiatan melalui perencanaan yang matang;
- Pengendalian pelaksanaan kegiatan yang efektif;
- Pemanfaatan sumber daya secara tepat guna.

Efisiensi ini menunjukkan bahwa setiap rupiah anggaran yang digunakan memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian output kegiatan.

5. Kesimpulan Analisis Anggaran

Secara keseluruhan, pengelolaan anggaran Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau Tahun Anggaran 2025 dapat dikategorikan sangat baik, dengan karakteristik:

- Realisasi anggaran tinggi dan mendekati pagu;
- Capaian fisik optimal;
- Hubungan antara capaian fisik dan keuangan selaras;
- Penggunaan anggaran efisien dan akuntabel.

Dengan capaian tersebut, pelaksanaan anggaran telah mampu mendukung secara efektif pencapaian target kinerja serta memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di Provinsi Riau.

E. EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Efisiensi penggunaan sumber daya merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kinerja organisasi, khususnya dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia untuk menghasilkan keluaran (output) yang maksimal. Sumber daya yang dimaksud meliputi sumber daya keuangan (anggaran), sumber daya manusia (SDM), serta sarana dan prasarana pendukung.

Pada Tahun Anggaran 2025, Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau telah berupaya untuk mengelola dan memanfaatkan seluruh sumber daya secara optimal guna mendukung pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

1. Efisiensi Penggunaan Anggaran

Efisiensi penggunaan anggaran tercermin dari kemampuan satuan kerja dalam merealisasikan target kinerja dengan tingkat serapan anggaran yang optimal dan terkendali.

Pada Tahun Anggaran 2025 :

- Realisasi anggaran mencapai tingkat yang tinggi (mendekati pagu);
- Capaian fisik kegiatan mencapai target secara optimal;
- Terdapat sisa anggaran yang relatif kecil akibat efisiensi pelaksanaan kegiatan.

Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan anggaran telah dilakukan secara efisien, dimana capaian output dapat direalisasikan secara maksimal tanpa pemborosan anggaran.

Efisiensi juga tercapai melalui:

- Pengadaan barang dan jasa yang kompetitif;
- Perencanaan biaya yang realistis;
- Pengendalian pelaksanaan kegiatan secara berkelanjutan.

2. Efisiensi Pemanfaatan Anggaran

Sumber daya manusia merupakan faktor utama dalam keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan. Efisiensi dalam pemanfaatan SDM ditunjukkan melalui:

- Optimalisasi pembagian tugas dan fungsi

Penempatan personel disesuaikan dengan kompetensi dan kebutuhan kegiatan, sehingga pelaksanaan tugas dapat berjalan efektif.

- Peningkatan koordinasi internal

Koordinasi antar Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), pejabat perbendaharaan, serta tenaga pendukung dilakukan secara intensif untuk memastikan kelancaran pelaksanaan kegiatan.

- Peningkatan kapasitas SDM

SDM didorong untuk meningkatkan pemahaman terhadap pengelolaan keuangan, pelaksanaan kegiatan, serta pelaporan kinerja melalui pembinaan dan pendampingan.

- Pemanfaatan teknologi informasi

Penggunaan sistem informasi dalam pengelolaan kegiatan dan pelaporan kinerja membantu meningkatkan efisiensi kerja dan mengurangi potensi kesalahan administrasi.

Dengan keterbatasan jumlah SDM yang ada, satuan kerja tetap mampu melaksanakan seluruh program dan kegiatan secara optimal, yang menunjukkan tingkat efisiensi yang baik dalam pengelolaan sumber daya manusia.

3. Efisiensi Pemanfaatan Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang tersedia dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pelaksanaan kegiatan, antara lain melalui:

- Pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) secara efektif;
- Penggunaan fasilitas kerja secara bersama (sharing resources);
- Optimalisasi penggunaan peralatan pendukung kegiatan lapangan dan administrasi.

Efisiensi juga dilakukan dengan meminimalkan pengeluaran yang tidak diperlukan serta memastikan bahwa setiap penggunaan sarana dan prasarana memberikan nilai tambah terhadap pelaksanaan kegiatan.

4. Sinergi dan Koordinasi sebagai Faktor Efisiensi

Efisiensi penggunaan sumber daya juga didukung oleh sinergi dan koordinasi yang baik antara:

- Satuan Kerja dengan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III;
- Satuan Kerja dengan Pemerintah Daerah;
- Satuan Kerja dengan pemangku kepentingan lainnya.

Melalui koordinasi yang efektif, pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan secara terpadu, sehingga mengurangi duplikasi kegiatan, meningkatkan ketepatan sasaran, serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia.

5. Kesimpulan Efisiensi Sumber Daya

Secara keseluruhan, efisiensi penggunaan sumber daya pada Tahun Anggaran 2025 dapat dikategorikan baik, dengan indikator:

- Pemanfaatan anggaran yang optimal dan terkendali;
- Pengelolaan SDM yang efektif;
- Pemanfaatan sarana dan prasarana secara maksimal;
- Dukungan koordinasi yang kuat antar pemangku kepentingan.

Efisiensi tersebut memberikan kontribusi signifikan terhadap keberhasilan pencapaian target kinerja, serta menjadi dasar dalam peningkatan kualitas pelaksanaan program pada tahun-tahun mendatang.

F. ANALISIS PEMANFAATAN INFORMASI DALAM PELAPORAN KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tidak hanya berfungsi sebagai dokumen pertanggungjawaban, tetapi juga sebagai sumber informasi strategis yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan, perencanaan, pengendalian, serta evaluasi kinerja organisasi. Oleh karena itu, pemanfaatan informasi dalam laporan kinerja menjadi bagian penting dalam mendukung peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan.

Pada Tahun Anggaran 2025, informasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau telah dimanfaatkan oleh berbagai entitas di lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, sesuai dengan peran dan kewenangan masing-masing.

1. Pemanfaatan Informasi oleh Satuan Kerja

Di tingkat satuan kerja, informasi dalam laporan kinerja dimanfaatkan sebagai:

- Bahan Evaluasi Internal

Informasi capaian kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi selama tahun anggaran berjalan.

- Dasar Perbaikan Perencanaan

Hasil analisis kinerja menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran pada tahun berikutnya, sehingga perencanaan menjadi lebih realistis dan berbasis data.

- Alat Pengendalian Kinerja

Informasi kinerja digunakan untuk memantau progres pelaksanaan kegiatan secara berkala dan memastikan kesesuaian dengan target yang telah ditetapkan.

- Peningkatan Akuntabilitas Organisasi

Laporan kinerja menjadi sarana untuk meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban kepada pimpinan dan pemangku kepentingan.

2. Pemanfaatan Informasi oleh Balai Pelaksana

Pada tingkat Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman, informasi dalam laporan kinerja satuan kerja dimanfaatkan untuk :

- Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di wilayah kerja

Data capaian kinerja menjadi dasar dalam menilai kinerja satuan kerja di daerah.

-
- Pengendalian program dan kegiatan

Informasi realisasi fisik dan keuangan digunakan untuk memastikan bahwa pelaksanaan program berjalan sesuai dengan rencana.

- Penyusunan laporan kinerja tingkat balai

Laporan dari satuan kerja menjadi input utama dalam penyusunan laporan kinerja tingkat Balai Pelaksana.

- Pengambilan keputusan strategis

Informasi kinerja digunakan sebagai dasar dalam menetapkan kebijakan operasional dan langkah perbaikan.

3. Pemanfaatan Informasi oleh Direktorat Jenderal

Pada tingkat Direktorat Jenderal di lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, informasi laporan kinerja dimanfaatkan untuk :

- Evaluasi capaian program nasional

Data dari satuan kerja menjadi bagian dari agregasi capaian kinerja nasional di sektor perumahan dan kawasan permukiman.

- Perumusan kebijakan dan strategi

Informasi mengenai keberhasilan dan kendala pelaksanaan program digunakan sebagai bahan dalam penyusunan kebijakan dan strategi pembangunan.

- Perencanaan program dan penganggaran

Capaian kinerja menjadi dasar dalam menentukan prioritas program serta alokasi anggaran pada tahun berikutnya.

- Pelaporan kepada pimpinan kementerian dan lembaga pengawas

Informasi kinerja digunakan dalam penyusunan laporan kepada Menteri, serta sebagai bahan evaluasi oleh instansi pengawas.

4. Pemanfaatan Informasi oleh Unit Pengawasan Internal

Unit pengawasan internal memanfaatkan informasi dalam laporan kinerja sebagai:

- Bahan revidi dan pengawasan kinerja. Data capaian kinerja digunakan untuk menilai kepatuhan terhadap peraturan dan efektivitas pelaksanaan program.
- Identifikasi risiko dan potensi permasalahan. Informasi dalam laporan kinerja membantu dalam mengidentifikasi area yang memiliki risiko tinggi dan memerlukan perhatian lebih lanjut.
- Pemberian rekomendasi perbaikan. Hasil analisis digunakan untuk memberikan rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas tata kelola dan akuntabilitas kinerja.

5. Pemanfaatan Informasi untuk Stakeholder Eksternal

Selain dimanfaatkan oleh entitas internal kementerian, informasi dalam laporan kinerja juga memberikan manfaat bagi pemangku kepentingan eksternal, antara lain:

- Pemerintah daerah, sebagai bahan koordinasi dan sinkronisasi program;
- Masyarakat, sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas publik;
- Lembaga pengawas dan auditor, sebagai bahan evaluasi dan penilaian kinerja

6. Analisis Pemanfaatan Informasi

Secara umum, pemanfaatan informasi dalam Laporan Kinerja Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau Tahun Anggaran 2025 telah berjalan dengan baik dan memberikan kontribusi terhadap:

- Peningkatan kualitas perencanaan berbasis kinerja;
- Penguatan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
- Peningkatan akuntabilitas dan transparansi organisasi;
- Perbaikan berkelanjutan dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Namun demikian, masih terdapat ruang perbaikan, antara lain dalam:

- Peningkatan kualitas data dan ketepatan waktu pelaporan;
- Integrasi sistem informasi antar unit organisasi;
- Pemanfaatan data secara lebih optimal dalam pengambilan keputusan.

G. FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN DAN PENYEBAB KEGAGALAN

Analisis faktor pendukung dan kendala dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai aspek yang memengaruhi pencapaian kinerja pada tingkat kegiatan. Analisis ini mencakup faktor internal (yang berasal dari dalam organisasi) dan faktor eksternal (yang berasal dari luar organisasi), serta dilengkapi dengan upaya solusi/perbaikan yang dilakukan.

1. Kegiatan Penyediaan Rumah Layak Huni (BSPS dan Rumah Susun)

Faktor Pendukung

1. Faktor Internal :

- Perencanaan kegiatan yang telah disusun secara terstruktur dan berbasis target kinerja;
- Pengendalian pelaksanaan kegiatan oleh PPK dan tim teknis yang berjalan efektif;
- Ketersediaan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan;
- Dukungan anggaran yang memadai melalui DIPA.

2. Faktor Eksternal :

- Tingginya kebutuhan masyarakat terhadap hunian layak;
- Dukungan pemerintah daerah dalam pelaksanaan program;
- Partisipasi masyarakat dalam program BSPS.

Faktor Kendala

1. Faktor Internal :

- Keterbatasan jumlah SDM teknis dalam pengawasan kegiatan di lapangan;
- Keterbatasan waktu pelaksanaan pada beberapa kegiatan;
- Variasi kemampuan pelaksana kegiatan di daerah.

2. Faktor Eksternal :

- Kondisi geografis wilayah (lahan gambut, akses sulit);
- Fluktuasi harga material bangunan;
- Faktor cuaca yang memengaruhi progres fisik.

Solusi dan Upaya Perbaikan

1. Penguatan perencanaan teknis dan penetapan lokasi kegiatan yang lebih matang;
2. Peningkatan koordinasi dengan pemerintah daerah terkait kesiapan lahan;
3. Penyesuaian metode konstruksi sesuai kondisi geografis;
4. Peningkatan pengawasan lapangan melalui penjadwalan yang lebih intensif;
5. Antisipasi perubahan harga material dalam perencanaan anggaran.

2. Kegiatan Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan

Faktor Pendukung

1. Faktor Internal :
 - Ketersediaan sistem pelaporan berbasis elektronik;
 - Adanya mekanisme monitoring dan evaluasi berkala;
 - Dukungan pimpinan dalam pelaksanaan pengendalian kinerja.
2. Faktor Eksternal :
 - Ketersediaan data dari pelaksana kegiatan;
 - Dukungan teknologi informasi dari kementerian.

Faktor Kendala

1. Faktor Internal :
 - Keterbatasan SDM dalam pengolahan dan analisis data;
 - Belum optimalnya integrasi sistem informasi.
2. Faktor Eksternal :
 - Keterlambatan penyampaian data dari lapangan;
 - Variasi kualitas data dari sumber yang berbeda.

Solusi dan Upaya Perbaikan

1. Peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan data dan pelaporan;
2. Penguatan sistem validasi dan verifikasi data;
3. Penetapan jadwal pelaporan yang lebih disiplin;
4. Optimalisasi penggunaan sistem informasi terintegrasi.

3. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Layanan Perkantoran

Faktor Pendukung

1. Faktor Internal :
 - Struktur organisasi yang mendukung pelaksanaan tugas;
 - Sistem administrasi dan keuangan yang berjalan sesuai ketentuan;
 - Komitmen pegawai dalam mendukung operasional kegiatan.
2. Faktor Eksternal :
 - Dukungan kebijakan pemerintah dalam reformasi birokrasi;
 - Ketersediaan sistem aplikasi keuangan dan administrasi.

Faktor Kendala

1. Faktor Internal :

- Keterbatasan SDM pada fungsi tertentu;
- Beban kerja yang cukup tinggi pada beberapa unit kerja.

2. Faktor Eksternal :

- Perubahan kebijakan atau regulasi yang memerlukan penyesuaian cepat;
- Ketergantungan pada sistem pusat yang terkadang mengalami kendala teknis.

Solusi dan Upaya Perbaikan

1. Peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan data dan pelaporan;
2. Penguatan sistem validasi dan verifikasi data;
3. Penetapan jadwal pelaporan yang lebih disiplin;
4. Optimalisasi penggunaan sistem informasi terintegrasi.

4. Analisis Umum

Berdasarkan analisis pada setiap kegiatan, dapat disimpulkan bahwa:

- Faktor internal yang mendukung keberhasilan kinerja meliputi perencanaan yang baik, pengendalian yang efektif, serta komitmen organisasi;
- Faktor eksternal yang mendukung antara lain dukungan pemerintah daerah dan tingginya kebutuhan masyarakat;
- Kendala utama berasal dari faktor eksternal seperti kondisi geografis, kesiapan lahan, dan dinamika lapangan;
- Kendala internal relatif dapat diatasi melalui peningkatan kapasitas SDM dan penguatan sistem manajemen kinerja.

5. Kesimpulan dan Arah Perbaikan

Secara keseluruhan, faktor pendukung lebih dominan dibandingkan faktor kendala, sehingga capaian kinerja Tahun Anggaran 2025 dapat terlaksana dengan baik.

Kedepan, arah perbaikan difokuskan pada:

- Peningkatan kualitas perencanaan berbasis data;
- Penguatan koordinasi lintas sektor;
- Peningkatan kapasitas SDM;
- Optimalisasi sistem informasi dan pengendalian kinerja.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan pelaksanaan kegiatan pada tahun mendatang dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan akuntabel.

PENUTUP



BAB 4

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau Tahun Anggaran 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di daerah.

Pada Bab I Pendahuluan, telah dijelaskan latar belakang penyusunan laporan, tugas dan fungsi satuan kerja, serta isu strategis yang menjadi dasar dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Isu-isu strategis tersebut, seperti kebutuhan hunian layak, karakteristik wilayah lahan gambut, serta tantangan tata kelola, menjadi landasan dalam penentuan arah kebijakan dan program.

Pada Bab II Perencanaan Kinerja, diuraikan bahwa perencanaan kinerja disusun secara terintegrasi dengan mengacu pada Rencana Strategis Kementerian, visi dan misi pembangunan Provinsi Riau, serta dokumen perencanaan lainnya. Perencanaan tersebut dijabarkan dalam Perjanjian Kinerja dan DIPA Tahun Anggaran 2025 sebagai dasar pelaksanaan program dan kegiatan.

Pada Bab III Akuntabilitas Kinerja, disampaikan bahwa secara umum capaian kinerja Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau Tahun Anggaran 2025 menunjukkan hasil yang baik dan optimal. Hal ini ditunjukkan oleh:

1. Tingkat capaian indikator kinerja yang sebagian besar memenuhi target;
2. Realisasi anggaran yang tinggi dan mendekati pagu;
3. Kesesuaian antara capaian fisik dan keuangan;
4. Efisiensi dalam penggunaan sumber daya;
5. Pemanfaatan informasi kinerja sebagai dasar pengambilan keputusan.

Selain itu, analisis perbandingan kinerja menunjukkan adanya tren peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya serta kesesuaian dengan target Renstra. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kendala, terutama yang bersifat eksternal seperti kesiapan lahan, kondisi geografis, dan dinamika pelaksanaan di lapangan.

Secara keseluruhan, kinerja Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau Tahun Anggaran 2025 dapat dikategorikan baik, dengan tingkat efektivitas dan efisiensi yang tinggi dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan perumahan dan kawasan permukiman

B. REKOMENDASI TINDAK LANJUT

Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja pada tahun berikutnya, diperlukan langkah-langkah strategis dan operasional sebagai tindak lanjut dari hasil evaluasi Tahun Anggaran 2025, antara lain:

1. Penguatan Perencanaan Kinerja

- Meningkatkan kualitas perencanaan berbasis data dan kebutuhan riil di lapangan;
- Memastikan kesiapan lokasi, dokumen, dan dukungan pemerintah daerah sejak tahap perencanaan;
- Menyelaraskan perencanaan pusat dan daerah secara lebih terintegrasi.

2. Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Program

- Mengoptimalkan pengendalian pelaksanaan kegiatan melalui monitoring dan evaluasi secara berkala;
- Meningkatkan koordinasi lintas sektor dan lintas level pemerintahan;
- Menyesuaikan metode pelaksanaan kegiatan dengan kondisi geografis dan sosial masyarakat.

3. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Anggaran

- Meningkatkan ketepatan perencanaan anggaran agar lebih realistis dan adaptif;
- Mempercepat proses pelaksanaan kegiatan sejak awal tahun anggaran;
- Mengoptimalkan efisiensi penggunaan anggaran tanpa mengurangi kualitas output.

4. Penguatan Sumber Daya Manusia

- Meningkatkan kompetensi SDM melalui pelatihan dan pembinaan teknis;
- Mengoptimalkan pembagian tugas dan fungsi sesuai dengan kompetensi;
- Mendorong peningkatan profesionalisme dan integritas aparatur.

5. Penguatan Sistem dan Pelaporan

- Mengoptimalkan pemanfaatan sistem informasi terintegrasi dalam pengelolaan kinerja;
- Meningkatkan kualitas dan ketepatan waktu pelaporan;
- Memanfaatkan data kinerja sebagai dasar pengambilan keputusan strategis.

6. Penguatan Sinergi dan Kolaborasi

- Memperkuat kerja sama dengan pemerintah daerah, instansi terkait, dan pemangku kepentingan;
- Mendorong partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program perumahan;
- Mengintegrasikan program pembangunan perumahan dengan program sektoral lainnya.

Dengan pelaksanaan rekomendasi dan tindak lanjut tersebut, diharapkan kinerja Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau pada tahun-tahun mendatang dapat semakin meningkat, baik dari aspek capaian output, kualitas hasil pembangunan, maupun akuntabilitas pengelolaan anggaran.

Komitmen terhadap peningkatan kinerja yang berkelanjutan menjadi kunci dalam mewujudkan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang layak, aman, terjangkau, dan berkelanjutan bagi masyarakat Provinsi Riau.



LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Suwindar Agung S**

Jabatan : Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Yenni Sofyan Mora**

Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

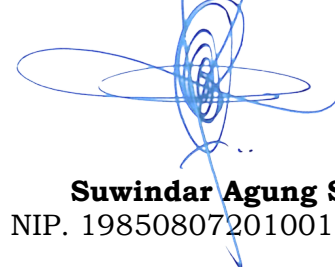
Pihak Kedua



Yenni Sofyan Mora
NIP. 198104212008122001

Pekanbaru, 30 Agustus 2025

Pihak Pertama



Suwindar Agung S
NIP. 198508072010011019

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI RIAU
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA III
SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen	1	Tingkat Layanan Dukungan Manajemen	1 Layanan

KEGIATAN

1 Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau

PAGU APBN

Rp

567.434.000,00

Pekanbaru, 30 Agustus 2025

**KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
SUMATERA III**

YENNI SOFYAN MORA

**KEPALA SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN PROVINSI RIAU**

SUWINDAR AGUNG S

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Suwindar Agung S**

Jabatan : Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Yenni Sofyan Mora**

Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

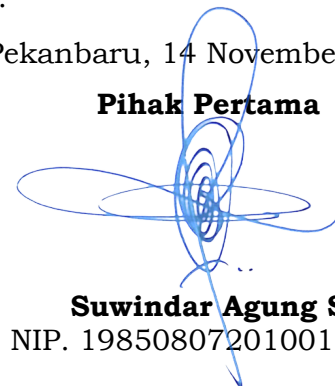
Pihak Kedua



Yenni Sofyan Mora
NIP. 198104212008122001

Pekanbaru, 14 November 2025

Pihak Pertama



Suwindar Agung S
NIP. 198508072010011019

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI RIAU
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA III
SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen	1	Tingkat Layanan Dukungan Manajemen	1 Layanan

KEGIATAN

1 Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau

PAGU APBN

Rp

703.514.000,00

Pekanbaru, 14 November 2025

**KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
SUMATERA III**

YENNI SOFYAN MORA

**KEPALA SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN PROVINSI RIAU**

SUWINDAR AGUNG S

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Suwindar Agung S**

Jabatan : Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Yenni Sofyan Mora**

Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

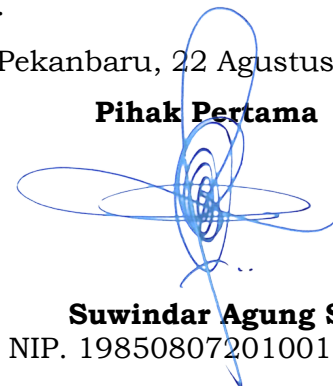
Pihak Kedua



Yenni Sofyan Mora
NIP. 198104212008122001

Pekanbaru, 22 Agustus 2025

Pihak Pertama



Suwindar Agung S
NIP. 198508072010011019

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI RIAU
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA III
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni di Kawasan Permukiman	1	Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Peningkatan Kualitas Rumah dan Penanganan Kumuh	1 Laporan
2	Meningkatnya Luasan Permukiman Kumuh yang Ditangani Secara Terpadu	2	Luas permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu	35,58 Hektar

KEGIATAN

1 Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau

PAGU APBN

Rp

11.246.766.000,00

Pekanbaru, 22 Agustus 2025

**KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
SUMATERA III**

YENNI SOFYAN MORA

**KEPALA SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN PROVINSI RIAU**

SUWINDAR AGUNG S

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Suwindar Agung S**

Jabatan : Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Yenni Sofyan Mora**

Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

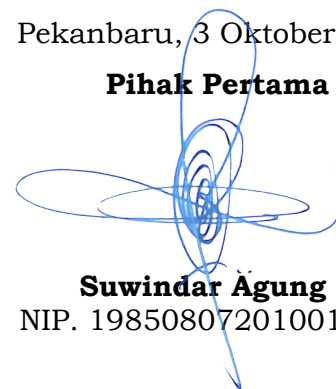
Pihak Kedua



Yenni Sofyan Mora
NIP. 198104212008122001

Pekanbaru, 3 Oktober 2025

Pihak Pertama



Suwindar Agung S
NIP. 198508072010011019

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI RIAU
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA III
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni di Kawasan Permukiman	1	Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Peningkatan Kualitas Rumah dan Penanganan Kumuh	1 Laporan
2	Meningkatnya Luasan Permukiman Kumuh yang Ditangani Secara Terpadu	2	Luas permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu	35,58 Hektar

KEGIATAN

1 Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau

PAGU APBN

Rp

8.899.434.000,00

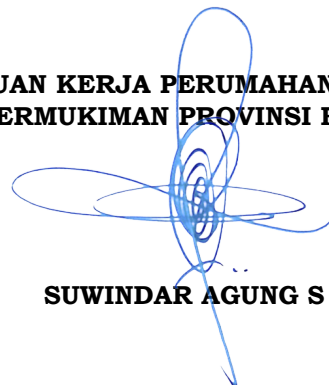
Pekanbaru, 3 Oktober 2025

**KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
SUMATERA III**



YENNI SOFYAN MORA

**KEPALA SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN PROVINSI RIAU**



SUWINDAR AGUNG S

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Suwindar Agung S**

Jabatan : Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Yenni Sofyan Mora**

Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

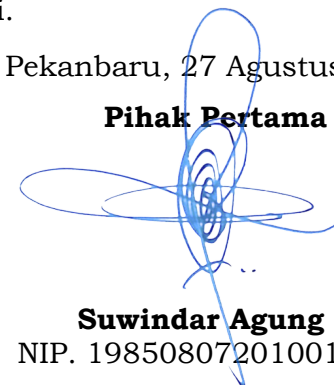
Pihak Kedua



Yenni Sofyan Mora
NIP. 198104212008122001

Pekanbaru, 27 Agustus 2025

Pihak Pertama



Suwindar Agung S
NIP. 198508072010011019

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI RIAU
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA III
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan perdesaan	1	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1 Laporan
2	Meningkatnya penyediaan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas pembangunan perumahan di wilayah perdesaan	2	Jumlah Rumah Swadaya Perumahan Perdesaan	383 Unit

KEGIATAN

1 Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau

PAGU APBN

Rp

8.574.046.000,00

Pekanbaru, 27 Agustus 2025

**KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
SUMATERA III**

YENNI SOFYAN MORA

**KEPALA SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN PROVINSI RIAU**

SUWINDAR AGUNG S

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Suwindar Agung S**

Jabatan : Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Yenni Sofyan Mora**

Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

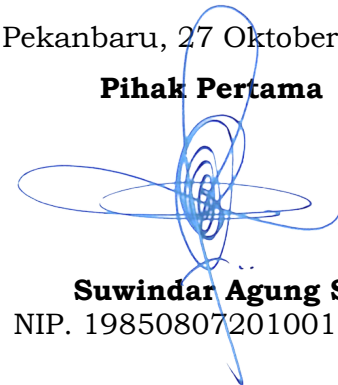
Pihak Kedua



Yenni Sofyan Mora
NIP. 198104212008122001

Pekanbaru, 27 Oktober 2025

Pihak Pertama



Suwindar Agung S
NIP. 198508072010011019

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI RIAU
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA III
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan perdesaan	1	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1 Laporan
2	Meningkatnya penyediaan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas pembangunan perumahan di wilayah perdesaan	2	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan	1 Laporan
		3	Jumlah Rumah Swadaya Perumahan Perdesaan	376 Unit

KEGIATAN

1 Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau

PAGU APBN

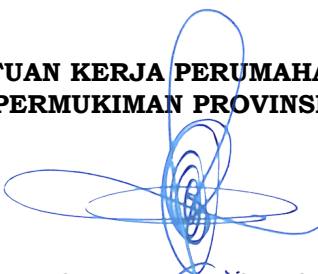
Rp 8.535.521.000,00

Pekanbaru, 27 Oktober 2025

**KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
SUMATERA III**


YENNI SOFYAN MORA

**KEPALA SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN PROVINSI RIAU**


SUWINDAR AGUNG S

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Suwindar Agung S**

Jabatan : Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Yenni Sofyan Mora**

Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

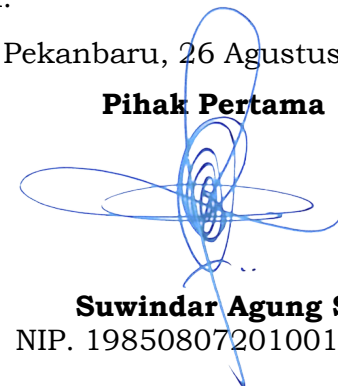
Pihak Kedua



Yenni Sofyan Mora
NIP. 198104212008122001

Pekanbaru, 26 Agustus 2025

Pihak Pertama



Suwindar Agung S
NIP. 198508072010011019

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI RIAU
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA III
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi dalam Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1 Laporan
2	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Baru Layak Huni di Perkotaan	2	Jumlah Rumah Susun Hunian ASN/TNI/POLRI Perumahan Perkotaan	44 Unit
3	Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni melalui Peningkatan Kualitas Pembangunan Perumahan di Wilayah Perkotaan	3	Jumlah Rumah Swadaya Perkotaan	53 Unit

KEGIATAN

1 Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau

PAGU APBN

Rp

21.285.044.000,00

Pekanbaru, 26 Agustus 2025

**KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
SUMATERA III**


YENNI SOFYAN MORA

**KEPALA SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN PROVINSI RIAU**


SUWINDAR AGUNG S

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Suwindar Agung S**

Jabatan : Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Yenni Sofyan Mora**

Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

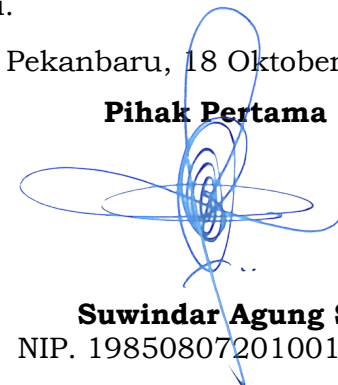
Pihak Kedua



Yenni Sofyan Mora
NIP. 198104212008122001

Pekanbaru, 18 Oktober 2025

Pihak Pertama



Suwindar Agung S
NIP. 198508072010011019

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI RIAU
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA III
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi dalam Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1 Laporan
2	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Baru Layak Huni di Perkotaan	2	Jumlah Rumah Susun Hunian ASN/TNI/POLRI Perumahan Perkotaan	44 Unit
3	Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni melalui Peningkatan Kualitas Pembangunan Perumahan di Wilayah Perkotaan	3	Jumlah Rumah Swadaya Perkotaan	57 Unit

KEGIATAN

1 Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau

PAGU APBN

Rp

21.365.864.000,00

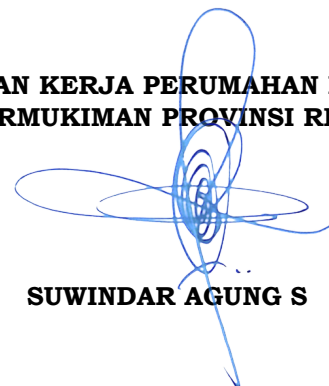
Pekanbaru, 18 Oktober 2025

**KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
SUMATERA III**

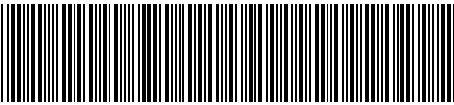


YENNI SOFYAN MORA

**KEPALA SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN PROVINSI RIAU**



SUWINDAR AGUNG S



SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA- 146.01.1.691385/2025

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

Revisi ke 02
Tanggal : 29 Agustus 2025

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- 1. Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
- 2. Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
- 3. Provinsi : (09) RIAU
- 4. Kode>Nama Satker : (691385) Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau
- Sebesar : Rp. 567.434.000 (LIMA RATUS ENAM PULUH TUJUH JUTA EMPAT RATUS TIGA PULUH EMPAT RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

- 06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM
- 06.90 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

- 146.01.WA Program Dukungan Manajemen
- 146.01.WA. Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal

Jumlah Uang

Rp. 567.434.000
Rp. 567.434.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

- | | | | | | |
|-------------------------------|-----|-------------|--------------------------------|-----|---|
| 1. Rupiah Murni | Rp. | 567.434.000 | 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 2. PNB | Rp. | | - Pinjaman Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| - PNB TA Berjalan | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| | | | 5. Hibah Langsung | Rp. | 0 |
| 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Luar Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Pinjaman Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | 6. SBSN PBS | Rp. | 0 |

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- 1. KPPN PEKANBARU (008) Rp. 567.434.000

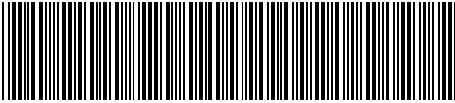
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

- 1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- 2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
- 3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- 4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- 5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- 6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- 7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.01.1.691385/2025
I A. INFORMASI KINERJA



DS:6055-7546-1920-2028

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : (09) RIAU
Kode>Nama Satker : (691385) Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau

							Halaman : I A. 1	
Program	:	146.01.WA	Program Dukungan Manajemen				567.434.000	
Kegiatan	:	7665	Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal				567.434.000	
Indikator Kinerja Kegiatan	:							
Klasifikasi Rincian Output 1	:	7665.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal			1,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	567.434.000
Rincian Output	:	01	EBA.994	Layanan Perkantoran		1.00	Layanan	567.434.000

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.01.1.691385/2025
I B. SUMBER DANA

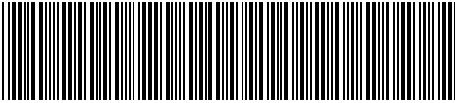


Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : (09) RIAU
Kode>Nama Satker : (691385) Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau

			Pagu		Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2025	Rp.	567.434.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0 Rp. 0
1. Rupiah Murni	Rp.	567.434.000		(2) RPLN	US\$	0 Rp. 0
2. PNPB	Rp.			b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0 Rp. 0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0 Rp. 0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0
						(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.01.1.691385/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN



DS:6055-7546-1920-2028

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : (09) RIAU
Kode>Nama Satker : (691385) Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau
Kewenangan : (KP)

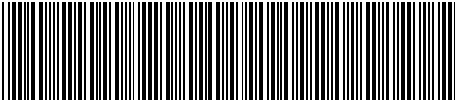
Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
691385	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau	-	567.434	-	-	-	567.434	09 . 51	
146.01.WA	Program Dukungan Manajemen	-	567.434	-	-	-	567.434		
7665	Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal	-	567.434	-	-	-	567.434		
7665.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (09.51 RIAU / KOTA PEKANBARU)	-	567.434	-	-	-	567.434		
01	RM	-	567.434	-	-	-	567.434	008	
JUMLAH		-	567.434	-	-	-	567.434		

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.01.1.691385/2025
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN



DS:6055-7546-1920-2028

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : (09) RIAU
Kode/Nama Satker : (691385) Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau

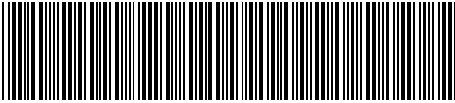
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	691385	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau													
		RENCANA PENARIKAN DANA	0	0	0	0	0	71.102	141.267	45.551	45.551	45.551	45.551	172.861	567.434
		BELANJA BARANG	0	0	0	0	0	71.102	141.267	45.551	45.551	45.551	45.551	172.861	567.434
		Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal	0	0	0	0	0	71.102	141.267	45.551	45.551	45.551	45.551	172.861	567.434
146.01.WA.7665		52 BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	71.102	141.267	45.551	45.551	45.551	45.551	172.861	567.434

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.01.1.691385/2025
IV A. B L O K I R



DS:6055-7546-1920-2028

Kementerian Negara/Lembaga : [146] KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : [01] SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : [09] RIAU
Kode dan Nama Satker : [691385] Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau

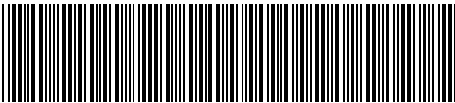
Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.01.1.691385/2025
IV B. C A T A T A N



DS:6055-7546-1920-2028

Kementerian Negara/Lembaga : [146] KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : [01] SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : [09] RIAU
Kode dan Nama Satker : [691385] Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait



SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA- 146.01.1.691385/2025

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

Revisi ke 04
Tanggal : 01 Desember 2025

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- 1. Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
- 2. Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
- 3. Provinsi : (09) RIAU
- 4. Kode>Nama Satker : (691385) Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau
- Sebesar : Rp. 703.514.000 (TUJUH RATUS TIGA JUTA LIMA RATUS EMPAT BELAS RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

- 06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM
- 06.90 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

- 146.01.WA Program Dukungan Manajemen
- 146.01.WA. Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal

Jumlah Uang

Rp. 703.514.000
Rp. 703.514.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

- | | | | | | |
|-------------------------------|-----|-------------|--------------------------------|-----|---|
| 1. Rupiah Murni | Rp. | 703.514.000 | 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 2. PNB | Rp. | | - Pinjaman Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| - PNB TA Berjalan | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| | | | 5. Hibah Langsung | Rp. | 0 |
| 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Luar Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Pinjaman Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | 6. SBSN PBS | Rp. | 0 |

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- 1. KPPN PEKANBARU (008) Rp. 703.514.000

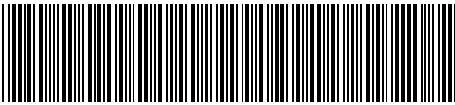
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

- 1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- 2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
- 3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- 4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- 5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- 6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- 7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.01.1.691385/2025
I A. INFORMASI KINERJA



DS:5049-0958-8286-1473

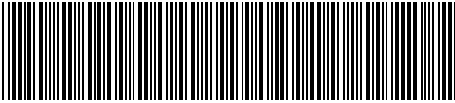
Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : (09) RIAU
Kode>Nama Satker : (691385) Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau

										Halaman : I A. 1
Program	:	146.01.WA	Program Dukungan Manajemen							703.514.000
Kegiatan	:	7665	Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal							703.514.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:									
Klasifikasi Rincian Output 1	:	7665.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal					1,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	703.514.000
Rincian Output	:	01	EBA.994	Layanan Perkantoran				1.00	Layanan	703.514.000

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
SEKRETARIS JENDERAL

ttd.
DIDYK CHOIROEL
NIP. 197104161992011001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.01.1.691385/2025
I B. SUMBER DANA



DS:5049-0958-8286-1473

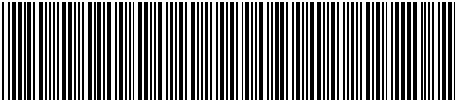
Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : (09) RIAU
Kode>Nama Satker : (691385) Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau

			Pagu		Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2025	Rp.	703.514.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0 Rp.
1. Rupiah Murni	Rp.	703.514.000		(2) RPLN	US\$	0 Rp.
2. PNPB	Rp.			b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0 Rp.
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0 Rp.
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.01.1.691385/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN



DS:5049-0958-8286-1473

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : (09) RIAU
Kode>Nama Satker : (691385) Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau
Kewenangan : (KP)

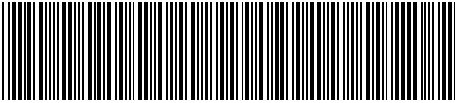
Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
691385	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau	-	703.514	-	-	-	703.514	09 . 51	
146.01.WA	Program Dukungan Manajemen	-	703.514	-	-	-	703.514		
7665	Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal	-	703.514	-	-	-	703.514		
7665.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (09.51 RIAU / KOTA PEKANBARU)	-	703.514	-	-	-	703.514		
01	RM	-	703.514	-	-	-	703.514	008	
JUMLAH		-	703.514	-	-	-	703.514		

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
SEKRETARIS JENDERAL

ttd.
DIDYK CHOIROEL
NIP. 197104161992011001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.01.1.691385/2025
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN



DS:5049-0958-8286-1473

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : (09) RIAU
Kode/Nama Satker : (691385) Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau

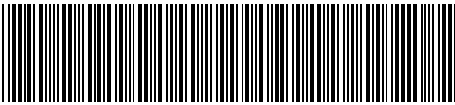
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	691385	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau													
		RENCANA PENARIKAN DANA	0	0	0	0	0	17.398	49.773	91.691	42.105	82.955	20.665	398.927	703.514
		BELANJA BARANG	0	0	0	0	0	17.398	49.773	91.691	42.105	82.955	20.665	398.927	703.514
		Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal	0	0	0	0	0	17.398	49.773	91.691	42.105	82.955	20.665	398.927	703.514
146.01.WA.7665		52 BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	17.398	49.773	91.691	42.105	82.955	20.665	398.927	703.514

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
SEKRETARIS JENDERAL

ttd.
DIDYK CHOIROEL
NIP. 197104161992011001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.01.1.691385/2025
IV A. B L O K I R



DS:5049-0958-8286-1473

Kementerian Negara/Lembaga : [146] KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : [01] SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : [09] RIAU
Kode dan Nama Satker : [691385] Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau

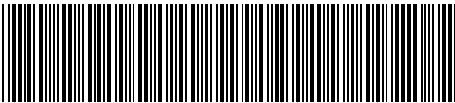
Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
SEKRETARIS JENDERAL

ttd.
DIDYK CHOIROEL
NIP. 197104161992011001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.01.1.691385/2025
IV B. C A T A T A N



DS:5049-0958-8286-1473

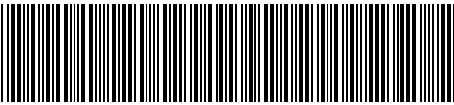
Kementerian Negara/Lembaga : [146] KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : [01] SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : [09] RIAU
Kode dan Nama Satker : [691385] Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
SEKRETARIS JENDERAL

ttd.
DIDYK CHOIROEL
NIP. 197104161992011001



SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA- 146.03.1.691439/2025

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

Revisi ke 04
Tanggal : 15 Agustus 2025

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- 1. Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
- 2. Unit Organisasi : (03) DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
- 3. Provinsi : (09) RIAU
- 4. Kode>Nama Satker : (691439) Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau
- Sebesar : Rp. 11.246.766.000 (SEBELAS MILIAR DUA RATUS EMPAT PULUH ENAM JUTA TUJUH RATUS ENAM PULUH ENAM RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

- 06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM
- 06.01 PEMBANGUNAN PERUMAHAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

- 146.03.IA Program Perumahan dan Kawasan Permukiman
- 146.03.IA.7659 Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman

Jumlah Uang

Rp. 11.246.766.000
Rp. 11.246.766.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

- | | | | | | |
|-------------------------------|-----|----------------|--------------------------------|-----|---|
| 1. Rupiah Murni | Rp. | 11.246.766.000 | 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 2. PNB | Rp. | | - Pinjaman Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| - PNB TA Berjalan | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| | | | 5. Hibah Langsung | Rp. | 0 |
| 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Luar Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Pinjaman Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | 6. SBSN PBS | Rp. | 0 |

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- 1. KPPN PEKANBARU (008) Rp. 11.246.766.000

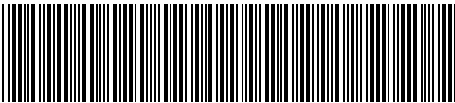
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

- 1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- 2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
- 3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- 4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- 5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- 6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- 7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.03.1.691439/2025
I A. INFORMASI KINERJA

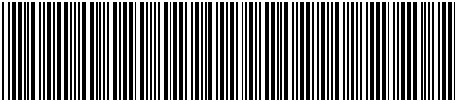


DS:2664-5489-1028-2713

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (03) DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
Provinsi : (09) RIAU
Kode>Nama Satker : (691439) Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau

										Halaman : I A. 1
Program	:	146.03.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman						11.246.766.000	
Kegiatan	:	7659	Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman						11.246.766.000	
Indikator Kinerja Kegiatan	:									
Klasifikasi Rincian Output	1	:	7659.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan				1,00	Laporan, Layanan	85.306.000
Rincian Output	:	01	F AE.003	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh				1.00	Laporan	85.306.000
Klasifikasi Rincian Output	2	:	7659.RBB	Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman				35,58	unit, Hektar	11.161.460.000
Rincian Output	:	01	RBB.005	Penanganan Permukiman Kumuh (PN)				35.58	Hektar	11.161.460.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.03.1.691439/2025
I B. SUMBER DANA



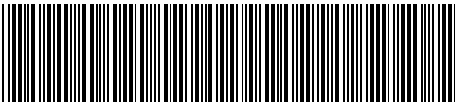
DS:2664-5489-1028-2713

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (03) DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
Provinsi : (09) RIAU
Kode>Nama Satker : (691439) Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau

			Pagu		Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2025	Rp.	11.246.766.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0 Rp.
1. Rupiah Murni	Rp.	11.246.766.000		(2) RPLN	US\$	0 Rp.
2. PNPB	Rp.			b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0 Rp.
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0 Rp.
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0
(dalam ribuan rupiah)						

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.03.1.691439/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN



DS:2664-5489-1028-2713

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (03) DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
Provinsi : (09) RIAU
Kode>Nama Satker : (691439) Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau
Kewenangan : (KP)

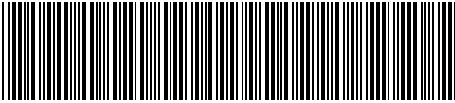
Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
691439	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau	-	11.246.766	-	-	-	11.246.766	09 . 51	
146.03.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	-	11.246.766	-	-	-	11.246.766		
7659	Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman	-	11.246.766	-	-	-	11.246.766		
7659.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan (09.51 RIAU / KOTA PEKANBARU)	-	85.306	-	-	-	85.306		
01	RM	-	85.306	-	-	-	85.306		
7659.RBB	Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman (09.51 RIAU / KOTA PEKANBARU)	-	11.161.460	-	-	-	11.161.460		
01	RM	-	11.161.460	-	-	-	11.161.460	008	
JUMLAH		-	11.246.766	-	-	-	11.246.766		

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.03.1.691439/2025
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN



DS:2664-5489-1028-2713

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (03) DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
Provinsi : (09) RIAU
Kode/Nama Satker : (691439) Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau

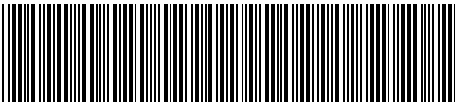
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	691439	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau													
		RENCANA PENARIKAN DANA	0	0	0	0	0	0	11.344	254.875	181.909	4.232.128	1.177.094	5.389.415	11.246.766
		BELANJA BARANG	0	0	0	0	0	0	11.344	254.875	181.909	4.232.128	1.177.094	5.389.415	11.246.766
		Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman	0	0	0	0	0	0	11.344	254.875	181.909	4.232.128	1.177.094	5.389.415	11.246.766
146.03.IA.7659		52 BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	0	11.344	254.875	181.909	4.232.128	1.177.094	5.389.415	11.246.766

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.03.1.691439/2025
IV A. B L O K I R



DS:2664-5489-1028-2713

Kementerian Negara/Lembaga : [146] KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : [03] DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
Provinsi : [09] RIAU
Kode dan Nama Satker : [691439] Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau

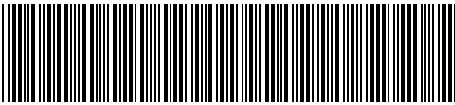
Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.03.1.691439/2025
IV B. C A T A T A N



DS:2664-5489-1028-2713

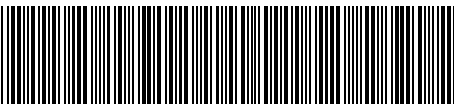
Kementerian Negara/Lembaga : [146] KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : [03] DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
Provinsi : [09] RIAU
Kode dan Nama Satker : [691439] Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait



SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA- 146.03.1.691439/2025

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

Revisi ke 07
Tanggal : 10 Desember 2025

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- 1. Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
- 2. Unit Organisasi : (03) DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
- 3. Provinsi : (09) RIAU
- 4. Kode>Nama Satker : (691439) Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau
- Sebesar : Rp. 8.899.434.000 (DELAPAN MILIAR DELAPAN RATUS SEMBILAN PULUH SEMBILAN JUTA EMPAT RATUS TIGA PULUH EMPAT RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

- 06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM
- 06.01 PEMBANGUNAN PERUMAHAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

- 146.03.IA Program Perumahan dan Kawasan Permukiman
- 146.03.IA.7659 Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman

Jumlah Uang

Rp. 8.899.434.000
Rp. 8.899.434.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

- | | | | | | |
|-------------------------------|-----|---------------|--------------------------------|-----|---|
| 1. Rupiah Murni | Rp. | 8.899.434.000 | 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 2. PNB | Rp. | | - Pinjaman Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| - PNB TA Berjalan | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| | | | 5. Hibah Langsung | Rp. | 0 |
| 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Luar Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Pinjaman Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | 6. SBSN PBS | Rp. | 0 |

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- 1. KPPN PEKANBARU (008) Rp. 8.899.434.000

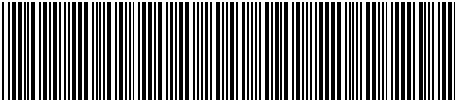
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

- 1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- 2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
- 3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- 4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- 5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- 6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- 7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.03.1.691439/2025
I A. INFORMASI KINERJA



DS:9139-7935-5497-3075

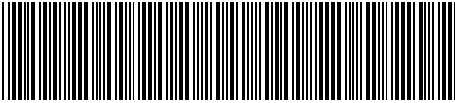
Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (03) DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
Provinsi : (09) RIAU
Kode>Nama Satker : (691439) Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau

										Halaman : I A. 1	
Program	:	146.03.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman							8.899.434.000	
Kegiatan	:	7659	Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman							8.899.434.000	
Indikator Kinerja Kegiatan	:										
Klasifikasi Rincian Output	1	:	7659.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan					1,00	Laporan, Layanan	85.306.000
Rincian Output	:	01	FAE.003	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh					1.00	Laporan	85.306.000
Klasifikasi Rincian Output	2	:	7659.RBB	Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman					35,58	unit, Hektar	8.814.128.000
Rincian Output	:	01	RBB.005	Penanganan Permukiman Kumuh					35.58	Hektar	8.814.128.000

Jakarta, 02 Desember 2024
a.n. MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
DIREKTUR JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Ir. Fitrah Nur, M.Si
NIP. 196704191994031003

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.03.1.691439/2025
I B. SUMBER DANA



DS:9139-7935-5497-3075

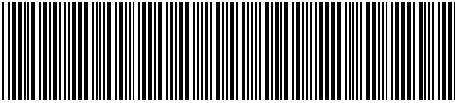
Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (03) DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
Provinsi : (09) RIAU
Kode>Nama Satker : (691439) Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau

			Pagu		Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2025	Rp.	8.899.434.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0 Rp. 0
1. Rupiah Murni	Rp.	8.899.434.000		(2) RPLN	US\$	0 Rp. 0
2. PNPB	Rp.			b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0 Rp. 0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0 Rp. 0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.03.1.691439/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN



DS:9139-7935-5497-3075

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (03) DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
Provinsi : (09) RIAU
Kode>Nama Satker : (691439) Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau
Kewenangan : (KP)

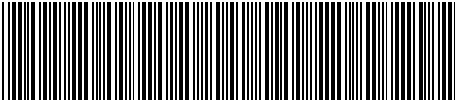
Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
691439	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau	-	8.899.434	-	-	-	8.899.434	09 . 51	
146.03.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	-	8.899.434	-	-	-	8.899.434		
7659	Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman	-	8.899.434	-	-	-	8.899.434		
7659.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan (09.51 RIAU / KOTA PEKANBARU)	-	85.306	-	-	-	85.306		
01	RM	-	85.306	-	-	-	85.306		
7659.RBB	Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman (09.51 RIAU / KOTA PEKANBARU)	-	8.814.128	-	-	-	8.814.128		
01	RM	-	8.814.128	-	-	-	8.814.128	008	
JUMLAH		-	8.899.434	-	-	-	8.899.434		

Jakarta, 02 Desember 2024
a.n. MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
DIREKTUR JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Ir. Fitrah Nur, M.Si
NIP. 196704191994031003

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.03.1.691439/2025
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN



DS:9139-7935-5497-3075

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (03) DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
Provinsi : (09) RIAU
Kode>Nama Satker : (691439) Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau

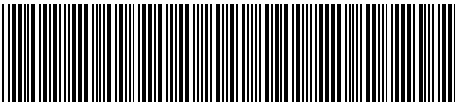
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	691439	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau													
		RENCANA PENARIKAN DANA	0	0	0	0	0	0	47.256	82.518	211.627	1.568.912	3.216.823	3.772.297	8.899.434
		BELANJA BARANG	0	0	0	0	0	0	47.256	82.518	211.627	1.568.912	3.216.823	3.772.297	8.899.434
		Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman	0	0	0	0	0	0	47.256	82.518	211.627	1.568.912	3.216.823	3.772.297	8.899.434
146.03.IA.7659		52 BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	0	47.256	82.518	211.627	1.568.912	3.216.823	3.772.297	8.899.434

Jakarta, 02 Desember 2024
a.n. MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
DIREKTUR JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Ir. Fitrah Nur, M.Si
NIP. 196704191994031003

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.03.1.691439/2025
IV A. B L O K I R



DS:9139-7935-5497-3075

Kementerian Negara/Lembaga : [146] KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : [03] DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
Provinsi : [09] RIAU
Kode dan Nama Satker : [691439] Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau

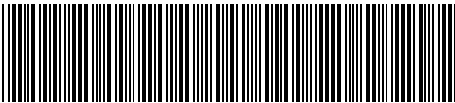
Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
a.n. MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
DIREKTUR JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Ir. Fitrah Nur, M.Si
NIP. 196704191994031003

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.03.1.691439/2025
IV B. C A T A T A N



DS:9139-7935-5497-3075

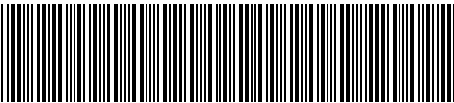
Kementerian Negara/Lembaga : [146] KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : [03] DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
Provinsi : [09] RIAU
Kode dan Nama Satker : [691439] Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
a.n. MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
DIREKTUR JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Ir. Fitrah Nur, M.Si
NIP. 196704191994031003



SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA- 146.04.1.691493/2025

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

Revisi ke 03
Tanggal : 21 Agustus 2025

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- 1. Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
- 2. Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN
- 3. Provinsi : (09) RIAU
- 4. Kode>Nama Satker : (691493) Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau
- Sebesar : Rp. 8.574.046.000 (DELAPAN MILIAR LIMA RATUS TUJUH PULUH EMPAT JUTA EMPAT PULUH ENAM RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

- 06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM
- 06.01 PEMBANGUNAN PERUMAHAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

- 146.04.IA Program Perumahan dan Kawasan Permukiman
- 146.04.IA.7660 Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan

Jumlah Uang

Rp. 8.574.046.000
Rp. 8.574.046.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

- | | | | | | |
|-------------------------------|-----|---------------|--------------------------------|-----|---|
| 1. Rupiah Murni | Rp. | 8.574.046.000 | 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 2. PNB | Rp. | | - Pinjaman Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| - PNB TA Berjalan | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| | | | 5. Hibah Langsung | Rp. | 0 |
| 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Luar Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Pinjaman Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | 6. SBSN PBS | Rp. | 0 |

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- 1. KPPN PEKANBARU (008) Rp. 8.574.046.000

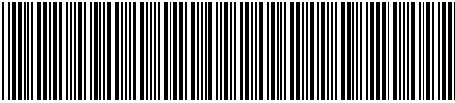
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

- 1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- 2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
- 3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- 4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- 5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- 6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- 7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.04.1.691493/2025
I A. INFORMASI KINERJA

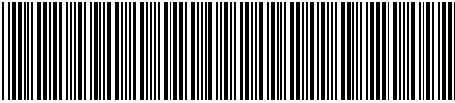


DS:0386-6452-0909-0752

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN
Provinsi : (09) RIAU
Kode>Nama Satker : (691493) Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau

										Halaman : I A. 1	
Program	:	146.04.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman							8.574.046.000	
Kegiatan	:	7660	Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan							8.574.046.000	
Indikator Kinerja Kegiatan	:										
Klasifikasi Rincian Output	1	:	7660.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan					1,00	Laporan, Layanan	111.919.000
Rincian Output	:	01	FAE.001	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan					1.00	Laporan	111.919.000
Klasifikasi Rincian Output	2	:	7660.RBB	Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman					383,00	unit, Hektar	8.462.127.000
Rincian Output	:	01	RBB.007	Rumah Swadaya Perumahan Perdesaan (PN)					383.00	unit	8.462.127.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.04.1.691493/2025
I B. SUMBER DANA



DS:0386-6452-0909-0752

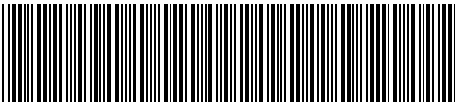
Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN
Provinsi : (09) RIAU
Kode>Nama Satker : (691493) Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau

						Pagu	Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2025	Rp.	8.574.046.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
1. Rupiah Murni	Rp.	8.574.046.000		(2) RPLN	US\$	0	Rp.	0
2. PNPB	Rp.			b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0	Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0		
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0		
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0		

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.04.1.691493/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN



DS:0386-6452-0909-0752

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN
Provinsi : (09) RIAU
Kode>Nama Satker : (691493) Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau
Kewenangan : (KP)

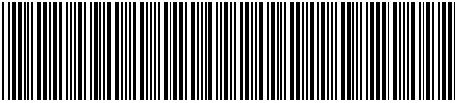
Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
691493	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau	-	8.574.046	-	-	-	8.574.046	09 . 51	
146.04.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	-	8.574.046	-	-	-	8.574.046		
7660	Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	-	8.574.046	-	-	-	8.574.046		
7660.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan (09.51 RIAU / KOTA PEKANBARU)	-	111.919	-	-	-	111.919		
01	RM	-	111.919	-	-	-	111.919		
7660.RBB	Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman (09.51 RIAU / KOTA PEKANBARU)	-	8.462.127	-	-	-	8.462.127		
01	RM	-	8.462.127	-	-	-	8.462.127	008	
JUMLAH		-	8.574.046	-	-	-	8.574.046		

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.04.1.691493/2025
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN



DS:0386-6452-0909-0752

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN
Provinsi : (09) RIAU
Kode>Nama Satker : (691493) Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau

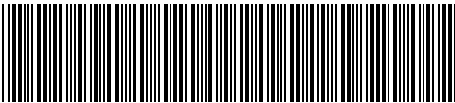
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	691493	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau													
		RENCANA PENARIKAN DANA	0	0	0	0	0	3.914	15.052	43.866	232.988	7.857.800	185.644	234.782	8.574.046
		BELANJA BARANG	0	0	0	0	0	3.914	15.052	43.866	232.988	7.857.800	185.644	234.782	8.574.046
		146.04.IA.7660	Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	0	0	0	0	0	3.914	15.052	43.866	232.988	7.857.800	185.644	234.782
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	3.914	15.052	43.866	232.988	7.857.800	185.644	234.782	8.574.046

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.04.1.691493/2025
IV A. B L O K I R



DS:0386-6452-0909-0752

Kementerian Negara/Lembaga : [146] KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : [04] DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN
Provinsi : [09] RIAU
Kode dan Nama Satker : [691493] Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau

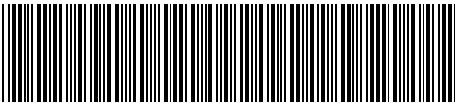
Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.04.1.691493/2025
IV B. C A T A T A N



DS:0386-6452-0909-0752

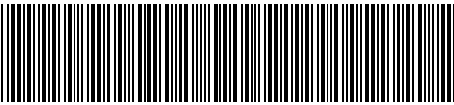
Kementerian Negara/Lembaga : [146] KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : [04] DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN
Provinsi : [09] RIAU
Kode dan Nama Satker : [691493] Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait



SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA- 146.04.1.691493/2025

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

Revisi ke 08
Tanggal : 11 Desember 2025

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- 1. Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
- 2. Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN
- 3. Provinsi : (09) RIAU
- 4. Kode>Nama Satker : (691493) Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau
- Sebesar : Rp. 8.535.521.000 (DELAPAN MILIAR LIMA RATUS TIGA PULUH LIMA JUTA LIMA RATUS DUA PULUH SATU RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

- 06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM
- 06.01 PEMBANGUNAN PERUMAHAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

- 146.04.IA Program Perumahan dan Kawasan Permukiman
- 146.04.IA.7660 Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan

Jumlah Uang

Rp. 8.535.521.000
Rp. 8.535.521.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

- | | | | | | |
|-------------------------------|-----|---------------|--------------------------------|-----|---|
| 1. Rupiah Murni | Rp. | 8.535.521.000 | 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 2. PNB | Rp. | | - Pinjaman Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| - PNB TA Berjalan | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| | | | 5. Hibah Langsung | Rp. | 0 |
| 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Luar Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Pinjaman Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | 6. SBSN PBS | Rp. | 0 |

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- 1. KPPN PEKANBARU (008) Rp. 8.535.521.000

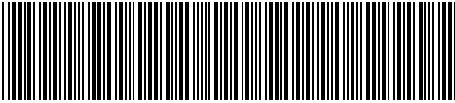
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

- 1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- 2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
- 3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- 4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- 5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- 6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- 7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.04.1.691493/2025
I A. INFORMASI KINERJA



DS:8879-4534-9798-2085

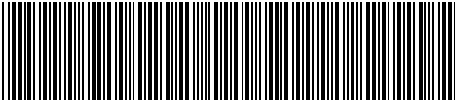
Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN
Provinsi : (09) RIAU
Kode>Nama Satker : (691493) Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau

										Halaman : I A. 1
Program	:	146.04.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman						8.535.521.000	
Kegiatan	:	7660	Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan						8.535.521.000	
Indikator Kinerja Kegiatan	:									
Klasifikasi Rincian Output	1	:	7660.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan				2,00	Laporan, Layanan	240.727.000
Rincian Output	:	01	FAE.001	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan				1.00	Laporan	111.919.000
		02	FAE.005	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan				1.00	Laporan	128.808.000
Klasifikasi Rincian Output	2	:	7660.RBB	Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman				376,00	unit, Hektar	8.294.794.000
Rincian Output	:	01	RBB.007	Rumah Swadaya Perumahan Perdesaan (PN)				376.00	unit	8.294.794.000

Jakarta, 02 Desember 2024
a.n. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman
Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan

ttd.
Dr. Drs. Imran, M.Si., MA.Cd.
197310261993021001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.04.1.691493/2025
I B. SUMBER DANA



DS:8879-4534-9798-2085

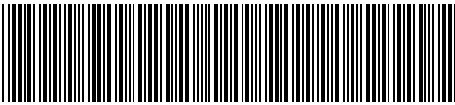
Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN
Provinsi : (09) RIAU
Kode>Nama Satker : (691493) Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau

			Pagu		Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2025	Rp.	8.535.521.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0 Rp.
1. Rupiah Murni	Rp.	8.535.521.000		(2) RPLN	US\$	0 Rp.
2. PNPB	Rp.			b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0 Rp.
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0 Rp.
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.04.1.691493/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN



DS:8879-4534-9798-2085

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN
Provinsi : (09) RIAU
Kode>Nama Satker : (691493) Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau
Kewenangan : (KP)

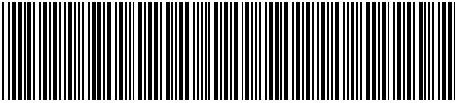
Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
691493	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau	-	8.535.521	-	-	-	8.535.521	09 . 51	
146.04.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	-	8.535.521	-	-	-	8.535.521		
7660	Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	-	8.535.521	-	-	-	8.535.521		
7660.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan (09.51 RIAU / KOTA PEKANBARU)	-	240.727	-	-	-	240.727		
01	RM	-	240.727	-	-	-	240.727		
7660.RBB	Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman (09.51 RIAU / KOTA PEKANBARU)	-	8.294.794	-	-	-	8.294.794		
01	RM	-	8.294.794	-	-	-	8.294.794	008	
JUMLAH		-	8.535.521	-	-	-	8.535.521		

Jakarta, 02 Desember 2024
a.n. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman
Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan

ttd.
Dr. Drs. Imran, M.Si., MA.Cd.
197310261993021001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.04.1.691493/2025
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN



DS:8879-4534-9798-2085

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN
Provinsi : (09) RIAU
Kode>Nama Satker : (691493) Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau

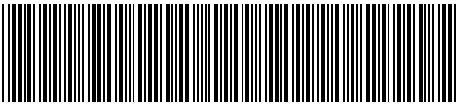
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	691493	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau													
		RENCANA PENARIKAN DANA	0	0	0	0	0	6.850	0	17.138	58.369	7.704.740	187.322	561.102	8.535.521
		BELANJA BARANG	0	0	0	0	0	6.850	0	17.138	58.369	7.704.740	187.322	561.102	8.535.521
		Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	0	0	0	0	0	6.850	0	17.138	58.369	7.704.740	187.322	561.102	8.535.521
	146.04.IA.7660	52 BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	6.850	0	17.138	58.369	7.704.740	187.322	561.102	8.535.521

Jakarta, 02 Desember 2024
a.n. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman
Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan

ttd.
Dr. Drs. Imran, M.Si., MA.Cd.
197310261993021001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.04.1.691493/2025
IV A. B L O K I R



DS:8879-4534-9798-2085

Kementerian Negara/Lembaga : [146] KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : [04] DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN
Provinsi : [09] RIAU
Kode dan Nama Satker : [691493] Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau

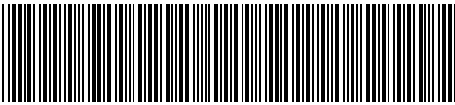
Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
a.n. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman
Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan

ttd.
Dr. Drs. Imran, M.Si., MA.Cd.
197310261993021001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.04.1.691493/2025
IV B. C A T A T A N



DS:8879-4534-9798-2085

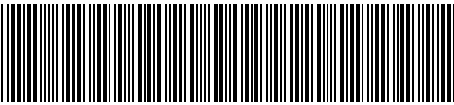
Kementerian Negara/Lembaga : [146] KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : [04] DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN
Provinsi : [09] RIAU
Kode dan Nama Satker : [691493] Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
a.n. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman
Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan

ttd.
Dr. Drs. Imran, M.Si., MA.Cd.
197310261993021001



SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA- 146.05.1.691547/2025

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

Revisi ke 05
Tanggal : 25 Agustus 2025

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- 1. Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
- 2. Unit Organisasi : (05) DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
- 3. Provinsi : (09) RIAU
- 4. Kode>Nama Satker : (691547) Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau
- Sebesar : Rp. 21.285.044.000 (DUA PULUH SATU MILIAR DUA RATUS DELAPAN PULUH LIMA JUTA EMPAT PULUH EMPAT RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

- 06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM
- 06.01 PEMBANGUNAN PERUMAHAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

- 146.05.IA Program Perumahan dan Kawasan Permukiman
- 146.05.IA.7661 Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan

Jumlah Uang

Rp. 21.285.044.000
Rp. 21.285.044.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

- | | | | | | |
|-------------------------------|-----|----------------|--------------------------------|-----|---|
| 1. Rupiah Murni | Rp. | 21.285.044.000 | 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 2. PNB | Rp. | | - Pinjaman Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| - PNB TA Berjalan | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| | | | 5. Hibah Langsung | Rp. | 0 |
| 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Luar Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Pinjaman Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | 6. SBSN PBS | Rp. | 0 |

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- 1. KPPN PEKANBARU (008) Rp. 21.285.044.000

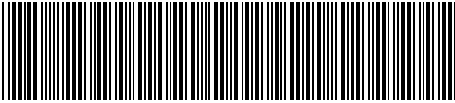
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

- 1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- 2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
- 3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- 4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- 5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- 6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- 7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.05.1.691547/2025
I A. INFORMASI KINERJA

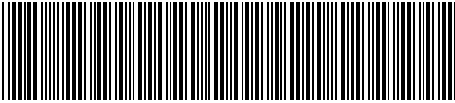


DS:3718-4250-9105-4111

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (05) DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
Provinsi : (09) RIAU
Kode>Nama Satker : (691547) Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau

										Halaman : I A. 1
Program	:	146.05.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman						21.285.044.000	
Kegiatan	:	7661	Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan						21.285.044.000	
Indikator Kinerja Kegiatan	:									
Klasifikasi Rincian Output	1	:	7661.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan				1,00	Laporan, Layanan	511.499.000
Rincian Output	:	01	FAE.001	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan				1.00	Laporan	511.499.000
Klasifikasi Rincian Output	2	:	7661.RBB	Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman				97,00	unit, Hektar	20.773.545.000
Rincian Output	:	01	RBB.003	Rumah Susun Hunian ASN/TNI/POLRI Perumahan Perkotaan (PN)				44.00	unit	19.464.580.000
		02	RBB.008	Rumah Swadaya Perkotaan (PN)				53.00	unit	1.308.965.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.05.1.691547/2025
I B. SUMBER DANA



DS:3718-4250-9105-4111

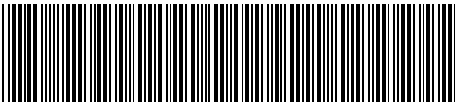
Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (05) DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
Provinsi : (09) RIAU
Kode>Nama Satker : (691547) Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau

				Pagu		Ekuivalen Rupiah		
1. Anggaran Tahun 2025	Rp.	21.285.044.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
1. Rupiah Murni	Rp.	21.285.044.000		(2) RPLN	US\$	0	Rp.	0
2. PNPB	Rp.			b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0	Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0		
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0		
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0		(dalam ribuan rupiah)

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.05.1.691547/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN



DS:3718-4250-9105-4111

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (05) DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
Provinsi : (09) RIAU
Kode>Nama Satker : (691547) Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau
Kewenangan : (KP)

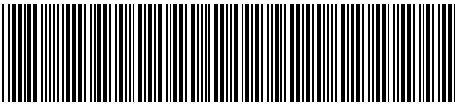
Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
691547	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau	-	2.233.064	19.051.980	-	-	21.285.044	09 . 51	
146.05.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	-	2.233.064	19.051.980	-	-	21.285.044		
7661	Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	-	2.233.064	19.051.980	-	-	21.285.044		
7661.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan (09.51 RIAU / KOTA PEKANBARU)	-	511.499	-	-	-	511.499		
01	RM	-	511.499	-	-	-	511.499		
7661.RBB	Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman (09.51 RIAU / KOTA PEKANBARU)	-	1.721.565	19.051.980	-	-	20.773.545		
01	RM	-	1.721.565	19.051.980	-	-	20.773.545	008	
JUMLAH		-	2.233.064	19.051.980	-	-	21.285.044		

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.05.1.691547/2025
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN



DS:3718-4250-9105-4111

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (05) DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
Provinsi : (09) RIAU
Kode>Nama Satker : (691547) Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau

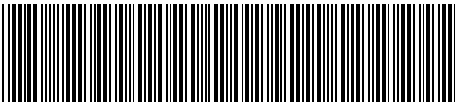
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	691547	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau													
		RENCANA PENARIKAN DANA	0	0	0	0	0	12.023.907	1.938.107	1.932.051	1.043.184	2.467.956	151.429	1.728.410	21.285.044
		BELANJA BARANG	0	0	0	0	0	0	84.715	78.659	116.488	1.309.586	151.429	492.187	2.233.064
		BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	12.023.907	1.853.392	1.853.392	926.696	1.158.370	0	1.236.223	19.051.980
		Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	0	0	0	0	0	12.023.907	1.938.107	1.932.051	1.043.184	2.467.956	151.429	1.728.410	21.285.044
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	0	84.715	78.659	116.488	1.309.586	151.429	492.187	2.233.064
		53 BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	12.023.907	1.853.392	1.853.392	926.696	1.158.370	0	1.236.223	19.051.980
					</										

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.05.1.691547/2025
IV A. B L O K I R



DS:3718-4250-9105-4111

Kementerian Negara/Lembaga : [146] KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : [05] DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
Provinsi : [09] RIAU
Kode dan Nama Satker : [691547] Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau

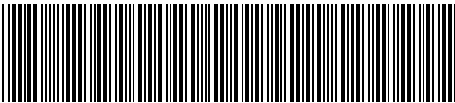
Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.05.1.691547/2025
IV B. C A T A T A N



DS:3718-4250-9105-4111

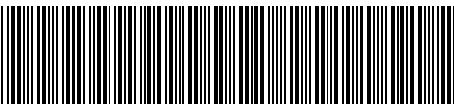
Kementerian Negara/Lembaga : [146] KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : [05] DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
Provinsi : [09] RIAU
Kode dan Nama Satker : [691547] Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait



SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA- 146.05.1.691547/2025

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

Revisi ke 09
Tanggal : 10 Desember 2025

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- 1. Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
- 2. Unit Organisasi : (05) DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
- 3. Provinsi : (09) RIAU
- 4. Kode/Nama Satker : (691547) Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau
- Sebesar : Rp. 21.365.864.000 (DUA PULUH SATU MILIAR TIGA RATUS ENAM PULUH LIMA JUTA DELAPAN RATUS ENAM PULUH EMPAT RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

- 06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM
- 06.01 PEMBANGUNAN PERUMAHAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

- 146.05.IA Program Perumahan dan Kawasan Permukiman
- 146.05.IA.7661 Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan

Jumlah Uang

Rp. 21.365.864.000
Rp. 21.365.864.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

- | | | | | | |
|-------------------------------|-----|----------------|--------------------------------|-----|---|
| 1. Rupiah Murni | Rp. | 21.365.864.000 | 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 2. PNB | Rp. | | - Pinjaman Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| - PNB TA Berjalan | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| | | | 5. Hibah Langsung | Rp. | 0 |
| 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Luar Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Pinjaman Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | 6. SBSN PBS | Rp. | 0 |

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- 1. KPPN PEKANBARU (008) Rp. 21.365.864.000

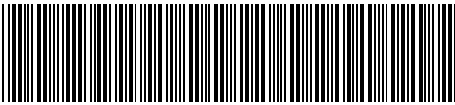
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

- 1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- 2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
- 3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- 4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- 5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- 6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- 7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.05.1.691547/2025
I A. INFORMASI KINERJA



DS:0718-1900-0300-9646

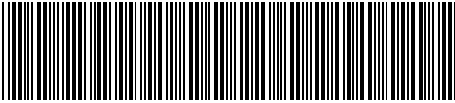
Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (05) DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
Provinsi : (09) RIAU
Kode>Nama Satker : (691547) Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau

										Halaman : I A. 1
Program	:	146.05.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman						21.365.864.000	
Kegiatan	:	7661	Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan						21.365.864.000	
Indikator Kinerja Kegiatan	:									
Klasifikasi Rincian Output	1	:	7661.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan				1,00	Laporan, Layanan	511.499.000
Rincian Output	:	01	F AE.001	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan				1.00	Laporan	511.499.000
Klasifikasi Rincian Output	2	:	7661.RBB	Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman				101,00	unit, Hektar	20.854.365.000
Rincian Output	:	01	RBB.003	Rumah Susun Hunian ASN/TNI/POLRI Perumahan Perkotaan				44.00	unit	19.464.580.000
		02	RBB.008	Rumah Swadaya Perkotaan (PN)				57.00	unit	1.389.785.000

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN

ttd.
SRI HARYATI
197107071997032004

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.05.1.691547/2025
I B. SUMBER DANA



DS:0718-1900-0300-9646

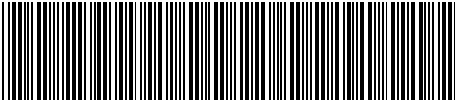
Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (05) DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
Provinsi : (09) RIAU
Kode>Nama Satker : (691547) Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau

			Pagu		Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2025	Rp.	21.365.864.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0 Rp.
1. Rupiah Murni	Rp.	21.365.864.000		(2) RPLN	US\$	0 Rp.
2. PNPB	Rp.			b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0 Rp.
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0 Rp.
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.05.1.691547/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN



DS:0718-1900-0300-9646

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (05) DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
Provinsi : (09) RIAU
Kode>Nama Satker : (691547) Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau
Kewenangan : (KP)

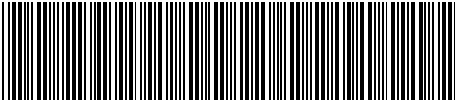
Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
691547	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau	-	2.313.884	19.051.980	-	-	21.365.864	09 . 51	
146.05.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	-	2.313.884	19.051.980	-	-	21.365.864		
7661	Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	-	2.313.884	19.051.980	-	-	21.365.864		
7661.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan (09.51 RIAU / KOTA PEKANBARU)	-	511.499	-	-	-	511.499		
01	RM	-	511.499	-	-	-	511.499		
7661.RBB	Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman (09.51 RIAU / KOTA PEKANBARU)	-	1.802.385	19.051.980	-	-	20.854.365		
01	RM	-	1.802.385	19.051.980	-	-	20.854.365	008	
JUMLAH		-	2.313.884	19.051.980	-	-	21.365.864		

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN

ttd.
SRI HARYATI
197107071997032004

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.05.1.691547/2025
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN



DS:0718-1900-0300-9646

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (05) DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
Provinsi : (09) RIAU
Kode>Nama Satker : (691547) Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau

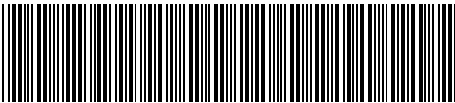
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	691547	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau													
		RENCANA PENARIKAN DANA	0	0	0	0	0	12.023.907	1.988.871	1.926.796	948.842	2.534.709	914.353	1.028.386	21.365.864
		BELANJA BARANG	0	0	0	0	0	189.240	86.007	62.546	39.946	1.330.920	74.903	530.322	2.313.884
		BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	11.834.667	1.902.864	1.864.249	908.897	1.203.789	839.450	498.064	19.051.980
		Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	0	0	0	0	0	12.023.907	1.988.871	1.926.796	948.842	2.534.709	914.353	1.028.386	21.365.864
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	189.240	86.007	62.546	39.946	1.330.920	74.903	530.322	2.313.884
	146.05.IA.7661	53 BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	11.834.667	1.902.864	1.864.249	908.897	1.203.789	839.450	498.064	19.051.980

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN

ttd.
SRI HARYATI
197107071997032004

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.05.1.691547/2025
IV A. B L O K I R



DS:0718-1900-0300-9646

Kementerian Negara/Lembaga : [146] KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : [05] DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
Provinsi : [09] RIAU
Kode dan Nama Satker : [691547] Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau

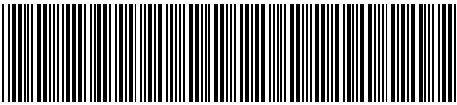
Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN

ttd.
SRI HARYATI
197107071997032004

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.05.1.691547/2025
IV B. C A T A T A N



DS:0718-1900-0300-9646

Kementerian Negara/Lembaga : [146] KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : [05] DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
Provinsi : [09] RIAU
Kode dan Nama Satker : [691547] Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN

ttd.
SRI HARYATI
197107071997032004

**PROFIL PENERIMA PELAKSANAAN BANTUAN
BSPS TAHUN 2025**

1. KABUPATEN PELALAWAN

Nama Penerima Bantuan : SUNTIA MIRANTI		Kabupaten : PELALAWAN
Alamat : DUSUN SIDODADI RT/RW. 001/002		Provinsi : RIAU
Desa : LANGKAN		Nomor BNBA : 292
Kecamatan : LANGGAM		Nomor KTP : 1405055305980003

 0,1449N 101,7502E Langkan Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan Riau suntia	 0,1449N 101,7501E Langkan Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan Riau suntia miranti index number: 16	 0,1449N 101,7501E Langkan Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan Riau index number: 16
Progres Fisik 0%	Progres Fisik 30% - <100%	Progres Fisik 100%

Nama Penerima Bantuan : NUR KHOLIS		Kabupaten : PELALAWAN	
Alamat : DUSUN SIDOMULYO RT/RW. 001/004		Provinsi : RIAU	
Desa : LANGKAN		Nomor BNBA : 293	
Kecamatan : LANGGAM		Nomor KTP : 1801173108870001	
 0,1418N 101,7588E Langkan Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan Riau Nurkholis		 0,1414N 101,7586E Langkan Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan Riau Nurkholis index number: 44	
Progres Fisik 0%		Progres Fisik 30% - <100%	
		 0,1418N 101,7588E Langkan Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan Riau index number: 150	
		Progres Fisik 100%	

Nama Penerima Bantuan : SLAMET SANTOSO		Kabupaten : PELALAWAN	
Alamat : RT/RW. 001/006		Provinsi : RIAU	
Desa : LANGKAN		Nomor BNBA : 294	
Kecamatan : LANGGAM		Nomor KTP : 1405050211970004	
 0,1421N 101,7556E Langkan Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan Riau slamet		 0,1420N 101,7557E Langkan Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan Riau slamet index number: 99	
Progres Fisik 0%		Progres Fisik 30% - <100%	
			
		Progres Fisik 100%	

Nama Penerima Bantuan : MUBADI		Kabupaten : PELALAWAN	
Alamat : RT/RW. 002/006		Provinsi : RIAU	
Desa : LANGKAN		Nomor BNBA : 295	
Kecamatan : LANGGAM		Nomor KTP : 1405050811590001	
 0,1421N 101,7556E Langkan Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan Riau mubadi		 0,1413N 101,7588E Langkan Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan Riau mubadi index number: 32	
Progres Fisik 0%		Progres Fisik 30% - <100%	
		 0,1412N 101,7684E Langkan Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan Riau mubadi index number: 162	
		Progres Fisik 100%	

Nama Penerima Bantuan : MUSTAMIN		Kabupaten : PELALAWAN	
Alamat : TELUK PELITA RT/RW. 002/002		Provinsi : RIAU	
Desa : SUNGAI EMAS		Nomor BNBA : 280	
Kecamatan : KUALA KAMPAR		Nomor KTP : 1405101803870004	
			
Progres Fisik 0%		Progres Fisik 30% - <100%	
			
		Progres Fisik 100%	

2. KABUPATEN SIAK

Nama Penerima Bantuan : M. NOR		Kabupaten : SIAK	
Alamat : DUSUN DHARMA SAKTI,RT 002 RW 001		Provinsi : RIAU	
Desa : BUATAN II		Nomor BNBA : 238	
Kecamatan : KOTO GASIB		Nomor KTP : 1408092402630002	
			
Progres Fisik 0%		Progres Fisik 30% - <100%	
			
		Progres Fisik 100%	

Nama Penerima Bantuan : SUGIANTO		Kabupaten : SIAK	
Alamat : DUSUN DHARMA SAKTI, RT 005RW 002		Provinsi : RIAU	
Desa : BUATAN II		Nomor BNBA : 243	
Kecamatan : KOTO GASIB		Nomor KTP : 1408093101610001	
			
			
Progres Fisik 0%		Progres Fisik 30% - <100%	
		Progres Fisik 100%	

Nama Penerima Bantuan : AHMAD SARI		Kabupaten : SIAK	
Alamat : DUSUN LINGKAR NAGA, RT 017 RW 006		Provinsi : RIAU	
Desa : BUATAN II		Nomor BNBA : 250	
Kecamatan : KOTO GASIB		Nomor KTP : 1408092005770001	
			
			
Progres Fisik 0%		Progres Fisik 30% - <100%	
		Progres Fisik 100%	

Nama Penerima Bantuan : SANTI WIDYAS TUTI		Kabupaten : SIAK	
Alamat : DUSUN LINGKAR NAGA RT 017 RW 006		Provinsi : RIAU	
Desa : BUATAN II		Nomor BNBA : 251	
Kecamatan : KOTO GASIB		Nomor KTP : 1408094505860003	
			
Progres Fisik 0%		Progres Fisik 30% - <100%	
			
		Progres Fisik 100%	

Nama Penerima Bantuan : ISNAL		Kabupaten : SIAK	
Alamat : KAMPUNG BUATAN II RT 017 RW 006		Provinsi : RIAU	
Desa : BUATAN II		Nomor BNBA : 249	
Kecamatan : KOTO GASIB		Nomor KTP : 1408090605880001	
			
Progres Fisik 0%		Progres Fisik 30% - <100%	
			
		Progres Fisik 100%	

3. KABUPATEN ROKAN HILIR

Nama Penerima Bantuan : MUKSON		Kabupaten : ROKAN HILIR	
Alamat : JL. SUKAJADI RT/RW 003/001		Provinsi : RIAU	
Desa : MELAYU TENGAH		Nomor BNBA : 368	
Kecamatan : TANAH PUTIH TANJUNG MELAWAN		Nomor KTP : 1407091209650001	
			
Progres Fisik 0%		Progres Fisik 30% - <100%	
		Progres Fisik 100%	

Nama Penerima Bantuan : LUBIS AHMAD		Kabupaten : ROKAN HILIR	
Alamat : JL. PUJUD TUA HULU		Provinsi : RIAU	
Desa : SUNGAI PINANG		Nomor BNBA : 374	
Kecamatan : PUJUD		Nomor KTP : 1407082505540002	
			
Progres Fisik 0%		Progres Fisik 30% - <100%	
		Progres Fisik 100%	

Nama Penerima Bantuan : PONIMIN		Kabupaten : ROKAN HILIR	
Alamat : JL. BABUSSALAM ROKAN		Provinsi : RIAU	
Desa : BABUSSALAM ROKAN		Nomor BNBA : 365	
Kecamatan : PUJUD		Nomor KTP : 1407080611670002	
			
Progres Fisik 0%		Progres Fisik 30% - <100%	
			
		Progres Fisik 100%	

Nama Penerima Bantuan : MAISARAH		Kabupaten : ROKAN HILIR	
Alamat : JL. SEI RUMBIA RT/RW 001/004		Provinsi : RIAU	
Desa : PUJUD SELATAN		Nomor BNBA : 347	
Kecamatan : PUJUD		Nomor KTP : 1407085505530003	
			
Progres Fisik 0%		Progres Fisik 30% - <100%	
			
		Progres Fisik 100%	

Nama Penerima Bantuan : SYAFI'I		Kabupaten : ROKAN HILIR	
Alamat : KAMPUNG TIGA RT/RW 001/001		Provinsi : RIAU	
Desa : PUJUD		Nomor BNBA : 352	
Kecamatan : PUJUD		Nomor KTP : 1407082307580002	
 1.4246N 100.6411E Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Riau Matsarah			
			
Progres Fisik 0%		Progres Fisik 30% - <100%	
		Progres Fisik 100%	

4. KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Nama Penerima Bantuan : BURHANUDIN		Kabupaten : INDRAGIRI HILIR
Alamat : PARIT 21 SUNGAI INTAN BESAR,Rt 012 Rw 006		Provinsi : RIAU
Desa : SUNGAI INTAN		Nomor BNBA : 2
Kecamatan : TEMBILAHAN HULU		Nomor KTP : 1404130107840011
		
Progres Fisik 0%	Progres Fisik 30% - <100%	Progres Fisik 100%

Nama Penerima Bantuan	: SALAMAH	Kabupaten	: INDRAGIRI HILIR
Alamat	: PARIT 24 PULAU PALAS RT 011 RW 009	Provinsi	: RIAU
Desa	: SUNGAI INTAN	Nomor BNBA	: 3
Kecamatan	: TEMBILAHAN HULU	Nomor KTP	: 1404135011550002
			
			
Progres Fisik 0%		Progres Fisik 30% - <100%	
		Progres Fisik 100%	

Nama Penerima Bantuan	: HARUN	Kabupaten	: INDRAGIRI HILIR
Alamat	: PARIT 23 RT 017 RW 006	Provinsi	: RIAU
Desa	: SUNGAI INTAN	Nomor BNBA	: 4
Kecamatan	: TEMBILAHAN HULU	Nomor KTP	: 1404131210530001
			
Progres Fisik 0%	Progres Fisik 30% - <100%		Progres Fisik 100%

Nama Penerima Bantuan : JUMAINI		Kabupaten : INDRAGIRI HILIR	
Alamat : PARIT 24 PULAU PALAS RT 019 RW 009		Provinsi : RIAU	
Desa : SUNGAI INTAN		Nomor BNBA : 6	
Kecamatan : TEMBILAHAN HULU		Nomor KTP : 1404132303880001	
			
			
Progres Fisik 0%		Progres Fisik 30% - <100%	
		Progres Fisik 100%	

Nama Penerima Bantuan : FAHRIANSYAH		Kabupaten : INDRAGIRI HILIR	
Alamat : SUNGAI PINANG RT 014 RW 007		Provinsi : RIAU	
Desa : SUNGAI INTAN		Nomor BNBA : 9	
Kecamatan : TEMBILAHAN BARAT		Nomor KTP : 1404132708830003	
			
			
Progres Fisik 0%		Progres Fisik 30% - <100%	
		Progres Fisik 100%	

5. KABUPATEN INDRAGIRI HULU

Nama Penerima Bantuan : HARIYADI		Kabupaten : INDRAGIRI HULU
Alamat : DUSUN TUA PELANG RT/RW 003/002		Provinsi : Riau
Desa : DUSUN TUA PELANG		Nomor BNBA : 5
Kecamatan : KELAYANG		Nomor KTP : 1402030508830002
		
Progres Fisik 0%	Progres Fisik 30% - <100%	Progres Fisik 100%

Nama Penerima Bantuan : SIPAR		Kabupaten : INDRAGIRI HULU
Alamat : SEI. BERAS BERAS RT/RW 009/004		Provinsi : Riau
Desa : SUNGAI BERAS BERAS		Nomor BNBA : 2
Kecamatan : LUBUK BATU JAYA		Nomor KTP : 1402121012640002

		
Progres Fisik 0%	Progres Fisik 30% - <100%	Progres Fisik 100%

Nama Penerima Bantuan : GADIS		Kabupaten : INDRAGIRI HULU	
Alamat : DUSUN TUA PELANG RT/RW 006/003		Provinsi : Riau	
Desa : DUSUN TUA PELANG		Nomor BNBA : 5	
Kecamatan : KELAYANG		Nomor KTP : 1402035012600002	
			
Progres Fisik 0%		Progres Fisik 30% - <100%	
		Progres Fisik 100%	

Nama Penerima Bantuan : YULINAR		Kabupaten : INDRAGIRI HULU	
Alamat : DUSUN TUA PELANG RT/RW 002/001		Provinsi : Riau	
Desa : DUSUN TUA PELANG		Nomor BNBA : 3	
Kecamatan : KELAYANG		Nomor KTP : 028401057241502	
			
Progres Fisik 0%		Progres Fisik 30% - <100%	
		Progres Fisik 100%	

Nama Penerima Bantuan : KARDIMAN		Kabupaten : INDRAGIRI HULU
Alamat : DUSUN TUA PELANG RT/RW 004/002		Provinsi : Riau
Desa : DUSUN TUA PELANG		Nomor BNBA : 2
Kecamatan : KELAYANG		Nomor KTP : 028401057241502
		
Progres Fisik 0%	Progres Fisik 30% - <100%	Progres Fisik 100%

6. KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Nama Penerima Bantuan	: SUTOYO	Kabupaten	: Kuantan Singingi
Alamat	: RT 013/ RW 005	Provinsi	: Riau
Desa	: Sungai Sirih	Nomor BNBA	: 257
Kecamatan	: Singingi	Nomor KTP	: 1409030705810002
			
Progres Fisik 0%	Progres Fisik 30% - <100%	Progres Fisik 100%	

Nama Penerima Bantuan : JETRIALIS		Kabupaten : Kuantan Singingi	
Alamat : RT 010/ RW 004		Provinsi : Riau	
Desa : Sungai Sirih		Nomor BNBA : 260	
Kecamatan : Singingi		Nomor KTP : 1409031506850001	
			
Progres Fisik 0%		Progres Fisik 30% - <100%	
		Progres Fisik 100%	

Nama Penerima Bantuan : SUPRIANTO		Kabupaten : Kuantan Singingi	
Alamat : RT 001/ RW 001		Provinsi : Riau	
Desa : Sungai Sirih		Nomor BNBA : 261	
Kecamatan : Singingi		Nomor KTP : 1208011509890005	
			
Progres Fisik 0%		Progres Fisik 30% - <100%	
		Progres Fisik 100%	

Nama Penerima Bantuan : PENDI ASRIANTO		Kabupaten : Kuantan Singingi	
Alamat : RT. 001 RW. 001		Provinsi : Riau	
Desa : Muaro Tombang		Nomor BNBA : 8	
Kecamatan : Kuantan Mudik		Nomor KTP : 1409071804780001	
			
Progres Fisik 0%		Progres Fisik 30% - <100%	
			
		Progres Fisik 100%	

Nama Penerima Bantuan : HENDRI JASWAN		Kabupaten : Kuantan Singingi	
Alamat : RT. 001 RW. 001		Provinsi : Riau	
Desa : Muaro Tombang		Nomor BNBA : 11	
Kecamatan : Kuantan Mudik		Nomor KTP : 1409010203740002	
			
Progres Fisik 0%		Progres Fisik 30% - <100%	
			
		Progres Fisik 100%	

7. KABUPATEN KAMPAR

Nama Penerima Bantuan : SUROHMAT		Kabupaten : KAMPAR	
Alamat : RT 18 RW 08 DUSUN IV		Provinsi : RIAU	
Desa : KOTO DAMAI		Nomor BNBA : 180	
Kecamatan : KAMPAR KIRI TENGAH		Nomor KTP : 1401191406940001	
			
Progres Fisik 0%		Progres Fisik 30% - <100%	
			
		Progres Fisik 100%	

Nama Penerima Bantuan : ZUKRI		Kabupaten : KAMPAR	
Alamat : KOTO TENGAH		Provinsi : RIAU	
Desa : TERATAK BULUH		Nomor BNBA : 224	
Kecamatan : SIAK HULU		Nomor KTP : 1401030701880019	
			
Progres Fisik 0%		Progres Fisik 30% - <100%	
			
		Progres Fisik 100%	

Nama Penerima Bantuan : RONALTI		Kabupaten :Kampar	
Alamat : RT 001 RW 001 DUSUN III		Provinsi : Riau	
Desa : RANAH		Nomor BNBA : 109	
Kecamatan : Kampar		Nomor KTP : 1401021204010001	
			
Progres Fisik 0%		Progres Fisik 30% - <100%	
			
		Progres Fisik 100%	

Nama Penerima Bantuan : IMAM MUSTOFA		Kabupaten : KAMPAR	
Alamat : GADING SARI		Provinsi : RIAU	
Desa : GADING SARI		Nomor BNBA : 20	
Kecamatan : TAPUNG		Nomor KTP : 1401102202980003	
			
Progres Fisik 0%		Progres Fisik 30% - <100%	
			
		Progres Fisik 100%	

Nama Penerima Bantuan : ALEKSAN		Kabupaten : KAMPAR	
Alamat : LINGK DARUSSALAM RT 006, RW 003		Provinsi : RIAU	
Desa : SUNGAI PAGAR		Nomor BNBA : 181	
Kecamatan : KAMPAR KIRI HILIR		Nomor KTP : 1401081103800001	
			
Progres Fisik 0%		Progres Fisik 30% - <100%	
		Progres Fisik 100%	

8. KABUPATEN ROKAN HULU

Nama Penerima Bantuan : MUKHOLLY SIR		Kabupaten : Rokan Hulu	
Alamat : Dusun I Tingkok RT.002 RW.002		Provinsi : Riau	
Desa : Desa Tingkok		Nomor BNBA : 3	
Kecamatan : Tambusai		Nomor KTP : 1406041912660001	
			
Progres Fisik 0%		Progres Fisik 30% - <100%	
		Progres Fisik 100%	

Nama Penerima Bantuan : MASDINGIN		Kabupaten : Rokan Hulu	
Alamat : Dusun I Tingkok RT.001 RW.001		Provinsi : Riau	
Desa : Desa Tingkok		Nomor BNBA : 4	
Kecamatan : Tambusai		Nomor KTP : 1406044205600003	
			
Progres Fisik 0%		Progres Fisik 30% - <100%	
		Progres Fisik 100%	

Nama Penerima Bantuan : M.ALBAR NASUTION		Kabupaten : Rokan Hulu	
Alamat : Dusun I Tingkok RT.001 RW.001		Provinsi : Riau	
Desa : Desa Tingkok		Nomor BNBA : 7	
Kecamatan : Tambusai		Nomor KTP : 1406042312900003	
			
Progres Fisik 0%		Progres Fisik 30% - <100%	
		Progres Fisik 100%	

Nama Penerima Bantuan : GUNUNG SIREGAR		Kabupaten : Rokan Hulu	
Alamat : Dusun I Tingkok RT.004 RW.001		Provinsi : Riau	
Desa : Desa Tingkok		Nomor BNBA : 8	
Kecamatan : Tambusai		Nomor KTP : 1406041708760008	
			
Progres Fisik 0%		Progres Fisik 30% - <100%	
			
		Progres Fisik 100%	

Nama Penerima Bantuan : SISWADI		Kabupaten : Rokan Hulu	
Alamat : Dusun I Tingkok RT.003 RW.003		Provinsi : Riau	
Desa : Desa Tingkok		Nomor BNBA : 9	
Kecamatan : Tambusai		Nomor KTP : 1406040809800003	
			
Progres Fisik 0%		Progres Fisik 30% - <100%	
			
		Progres Fisik 100%	

Nama Penerima Bantuan : ANNAN		Kabupaten : Rokan Hulu
Alamat : Dusun I Tingkok RT.003 RW.002		Provinsi : Riau
Desa : Desa Tingkok		Nomor BNBA : 10
Kecamatan : Tambusai		Nomor KTP : 1406040502900007
		
Progres Fisik 0%	Progres Fisik 30% - <100%	Progres Fisik 100%

**PROFIL PENERIMA PELAKSANAAN BANTUAN
BSPS TAHUN 2025**

1. KOTA DUMAI

Nama Penerima Bantuan : Purna Wira Yudha		Kota : Dumai	
Alamat : Jalan Baruna		Provinsi : Riau	
Desa : Bagan Keladi		Nomor BNBA : 10	
Kecamatan : Dumai Barat		Nomor KTP : 1472011409820021	
			
			
Progres Fisik 0%		Progres Fisik 30% - <100%	
		Progres Fisik 100%	

Nama Penerima Bantuan : Cholimah		Kota : Dumai	
Alamat : JL. Harapan RT 09		Provinsi : Riau	
Desa : Bagan Keladi		Nomor BNBA : 7	
Kecamatan : Dumai Barat		Nomor KTP : 1472016808710024	
			
			
Progres Fisik 0%		Progres Fisik 30% - <100%	
		Progres Fisik 100%	

Nama Penerima Bantuan : Mesri Erliani		Kota : Dumai	
Alamat : Jl. Harapan, Gg Mulia RT 13		Provinsi : Riau	
Desa : Bagan Keladi		Nomor BNBA : 9	
Kecamatan : Dumai Barat		Nomor KTP : 1472014912840045	
			
Progres Fisik 0%		Progres Fisik 30% - <100%	
			
Progres Fisik 0%		Progres Fisik 100%	

Nama Penerima Bantuan : Supriyanto		Kota : Dumai	
Alamat : Jalan Baruna		Provinsi : Riau	
Desa : Bagan Keladi		Nomor BNBA : 3	
Kecamatan : Dumai Barat		Nomor KTP : 1472010312920001	
			
Progres Fisik 0%		Progres Fisik 30% - <100%	
			
Progres Fisik 0%		Progres Fisik 100%	

Nama Penerima Bantuan : Romlah		Kota : Dumai
Alamat : Jalan Kelapa Gading		Provinsi : Riau
Desa : Bagan Keladi		Nomor BNBA : 6
Kecamatan : Dumai Barat		Nomor KTP : 1472016404700022
		
Progres Fisik 0%	Progres Fisik 30% - <100%	Progres Fisik 100%

2. KOTA PEKANBARU

Nama Penerima Bantuan : Riyatna		Kota : Pekanbaru
Alamat : Jalan Tani Lintas Timur		Provinsi : Riau
Desa : Sialang Rampai		Nomor BNBA : 2
Kecamatan : Kulim		Nomor KTP : 1471105509850009
		
Progres Fisik 0%	Progres Fisik 30% - <100%	Progres Fisik 100%

Nama Penerima Bantuan : Rotua Elizabet Octavia		Kota : Pekanbaru	
Alamat : Jalan Mekar		Provinsi : Riau	
Desa : Sialang Rampai		Nomor BNBA : 10	
Kecamatan : Kulim		Nomor KTP : 1471105710750001	
			
Progres Fisik 0%		Progres Fisik 30% - <100%	
		Progres Fisik 100%	

Nama Penerima Bantuan : Parto		Kota : Pekanbaru	
Alamat : Jalan Tani RT 001/RW 007		Provinsi : Riau	
Desa : Sialang Rampai		Nomor BNBA : 9	
Kecamatan : Kulim		Nomor KTP : 1471101602850043	
			
Progres Fisik 0%		Progres Fisik 30% - <100%	
		Progres Fisik 100%	

Nama Penerima Bantuan : Solihati		Kota : Pekanbaru	
Alamat : Jalan Suka Maju		Provinsi : Riau	
Desa : Sungai Ambang		Nomor BNBA : 9	
Kecamatan : Rumbai Timur		Nomor KTP : 1471126305770005	
			
Progres Fisik 0%		Progres Fisik 30% - <100%	
		Progres Fisik 100%	

Nama Penerima Bantuan : Rahmi Rahayu		Kota : Pekanbaru	
Alamat : Jl. Seroja, Gg Keluarga		Provinsi : Riau	
Desa : Sialang Rampai		Nomor BNBA : 12	
Kecamatan : Kulim		Nomor KTP : 1471105810830042	
			
Progres Fisik 0%		Progres Fisik 30% - <100%	
		Progres Fisik 100%	

FOTO DOKUMENTASI PENINGKATAN KUALITAS SANITASI

DATA PENERIMA BANTUAN

1. Nama : FAHRIZAL
2. Alamat : RT 001 RW 007
3. Desa/Kelurahan : Kepenuhan Tengah
4. Kecamatan : Kepenuhan
5. Kabupaten : Rokan Hulu
6. Jenis Bantuan :
 - Bilik
 - Tangki septik individual
 - Pengolahan lanjutan

TENAGA & ALAT KERJA

TENAGA KERJA

1. Tukang Gali : 3 Orang
2. Tukang Bata : 2 Orang

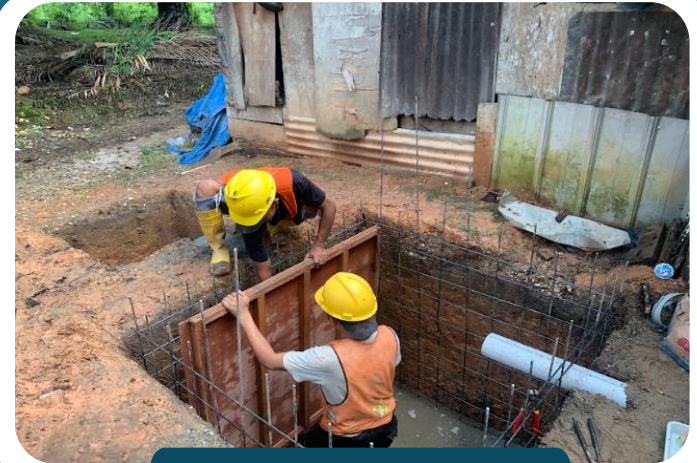
ALAT KERJA

1. Gegep
2. Cangkul
3. Skop
4. Tembiling
5. Angkong
6. Roskam
7. Jidar Kayu
8. Hawk
9. Ember
10. Meteran 10 cm

DOKUMENTASI KEGIATAN



Pek. Persiapan



Pek. Pembuatan Septictank



Pek. Pembuatan Bilik WC



Pek. Pengecatan

FOTO DOKUMENTASI PENINGKATAN KUALITAS SANITASI

DATA PENERIMA BANTUAN

1. Nama : ISMAIL
2. Alamat : RT 002 RW 007
3. Desa/Kelurahan : Kepenuhan Tengah
4. Kecamatan : Kepenuhan
5. Kabupaten : Rokan Hulu
6. Jenis Bantuan : - Bilik
- Pengolahan lanjutan

TENAGA & ALAT KERJA

TENAGA KERJA

1. Tukang Gali : 3 Orang
2. Tukang Bata : 2 Orang

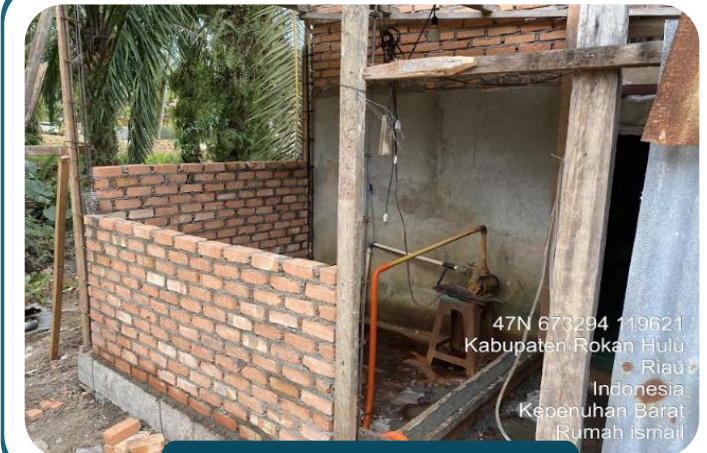
ALAT KERJA

1. Gegep
2. Cangkul
3. Skop
4. Tembilang
5. Angkong
6. Roskam
7. Jidar Kayu
8. Hawk
9. Ember
10. Meteran 10 cm

DOKUMENTASI KEGIATAN



Pek. Persiapan



Pek. Pembuatan Bilik WC



Pek. Pembuatan Sumur Res.



Pek. Pengecatan

FOTO DOKUMENTASI PENINGKATAN KUALITAS SANITASI

DATA PENERIMA BANTUAN

1. Nama : NASIR. M
2. Alamat : RT 003 RW 007
3. Desa/Kelurahan : Kepenuhan Tengah
4. Kecamatan : Kepenuhan
5. Kabupaten : Rokan Hulu
6. Jenis Bantuan : - Bilik
- Tangki septik individual
- Pengolahan lanjutan

TENAGA & ALAT KERJA

TENAGA KERJA

1. Tukang Gali : 3 Orang
2. Tukang Bata : 2 Orang

ALAT KERJA

1. Gegep
2. Cangkul
3. Skop
4. Tembilang
5. Angkong
6. Roskam
7. Jidar Kayu
8. Hawk
9. Ember
10. Meteran 10 cm

DOKUMENTASI KEGIATAN



Drop material



Pek. Pembuatan Sumur Res.



Pek. Pembuatan Bilik WC



Pek. Pengecatan

Kabupaten Rokan Hulu
Kiau
Indonesia
Kepenuhan Barat
Rumah Nasir

FOTO DOKUMENTASI PENINGKATAN KUALITAS SANITASI

DATA PENERIMA BANTUAN

1. Nama : SAHAR
2. Alamat : RT 003 RW 007
3. Desa/Kelurahan : Kepenuhan Tengah
4. Kecamatan : Kepenuhan
5. Kabupaten : Rokan Hulu
6. Jenis Bantuan :
 - Bilik
 - Tangki septik individual
 - Pengolahan lanjutan

TENAGA & ALAT KERJA

TENAGA KERJA

1. Tukang Gali : 3 Orang
2. Tukang Bata : 2 Orang

ALAT KERJA

1. Gegep
2. Cangkul
3. Skop
4. Tembilang
5. Angkong
6. Roskam
7. Jidar Kayu
8. Hawk
9. Ember
10. Meteran 10 cm

DOKUMENTASI KEGIATAN



Pek. Persiapan



Pek. Pembuatan Septictank



Pek. Pembuatan Bilik WC



Pek. Pengecatan

FOTO DOKUMENTASI PENINGKATAN KUALITAS SANITASI

DATA PENERIMA BANTUAN

1. Nama : SAHARUDIN
2. Alamat : RT 002 RW 008
3. Desa/Kelurahan : Kepenuhan Tengah
4. Kecamatan : Kepenuhan
5. Kabupaten : Rokan Hulu
6. Jenis Bantuan :
 - Bilik
 - Tangki septik individual
 - Pengolahan lanjutan

TENAGA & ALAT KERJA

TENAGA KERJA

1. Tukang Gali : 3 Orang
2. Tukang Bata : 2 Orang

ALAT KERJA

1. Gegep
2. Cangkul
3. Skop
4. Tembilang
5. Angkong
6. Roskam
7. Jidar Kayu
8. Hawk
9. Ember
10. Meteran 10 cm

DOKUMENTASI KEGIATAN



Pek. Persiapan



Pek. Pembuatan Septictank



Pek. Pembuatan Bilik WC



Pek. Pengecatan

Kabupaten Rokan Hulu
Riau
Indonesia
Kepenuhan Barat
Rumah Saharudin

47N 673066.119904
Kabupaten Rokan Hulu
Riau
Indonesia
Kepenuhan Barat
Rumah Saharudin

FOTO DOKUMENTASI PENINGKATAN KUALITAS SANITASI

DATA PENERIMA BANTUAN

1. Nama : DARMA WATI
2. Alamat : RT 001 RW 003
3. Desa/Kelurahan : Kepenuhan Tengah
4. Kecamatan : Kepenuhan
5. Kabupaten : Rokan Hulu
6. Jenis Bantuan :
 - Kloset leher angsa
 - Tangki septik individual
 - Pengolahan lanjutan

TENAGA & ALAT KERJA

TENAGA KERJA

1. Tukang Gali : 3 Orang
2. Tukang Bata : 2 Orang

ALAT KERJA

1. Gegep
2. Cangkul
3. Skop
4. Tembilang
5. Angkong
6. Roskam
7. Jidar Kayu
8. Hawk
9. Ember
10. Meteran 10 cm

DOKUMENTASI KEGIATAN



Pek. galian septictank dan sumur resapan



Pek. Pembuatan Septictank



Pek. Pemasangan Kloset



Pek. Sisa finishing

FOTO DOKUMENTASI PENINGKATAN KUALITAS SANITASI

DATA PENERIMA BANTUAN

1. Nama : UMMI ATTIYAH
2. Alamat : RT 004 RW 002
3. Desa/Kelurahan : Kepenuhan Tengah
4. Kecamatan : Kepenuhan
5. Kabupaten : Rokan Hulu
6. Jenis Bantuan : - Bilik
- Tangki septik individual
- Pengolahan lanjutan

TENAGA & ALAT KERJA

TENAGA KERJA

1. Tukang Gali : 3 Orang
2. Tukang Bata : 2 Orang

ALAT KERJA

1. Gegep
2. Cangkul
3. Skop
4. Tembilang
5. Angkong
6. Roskam
7. Jidar Kayu
8. Hawk
9. Ember
10. Meteran 10 cm

DOKUMENTASI KEGIATAN



Pek. galian septictank dan sumur resapan



Pek. Pembuatan Septictank



Pek. Pembuatan Bilik WC



Pek. Pengecatan

FOTO DOKUMENTASI PENINGKATAN KUALITAS SANITASI

DATA PENERIMA BANTUAN

1. Nama : HARTINI
2. Alamat : RT 002 RW 003
3. Desa/Kelurahan : Kepenuhan Tengah
4. Kecamatan : Kepenuhan
5. Kabupaten : Rokan Hulu
6. Jenis Bantuan : - Bilik
- Tangki septik individual
- Pengolahan lanjutan

TENAGA & ALAT KERJA

TENAGA KERJA

1. Tukang Gali : 3 Orang
2. Tukang Bata : 2 Orang

ALAT KERJA

1. Gegep
2. Cangkul
3. Skop
4. Tembilang
5. Angkong
6. Roskam
7. Jidar Kayu
8. Hawk
9. Ember
10. Meteran 10 cm

DOKUMENTASI KEGIATAN



Pek. galian septictank dan sumur resapan



Pek. Pembuatan Septictank



Pek. Pembuatan Bilik WC



Pek. Pengecatan

FOTO DOKUMENTASI PENINGKATAN KUALITAS SANITASI

DATA PENERIMA BANTUAN

1. Nama : NASRUL AMIN
2. Alamat : RT 002 RW 003
3. Desa/Kelurahan : Kepenuhan Tengah
4. Kecamatan : Kepenuhan
5. Kabupaten : Rokan Hulu
6. Jenis Bantuan : - Bilik
- Tangki septik individual
- Pengolahan lanjutan

TENAGA & ALAT KERJA

TENAGA KERJA

1. Tukang Gali : 3 Orang
2. Tukang Bata : 2 Orang

ALAT KERJA

1. Gegep
2. Cangkul
3. Skop
4. Tembilang
5. Angkong
6. Roskam
7. Jidar Kayu
8. Hawk
9. Ember
10. Meteran 10 cm

DOKUMENTASI KEGIATAN



Pek. Persiapan



Pek. Pembuatan Septictank



Pek. Pembuatan Septictank



Pek. Pengecatan

FOTO DOKUMENTASI PENINGKATAN KUALITAS SANITASI

DATA PENERIMA BANTUAN

1. Nama : HUSNAINI
2. Alamat : RT 002 RW 008
3. Desa/Kelurahan : Kepenuhan Tengah
4. Kecamatan : Kepenuhan
5. Kabupaten : Rokan Hulu
6. Jenis Bantuan :
 - Bilik
 - Tangki septik individual
 - Pengolahan lanjutan

TENAGA & ALAT KERJA

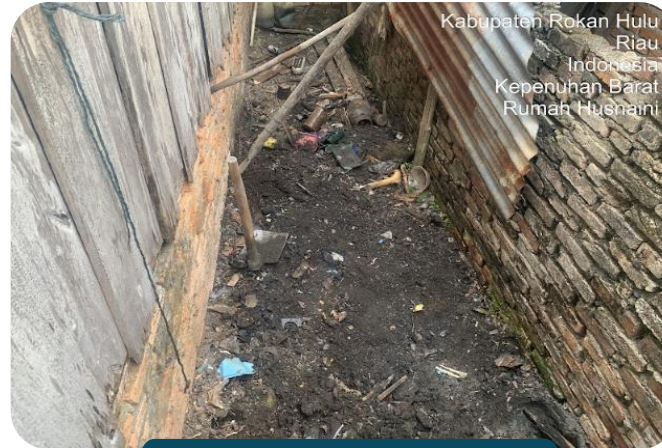
TENAGA KERJA

1. Tukang Gali : 3 Orang
2. Tukang Bata : 2 Orang

ALAT KERJA

1. Gegep
2. Cangkul
3. Skop
4. Tembilang
5. Angkong
6. Roskam
7. Jidar Kayu
8. Hawk
9. Ember
10. Meteran 10 cm

DOKUMENTASI KEGIATAN



Pek. Persiapan



Pek. Pembuatan Septictank



Pek. Pembuatan Septictank



Pek. Pengecatan

FOTO DOKUMENTASI PENINGKATAN KUALITAS SANITASI

DATA PENERIMA BANTUAN

1. Nama : HARIANTO
2. Alamat : RT 001 RW 003
3. Desa/Kelurahan : Kepenuhan Tengah
4. Kecamatan : Kepenuhan
5. Kabupaten : Rokan Hulu
6. Jenis Bantuan :
 - Kloset leher angsa
 - Tangki septik individual
 - Pengolahan lanjutan

TENAGA & ALAT KERJA

TENAGA KERJA

1. Tukang Gali : 3 Orang
2. Tukang Bata : 2 Orang

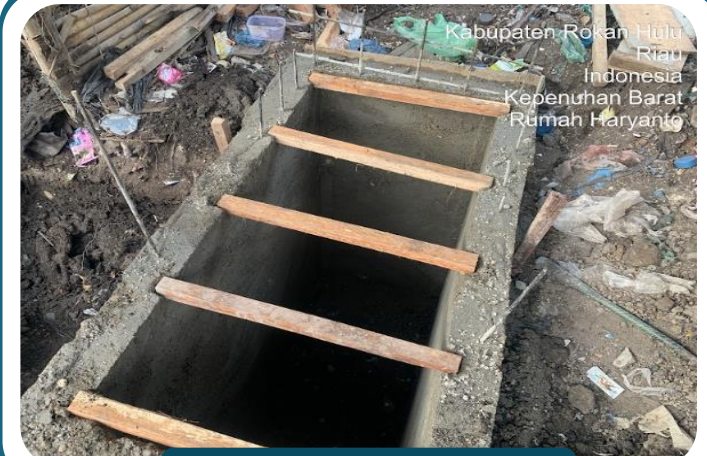
ALAT KERJA

1. Gegep
2. Cangkul
3. Skop
4. Tembilang
5. Angkong
6. Roskam
7. Jidar Kayu
8. Hawk
9. Ember
10. Meteran 10 cm

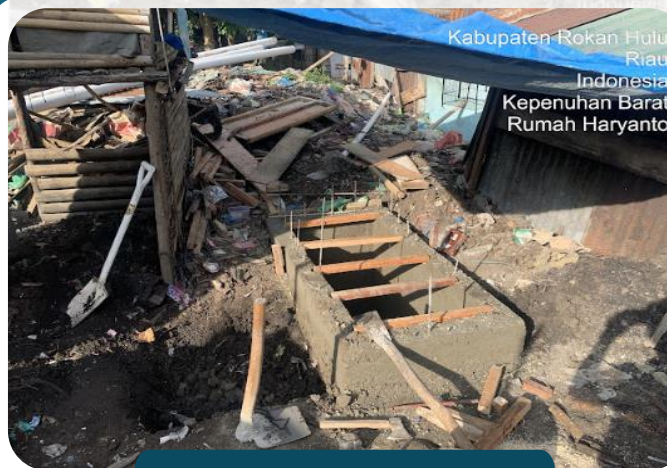
DOKUMENTASI KEGIATAN



Pek. Persiapan



Pek. Pembuatan Septictank



Pek. Pembuatan Septictank



Pek. Pembuatan Sumur Resapan

FOTO DOKUMENTASI PENINGKATAN KUALITAS SANITASI

DATA PENERIMA BANTUAN

1. Nama : LISMARDI. D
2. Alamat : RT 002 RW 008
3. Desa/Kelurahan : Kepenuhan Tengah
4. Kecamatan : Kepenuhan
5. Kabupaten : Rokan Hulu
6. Jenis Bantuan : - Bilik
- Tangki septik individual
- Pengolahan lanjutan

TENAGA & ALAT KERJA

TENAGA KERJA

1. Tukang Gali : 3 Orang
2. Tukang Bata : 2 Orang

ALAT KERJA

1. Gegep
2. Cangkul
3. Skop
4. Tembilang
5. Angkong
6. Roskam
7. Jidar Kayu
8. Hawk
9. Ember
10. Meteran 10 cm

DOKUMENTASI KEGIATAN



Kondisi Eksisting



Pek. Galian Septictank



Pek. Pembuatan Sumur Resapan dan Septictank



Pek. Pengecatan

FOTO DOKUMENTASI PENINGKATAN KUALITAS SANITASI

DATA PENERIMA BANTUAN

1. Nama : WAIS ALQORNI
2. Alamat : RT 003 RW 001
3. Desa/Kelurahan : Kepenuhan Tengah
4. Kecamatan : Kepenuhan
5. Kabupaten : Rokan Hulu
6. Jenis Bantuan : - Bilik
- Kloset leher angsa

TENAGA & ALAT KERJA

TENAGA KERJA

1. Tukang Gali : 3 Orang
2. Tukang Bata : 2 Orang

ALAT KERJA

1. Gegep
2. Cangkul
3. Skop
4. Tembilang
5. Angkong
6. Roskam : Kelurahan Kepenuhan Tengah
7. Jidar Kayu : Kepenuhan Tengah
8. Hawk : Rokan Hulu
9. Ember : Tipe 1 (Bilik WC, Closet, Perpipaan, Septictank, dan sumur Resapan)
10. Meteran 10 m

DOKUMENTASI KEGIATAN



Drop material



Pembongkaran bilik eksisting



Pekerjaan bilik



Pek. Pengecatan

FOTO DOKUMENTASI PENINGKATAN KUALITAS SANITASI

DATA PENERIMA BANTUAN

1. Nama : ABDULLAH SANI MAJO
2. Alamat : RT 003 RW 002
3. Desa/Kelurahan : Kepenuhan Tengah
4. Kecamatan : Kepenuhan
5. Kabupaten : Rokan Hulu
6. Jenis Bantuan :
 - Bilik
 - Tangki septik individual
 - Pengolahan lanjutan

TENAGA & ALAT KERJA

TENAGA KERJA

1. Tukang Gali : 3 Orang
2. Tukang Bata : 2 Orang

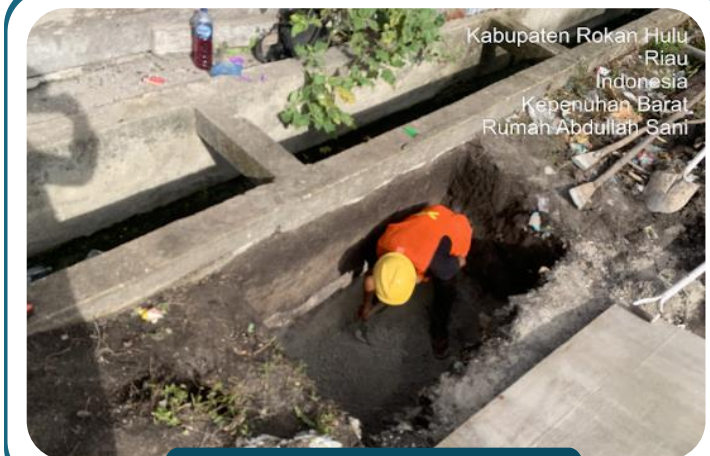
ALAT KERJA

1. Gegep
2. Cangkul
3. Skop
4. Tembilang
5. Angkong
6. Roskam
7. Jidar Kayu
8. Hawk
9. Ember
10. Meteran 10 cm

DOKUMENTASI KEGIATAN



Pekerjaan Galian



Pek. Galian Septictank



Pek. Pembuatan Sumur Resapan



Pek. Pengecatan

FOTO DOKUMENTASI PENINGKATAN KUALITAS SANITASI

DATA PENERIMA BANTUAN

1. Nama : NURONI
2. Alamat : RT 002 RW 009
3. Desa/Kelurahan : Kepenuhan Tengah
4. Kecamatan : Kepenuhan
5. Kabupaten : Rokan Hulu
6. Jenis Bantuan :
 - Bilik
 - Tangki septik individual
 - Pengolahan lanjutan

TENAGA & ALAT KERJA

TENAGA KERJA

1. Tukang Gali : 3 Orang
2. Tukang Bata : 2 Orang

ALAT KERJA

1. Gegep
2. Cangkul
3. Skop
4. Tembilang
5. Angkong
6. Roskam
7. Jidar Kayu
8. Hawk
9. Ember
10. Meteran 10 cm

DOKUMENTASI KEGIATAN



Pekerjaan Galian



Pek. Dinding Bilik



Pek. Penutup Septictank



Pek. Pengecatan

FOTO DOKUMENTASI PENINGKATAN KUALITAS SANITASI

DATA PENERIMA BANTUAN

1. Nama : SAMSUL
2. Alamat : RT 001 RW 006
3. Desa/Kelurahan : Kepenuhan Tengah
4. Kecamatan : Kepenuhan
5. Kabupaten : Rokan Hulu
6. Jenis Bantuan :
 - Bilik
 - Tangki septik individual
 - Pengolahan lanjutan

TENAGA & ALAT KERJA

TENAGA KERJA

1. Tukang Gali : 3 Orang
2. Tukang Bata : 2 Orang

ALAT KERJA

1. Gegep
2. Cangkul
3. Skop
4. Tembilang
5. Angkong
6. Roskam
7. Jidar Kayu
8. Hawk
9. Ember
10. Meteran 10 cm

DOKUMENTASI KEGIATAN



Pekerjaan Galian



Pek. Bekisting Septictank



Pek. Penutup Sumur Resapan dan Septictank



Pek. Pengecatan

FOTO DOKUMENTASI PENINGKATAN KUALITAS SANITASI

DATA PENERIMA BANTUAN

1. Nama : IDA
2. Alamat : RT 004 RW 001
3. Desa/Kelurahan : Kepenuhan Tengah
4. Kecamatan : Kepenuhan
5. Kabupaten : Rokan Hulu
6. Jenis Bantuan : - Bilik
- Tangki septik individual
- Pengolahan lanjutan

TENAGA & ALAT KERJA

TENAGA KERJA

1. Tukang Gali : 3 Orang
2. Tukang Bata : 2 Orang

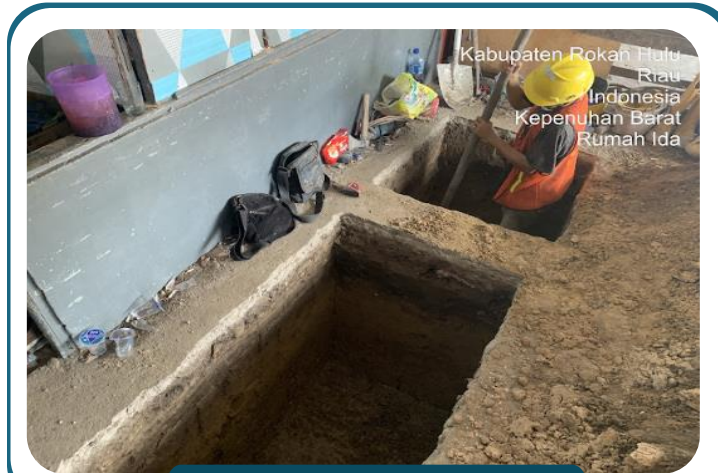
ALAT KERJA

1. Gegep
2. Cangkul
3. Skop
4. Tembiling
5. Angkong
6. Roskam
7. Jidar Kayu
8. Hawk
9. Ember
10. Meteran 10 cm

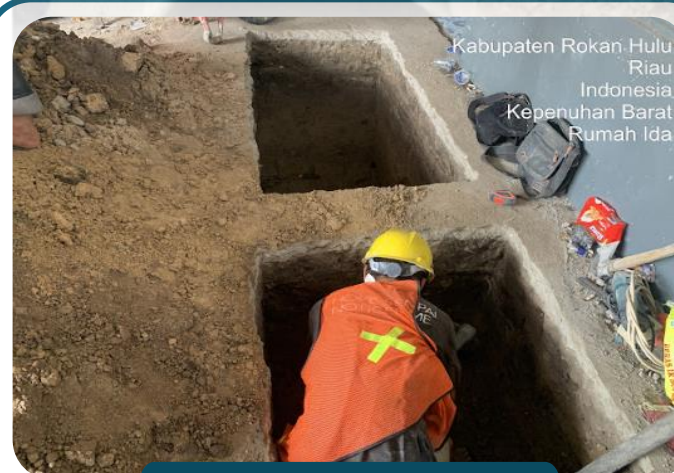
DOKUMENTASI KEGIATAN



Pekerjaan Galian



Pekerjaan Galian



Pekerjaan Galian



Pek. Pengecatan

FOTO DOKUMENTASI PENINGKATAN KUALITAS SANITASI

DATA PENERIMA BANTUAN

1. Nama : ANIAH
2. Alamat : RT 003 RW 008
3. Desa/Kelurahan : Kepenuhan Tengah
4. Kecamatan : Kepenuhan
5. Kabupaten : Rokan Hulu
6. Jenis Bantuan : - Tangki septik individual

TENAGA & ALAT KERJA

TENAGA KERJA

1. Tukang Gali : 3 Orang
2. Tukang Bata : 2 Orang

ALAT KERJA

1. Gegep
2. Cangkul
3. Skop
4. Tembilang
5. Angkong
6. Roskam
7. Jidar Kayu
8. Hawk
9. Ember
10. Meteran 10 cm

DOKUMENTASI KEGIATAN



Pekerjaan Pembongkaran Bilik Eksisting



Pekerjaan Bilik



Pekerjaan Bilik



Pekerjaan Pemasangan Kloset

DOKUMENTASI SERAH TERIMA PERTAMA/PHO PENINGKATAN KUALITAS SANITASI RUMAH



FOTO DOKUMENTASI PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN KUMUH



Minggu ke-1 (3 - 9 Oktober 2025) Pekerjaan Persiapan



Minggu ke-2 (10 - 16 Oktober 2025) Pekerjaan Konstruksi

FOTO DOKUMENTASI PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN KUMUH



Minggu ke-3 (17 - 23 Oktober 2025) Pekerjaan Konstruksi



Minggu ke-4 (24 - 30 Oktober 2025) Pekerjaan Konstruksi

FOTO DOKUMENTASI PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN KUMUH



Minggu ke-5 (31 Oktober – 06 November 2025) Pekerjaan Konstruksi



Minggu ke-6 (07 - 13 November 2025) Pekerjaan Konstruksi

FOTO DOKUMENTASI PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN KUMUH



Pekerjaan Acian Saluran Keliling



Cor Cover U Ditch STA 0+750

Minggu ke-7 (14 – 20 November 2025) Pekerjaan Konstruksi



Pekerjaan Galian STA 0+600 (R)



Pekerjaan pada Mal DPT



Acian Saluran Keliling

Minggu ke-8 (21 – 27 November 2025) Pekerjaan Konstruksi

FOTO DOKUMENTASI PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN KUMUH



Pekerjaan Pengecoran Pedestrian



Pekerjaan Pembesian Cover U Ditch STA 0+475



Pengecatan pada Bangunan TPS-3R

Minggu ke-9 (28 November – 04 Desember 2025) Pekerjaan Konstruksi



Pekerjaan Galian STA 0+700 (R)



**Pembesian dan Bekisting Cover U Ditch STA
0+475 s.d 0+500**



Pekerjaan Trali Besi pada Bangunan TPS-3R

Minggu ke-10 (05 – 11 Desember 2025) Pekerjaan Konstruksi

FOTO DOKUMENTASI PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN KUMUH



Pekerjaan Bangunan TPS-3R

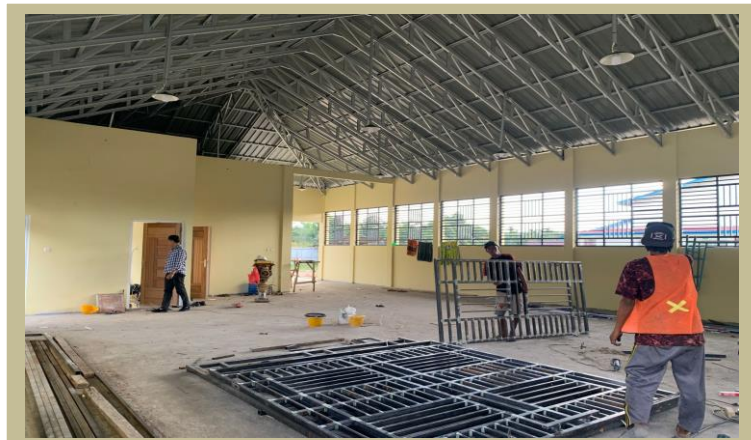


Pekerjaan Pemasangan Batu Andesit



Pekerjaan Galian pada STA 0+850

Minggu ke-11 (12 – 18 Desember 2025) Pekerjaan Konstruksi



Pek. Pemasangan Tralis Besi pada Bangunan TPS-3R



Pek. Penulangan pada Tutup Saluran



Pek. Pengecoran pada Tutup Saluran

Minggu ke-12 (19 – 25 Desember 2025) Pekerjaan Konstruksi

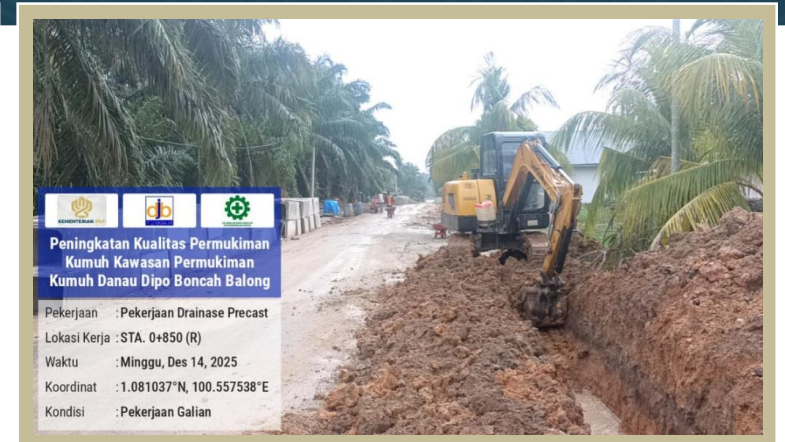
FOTO DOKUMENTASI PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN KUMUH



Pekerjaan Bangunan TPS-3R



Pekerjaan Pemasangan Batu Andesit



Pekerjaan Galian pada STA 0+850

Minggu ke-13 (26 – 31 Desember 2025) Pekerjaan Konstruksi



Kondisi Bangunan TPS-3R



Pek. Pengecoran Lantai Kerja



Pek. Pengecoran pada Dinding Saluran

Minggu ke-14 (01 – 06 Januari 2026) Pekerjaan Konstruksi

FOTO DOKUMENTASI PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN KUMUH



Pek. Pengecoran Cover U-Ditch STA 0+025(R)



Pek. Pembesian Cover U-Ditch STA 0+175 (L)



Pekerjaan Pemasangan Kanstin STA 0+300

Minggu ke-14 (01 – 06 Januari 2026) Pekerjaan Konstruksi



Pek. Galian STA 0+425 (L)



Pek. Pemasangan Box Culvert STA 0+575



Pek. Bekisting Dinding Saluran STA 0+825(R)

Minggu ke-14 (01 – 06 Januari 2026) Pekerjaan Konstruksi

FOTO DOKUMENTASI PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN KUMUH



Rencana sumur resapan sisi kiri STA 0+325 dan bak control 80x80 cm



Rencana sumur resapan sisi kanan STA 0+325 dan bak control 80x80 cm



Pek. Pengecoran Leher U-Ditch STA 0+875 (R)



Pek. Pembesian Cover U-Ditch STA 0+150 (R)



Pek. Pas. Batu Andesit dan Guiding Block STA 0+50 dan 0+250



Minggu ke-14 (01 – 06 Januari 2026) Pekerjaan Konstruksi

FOTO DOKUMENTASI PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN KUMUH



Pemasangan saluran U-Ditch STA 0+425 (L)



Pengadaan Peralatan Perlengkapan di Bangunan TPS-3R



Minggu ke-14 (01 – 06 Januari 2026) Pekerjaan Konstruksi



Pek. Pengecoran Cover U-Ditch STA 0+175 (R)



Pek. Pas. Batu Andesit dan Guiding Block STA 0+150 (L)



Minggu ke-14 (01 – 06 Januari 2026) Pekerjaan Konstruksi



KEMENPKP
REPUBLIK INDONESIA

SATKER PKP RIAU

